

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*
BAGIAN ANGGARAN 055
PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN ANGGARAN 055

**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
(Audited)**

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PPN/Bappenas. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 12 Mei 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran Pendukung	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	63
VI. Lampiran	

Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang	13
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	17
Tabel 4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2019	18
Tabel 5 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2019	18
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019.....	19
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	19
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019.....	20
Tabel 9 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2019.....	21
Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2019.....	21
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	21
Tabel 12 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL).....	22
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	23
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	24
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	24
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	25
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	25
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	26
Tabel 19 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah	27
Tabel 20 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	28
Tabel 21 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	28
Tabel 22 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019	30
Tabel 23 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	30
Tabel 24 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja	31
Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah.....	32
Tabel 26 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin	33
Tabel 27 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan	34
Tabel 28 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35
Tabel 29 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya.....	36
Tabel 30 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	37
Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per per 31 Desember 2019.....	37
Tabel 32 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019.....	38
Tabel 33 Rincian Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2019.....	39
Tabel 34 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud.....	39
Tabel 35 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	40
Tabel 36 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019	40
Tabel 37 Mutasi Aset Lain-lain	40

Tabel 38 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019	41
Tabel 39 Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	43
Tabel 40 Perbandingan PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	43
Tabel 41 Selisih Nilai PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	44
Tabel 42 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	44
Tabel 43 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019....	44
Tabel 44 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	45
Tabel 45 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	45
Tabel 46 Perbandingan Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	45
Tabel 47 Selisih Nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019 ...	46
Tabel 48 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	46
Tabel 49 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA 31 Desember 2019	47
Tabel 50 Selisih Nilai Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	48
Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	49
Tabel 52 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	49
Tabel 53 Selisih Nilai Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	50
Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	50
Tabel 55 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA 31 Desember 2019.....	50
Tabel 56 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	51
Tabel 57 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	52
Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019	52
Tabel 59 Selisih Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	52
Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	53
Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	53
Tabel 62 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.....	53
Tabel 63 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	54
Tabel 64 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	54
Tabel 65 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	55
Tabel 66 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	55

Tabel 67 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018	55
Tabel 68 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019.....	55
Tabel 69 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	57
Tabel 70 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi.....	58
Tabel 71 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	58
Tabel 72 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	58
Tabel 73 Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.....	59
Tabel 74 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	59
Tabel 75 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker	60
Tabel 76 Rincian Ditagihkan dari Entitas Lain (DKEL) per Satker.....	60
Tabel 77 Rincian Transfer Masuk per Satker	61
Tabel 78 Rincian Transfer Keluar per Satker	61
Tabel 79 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker.....	62
Tabel 80 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker.....	62
Tabel 81 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan <i>Stunting</i> DIPA Bappenas	64

1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019.....	20
---	----

LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
2. Daftar Penerimaan Hibah Langsung
3. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas
4. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)
5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
6. Daftar Piutang Bukan Pajak
7. Daftar Piutang Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung, Penyusutan Piutang Tidak Tertagih, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (BL TGR) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) & BOT
8. Daftar Rincian Persediaan
9. Laporan SIMAK – BMN
10. Daftar Barang Milik Negara Yang Rusak Berat
11. Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga
12. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
13. Daftar Pinjaman dan Hibah
14. Daftar Rekening Pemerintah
15. Daftar Rekening Lainnya

LAMPIRAN PENDUKUNG

16. Neraca Percobaan
17. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
18. Daftar Realisasi Satuan Kerja Pusat
19. Daftar Realisasi Dana Dekonsentrasi
20. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran
21. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2018
22. Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2018
23. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bagian Satker
24. Pernyataan Tanggung Jawab Unit Badan Lainnya Bagian Satker
25. Daftar Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah
26. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Mei 2020

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Semester II Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.895.435.183,00 dan estimasi Pendapatan-LRA adalah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.580.198.695.165,00 atau mencapai 86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.837.259.507.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.634.532.431.543,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp137.791.560.550,00, Aset Tetap (*Netto*) sebesar Rp1.925.370.101.409,00, Piutang Jangka Panjang (*Netto*) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (*Netto*) sebesar Rp571.370.769.584,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.782.213.767,00 dan Rp2.629.750.217.776,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp526.895.890,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.119.814.914.704,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp(3.119.288.018.814,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.038.358.707,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3.117.249.660.107,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp1.606.311.148.017,00. Mutasi selama Semester II Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp(3.117.249.660.107,00), koreksi-koreksi senilai Rp1.733.431.226.092,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.407.257.503.774,00. Sehingga Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp2.629.750.217.776,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019		% thd Angg	31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	4.895.435.183	0	5.823.020.488
JUMLAH PENDAPATAN		-	4.895.435.183	0	5.823.020.488
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	176.117.062.000	169.235.794.623	96	155.691.045.921
Belanja Barang	B.4	1.336.435.220.000	1.129.733.334.979	85	2.306.280.180.629
Belanja Modal	B.5	324.707.225.000	281.229.565.563	87	59.356.839.440
JUMLAH BELANJA		1.837.259.507.000	1.580.198.695.165	86	2.521.328.065.990

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 02/05/20 7:49 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_jra_face_kl_komparatif --rekon17

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	4,895,435,183	(4,895,435,183)	0	500,237,000	5,823,020,488	(5,322,783,488)	1164
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	4,895,435,183	(4,895,435,183)	0	500,237,000	5,823,020,488	(5,322,783,488)	1164
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	176,117,062,000	169,235,794,623	6,881,267,377	96	167,258,434,000	155,691,045,921	11,567,388,079	93
	BELANJA BARANG	1,336,435,220,000	1,129,733,334,979	206,701,885,021	85	2,387,006,898,000	2,306,280,180,629	80,726,717,371	97
	BELANJA MODAL	324,707,225,000	281,229,565,563	43,477,659,437	87	545,458,569,000	59,356,839,440	486,101,729,560	11
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	257,060,811,835	86	3,099,723,901,000	2,31,328,065,990	578,395,835,010	81
C	PEMBIAYAAN				0				0

24-

NERACA

II. NERACA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	38.136.194	205.713.244
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	5.967.367.257	26.811.835.914
Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	C.3	43.207.682.176	28.553.827.881
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	2.287.530	224.200
Piutang PNB	C.5	-	3.516.480
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.6	51.805.080	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.7	(259.025)	(17.582)
Persediaan	C.8	88.524.541.338	1.003.556.532.748
Persediaan yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		137.791.560.550	1.059.131.632.885
ASET TETAP			
Tanah	C.9	1.484.443.750.305	180.483.709.805
Peralatan dan Mesin	C.10	433.773.685.330	332.663.047.278
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.11	157.938.995.269	144.131.361.953
Gedung dan Bangunan Belum Diregister		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	6.020.002.586	6.507.585.170
Aset Tetap Lainnya	C.13	101.395.867.321	5.379.109.730
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.14	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(258.202.199.382)	(257.457.197.160)
Jumlah Aset Tetap		1.925.370.101.409	411.707.616.776
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.16	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.17	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak ketiga	C.18	490.209.375.000	83.647.500.000
Aset Tak Berwujud	C.19	55.783.312.439	49.586.947.884
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	68.180.544.422	62.680.178.299
Aset Lainnya yang Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(42.802.462.277)	(38.314.958.551)
Jumlah Aset Lainnya		571.370.769.584	157.599.667.632
JUMLAH ASET		2.634.532.431.543	1.628.438.917.293
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	4.546.685.157	21.715.821.483
Hibah Yang Belum Disahkan	C.24	-	5.824.966
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	197.392.416	200.409.583
Uang Muka dari KPPN	C.26	38.136.194	205.713.244
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.782.213.767	22.127.769.276
JUMLAH KEWAJIBAN		4.782.213.767	22.127.769.276
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	2.629.750.217.776	1.606.311.148.017
JUMLAH EKUITAS		2.629.750.217.776	1.606.311.148.017
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.634.532.431.543	1.628.438.917.293

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tgl. Cetak 02/05/2020 7:57 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	38,136,194	205,713,244	(167,577,050)	(81.46)
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,967,367,257	26,811,835,914	(20,844,468,657)	(77.74)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	43,207,682,176	28,553,827,881	14,653,854,295	51.32
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,287,530	224,200	2,063,330	920.31
Piutang Bukan Pajak	0	3,516,480	(3,516,480)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(17,582)	17,582	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	3,498,898	(3,498,898)	(100.00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	51,805,080	0	51,805,080	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(259,025)	0	(259,025)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	51,546,055	0	51,546,055	0.00
Persediaan	88,524,541,338	1,003,556,532,748	(915,031,991,410)	(91.18)
JUMLAH ASET LANCAR	137,791,560,550	1,059,131,632,885	(921,340,072,335)	(86.99)
ASET TETAP				
Tanah	1,484,443,750,305	180,483,709,805	1,303,960,040,500	722.48
Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	332,663,047,278	101,110,638,052	30.39
Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	144,131,361,953	13,807,633,316	9.58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,020,002,566	6,507,585,170	(487,582,604)	(7.49)
Aset Tetap Lainnya	101,395,867,321	5,379,109,730	96,016,757,591	1,784.99
AKUMULASI PENYUSUTAN	(258,202,199,382)	(257,457,197,160)	(745,002,222)	0.29
JUMLAH ASET TETAP	1,925,370,101,409	411,707,616,776	1,513,662,484,633	367.65
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	83,647,500,000	406,561,875,000	486.04
Aset Tak Berwujud	55,783,312,439	49,586,947,884	6,196,364,555	12.50
Aset Lain-lain	68,180,544,422	62,680,178,299	5,500,366,123	8.78
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(42,802,462,277)	(38,314,958,551)	(4,487,503,726)	11.71
JUMLAH ASET LAINNYA	571,370,769,584	157,599,667,632	413,771,101,952	262.55
JUMLAH ASET	2,634,532,431,543	1,628,438,917,293	1,006,093,514,250	61.78
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,546,685,157	21,715,821,483	(17,169,136,326)	(79.06)
Hibah Yang Belum Disahkan	0	5,824,966	(5,824,966)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	197,392,416	200,409,583	(3,017,167)	(1.51)
Uang Muka dari KPPN	38,136,194	205,713,244	(167,577,050)	(81.46)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,782,213,767	22,127,769,276	(17,345,555,509)	(78.39)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,782,213,767	22,127,769,276	(17,345,555,509)	(78.39)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71

21.

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tgl. Cetak 02/05/2020 7:57 PM
lap_neraca_kl_komparatif--rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH EKUITAS	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,634,532,431,543	1,628,438,917,293	1,006,093,514,250	61.78

2 -

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER
2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	526.895.890	516.260.813
JUMLAH PENDAPATAN		526.895.890	516.260.813
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	161.031.193.376	158.912.926.480
Beban Persediaan	D.3	18.275.935.263	10.360.218.882
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.585.356.306.021	2.364.818.950.150
Beban Pemeliharaan	D.5	17.541.575.727	17.469.818.574
Beban Perjalanan Dinas	D.6	365.843.175.874	314.615.332.977
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	903.122.004.477	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	68.644.464.941	65.496.481.486
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	259.025	107.638
JUMLAH BEBAN		3.119.814.914.704	2.931.673.836.187
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.119.288.018.814)	(2.931.157.575.374)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	1.023.539.644	3.310.578.340
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	461.465.409	49.500.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		562.074.235	3.261.078.340
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	15.958.915.433	1.115.517.022.144
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	14.482.630.961	1.112.403.779.740
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.476.284.472	3.113.242.404
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.038.358.707	6.374.320.744
POS LUAR BIASA	D.14		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.117.249.660.107)	(2.924.783.254.630)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 02/05/20 8:51 AM

Halaman : 1

Frg ID : lap_io_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	526,895,890	516,260,813	10,635,077	2.06
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	526,895,890	516,260,813	10,635,077	2.06
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	526,895,890	516,260,813	10,635,077	2.06
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	161,031,193,376	158,912,926,480	2,118,266,896	1.333
Beban Persediaan	18,275,935,263	10,360,218,882	7,915,716,381	76.405
Beban Barang dan Jasa	1,585,356,306,021	2,364,818,950,150	(779,462,644,129)	(32.961)
Beban Pemeliharaan	17,541,575,727	17,469,818,574	71,757,153	0.411
Beban Perjalanan Dinas	365,843,175,874	314,615,332,977	51,227,842,897	16.283
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	903,122,004,477	0	903,122,004,477	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

2.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 02/05/20 8:51 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	68,644,464,941	65,496,481,486	3,147,983,455	4.806
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259,025	107,638	151,387	140.645
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,119,814,914,704	2,931,673,836,187	188,141,078,517	6.418
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,119,288,018,814)	(2,931,157,575,374)	(188,130,443,440)	6.418
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	562,074,235	3,261,078,340	(2,699,004,105)	(82.764)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,023,539,644	3,310,578,340	(2,287,038,696)	(69.083)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	461,465,409	49,500,000	411,965,409	832.253
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,476,284,472	3,113,242,404	(1,636,957,932)	(52.58)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,958,915,433	1,115,517,022,144	(1,099,558,106,711)	(98.569)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14,482,630,961	1,112,403,779,740	(1,097,921,148,779)	(98.698)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,038,358,707	6,374,320,744	(4,335,962,037)	(68.022)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,117,249,660,107)	(2,924,783,254,630)	(192,466,405,477)	6.581
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,117,249,660,107)	(2,924,783,254,630)	(192,466,405,477)	6.581

th-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	1.606.311.148.017	1.366.285.820.528
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.117.249.660.107)	(2.924.783.254.630)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.733.431.226.092	127.695.483.155
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	127.120.422.226
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	(13.638.230.904)	-
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	1.342.010.649.166	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	407.852.279.839	1.687.230.149
Koreksi Lain-lain	E.3.6	(2.793.472.009)	(1.112.169.220)
JUMLAH		1.733.431.226.092	127.695.483.155
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.407.257.503.774	3.037.113.098.964
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.023.439.069.759)	(240.025.327.489)
EKUITAS AKHIR	E.5	2.629.750.217.776	1.606.311.148.017

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 02/05/20 7:59 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,606,311,148,017	1,366,285,820,528	240,025,327,489	17.568
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,117,249,660,107)	(2,924,783,254,630)	(192,466,405,477)	6.581
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1,733,431,226,092	127,695,483,155	1,605,735,742,937	1,257.4 73
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	127,120,422,226	(127,120,422,226)	(100)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(13,638,230,904)	0	(13,638,230,904)	()
SELISIH REVALUASI ASET	1,342,010,649,166	0	1,342,010,649,166	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	407,852,279,839	1,687,230,149	406,165,049,690	24,072. 89
LAIN-LAIN	(2,793,472,009)	(1,112,169,220)	(1,681,302,789)	151.173
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,407,257,503,774	3,037,113,098,964	(629,855,595,190)	(20.739)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,023,439,069,759	240,025,327,489	783,413,742,270	326.388
EKUITAS AKHIR	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.714

21.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil &
Kebijakan
Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016, Bappenas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan,

- evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
 3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Daerah;
 4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 5. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
 6. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional
 7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
 8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
 9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;
 10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;
 11. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan
 12. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Staf Ahli, Inspektorat Utama, dan Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu, serta Pusat.

Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas :

1. Menteri/Kepala;
2. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
11. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
12. Inspektorat Utama;
13. Staf Ahli;
14. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
15. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
16. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PPN/Bappenas.

*Basis
Akuntansi*

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian PPN/Bappenas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Jasa Giro diakui pada saat terbitnya rekening koran per akhir bulan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja Hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas Negara.

(4) Beban

Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban Hibah diakui pada saat resume tagihan (SP2HL).

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan, mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau

pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	176.117.062.000	176.117.062.000
Belanja Barang	1.221.112.615.000	1.338.435.220.000
Belanja Modal	382.924.220.000	324.707.225.000
Jumlah Belanja	1.780.153.797.000	1.837.259.507.000

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian PPN/Bappenas maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	870.240.000.000	870.240.000.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.250.000.000	10.250.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	899.663.797.000	956.769.507.000
Jumlah	1.780.153.797.000	1.837.259.507.000

Realisasi
Pendapatan
Rp4.895.435.183,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.895.435.183,00, sedangkan estimasi pendapatan adalah sebesar Rp0,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	32.388.888	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	991.150.756	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	135.922.678	-
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	360.047.373	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.638.200	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	30.000.000	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	10.802	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	36.389.578	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.270.441.023	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.445.535	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	350	-
Jumlah	-	4.895.435.183	-

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.388.888	46.100.000	-29,74
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	991.150.756	3.264.478.340	-69,64
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	135.922.678	226.119.490	-39,89
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	360.047.373	360.047.373	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.638.200	94.916.000	-98,27
Pendapatan Denda Lainnya	30.000.000	30.000.000	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri	-	31.429.895	-100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.802	1.184.071	-99,99
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.389.578	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.270.441.023	1.768.745.319	84,90
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	37.445.535	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	350	-	0,00
Jumlah	4.895.435.183	5.823.020.488	-15,93

Eh

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 antara lain berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp1.580.198.695.165,00

Realisasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.580.198.695.165,00 atau mencapai 86 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.837.259.507.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut:

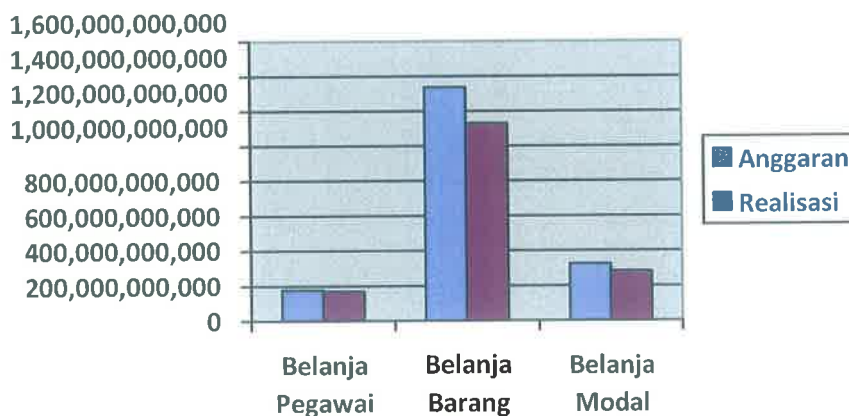
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	176.117.062.000	169.261.882.924	96,11
Belanja Barang	1.336.435.220.000	1.134.821.487.817	84,91
Belanja Modal	324.707.225.000	281.281.390.563	86,63
Total Belanja Kotor	1.837.259.507.000	1.585.364.761.304	86,29
Pengembalian Belanja	-	(5.166.066.139)	-
Jumlah	1.837.259.507.000	1.580.198.695.165	86,01

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019



Realisasi belanja menurut sumber dana/program/kegiatan, eselon1/wilayah/satker, jenis belanja/eselon1/akun dapat dilihat pada lampiran 1.

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	870,240,000,000	732,775,764,564	84.204
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	10,250,000,000	9,968,452,348	97.253
Program Perencanaan Bappenas	956,769,507,000	842,620,544,392	88.07
Total	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	86.29
Pengembalian	-	(5,166,066,139)	-
Jumlah	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	86.01

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
BA 055	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	86.29
Pengembalian	-	(5,166,066,139)	-
Jumlah	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	86.29

Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 37,33 persen dibandingkan per 31 Desember 2018 yaitu Belanja Barang dan yang terjadi kenaikan adalah Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terdapat Penambahan Jumlah Pegawai CPNS.
2. Terdapat Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Gaji dan Tunjangan Kinerja).
3. Terdapat peningkatan penyerapan awal tahun anggaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	169,235,794,623	155,691,045,921	8.70
Belanja Barang	1,129,733,334,979	2,306,280,180,629	(51.01)
Belanja Modal	281,229,565,563	59,356,839,440	373.79
Jumlah	1,580,198,695,165	2,521,328,065,990	(37.33)

Penyerapan anggaran sampai dengan per 31 Desember 2019 telah mencapai Rp1.580.198.695.165,00 atau lebih rendah 37,33 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2018.

Jumlah realisasi belanja tersebut termasuk dari hibah langsung uang yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri Uang yang telah terbit SPHL sebesar Rp41.929.926.053,00 terdiri dari total realisasi belanja Hibah Langsung Luar Negeri Uang Satker Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp12.150.181.267,00 dan Satker MWA-ICCTF sebesar Rp29.779.744.786,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 12 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL)

(dalam rupiah)	
Uraian	Jumlah
Realisasi belanja hibah langsung uang :	
1. Terbit SPHL	41.929.926.053
2. Belum terbit SPHL	-
3. Belum proses SPHL	851.829.176
Jumlah	42.781.755.229

Realisasi belanja hibah langsung uang yang telah terbit SPHL per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.929.926.053,00 berasal dari Satker Bappenas yaitu hibah UNICEF sebesar Rp4.656.686.518,00, Hibah UNFPA sebesar Rp4.193.621.925,00, Hibah READSI sebesar Rp3.299.872.824,00 dan Satker MWA ICCTF yaitu hibah DANIDA sebesar Rp2.480.808.806,00, hibah USAID sebesar Rp7.534.738.695,00 dan hibah DFID-UKCCU sebesar Rp19.764.197.285,00.

Realisasi belanja hibah langsung uang yang belum proses SPHL per 31 Desember 2019 sebesar Rp851.829.176,00 yang merupakan realisasi belanja pada Satker Kementerian PPN/Bappenas (IFAD) Rincian penjelasan dapat dilihat pada lampiran 2.

Dana hibah langsung luar negeri kas tersebut langsung disalurkan oleh Mitra Pembangunan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk membiayai suatu program/kegiatan/proyek tertentu melalui rekening unit pelaksana masing-masing program/kegiatan/proyek di Kementerian PPN/Bappenas. Apabila program/kegiatan/proyek telah selesai (*project closed*) dan masih terdapat sisa dana di rekening, maka dana tersebut disetor kembali ke Mitra Pembangunan.

Akuntabilitas pemanfaatan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk

oleh Mitra Pembangunan berdasarkan perjanjian hibah (*Grant Agreement*).

Mekanisme pencairan hibah langsung luar negeri kas diatur dalam:

1. *General Guidelines* dari Mitra Pembangunan menetapkan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan hibah mengacu kepada *guideline*.
2. MoU Hibah antara Mitra Pembangunan dan Kementerian PPN/Bappenas menetapkan bahwa penyaluran dana hibah langsung ke rekening yang disetujui oleh Mitra Pembangunan, bukan melalui rekening Kas Umum Negara.

Belanja Pegawai
Rp169.235.794.623,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp169.235.794.623,00 dan Rp155.691.045.921,00 atau terjadi kenaikan sebesar 8,70 persen. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai dan kenaikan pangkat/jabatan pegawai.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	64.118.386.479	61.481.872.958	4,29
Belanja Lembur	364.357.000	364.675.000	(0,09)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	104.779.139.445	93.885.870.153	11,60
Total Belanja Pegawai	169.261.882.924	155.732.418.111	8,69
Pengembalian Belanja Pegawai	(26.088.301)	(41.372.190)	(36,94)
Jumlah Belanja	169.235.794.623	155.691.045.921	8,70

Belanja Barang
Rp1.129.733.334.979,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.129.733.334.979,00 dan Rp2.306.280.180.629,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 mengalami penurunan 51,01 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan terjadi penurunan belanja barang pengganti pajak dan belanja jasa.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	46.177.642.935	30.414.014.965	51,83
Belanja Barang Non Operasional	250.689.064.504	235.364.135.105	6,51
Belanja Barang Pengganti Pajak	-	11.639.419.655	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	17.221.563.967	11.911.506.176	44,58
Belanja Jasa	426.555.170.393	1.388.543.087.074	(69,28)
Belanja Pemeliharaan	17.281.445.104	17.722.743.781	(2,49)
Belanja Perjalanan Dinas	335.900.819.048	296.530.909.310	13,28
Belanja Perjalanan Luar Negeri	35.755.458.953	23.683.543.800	50,97
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.099.218.100	283.818.549.219	(98,56)
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah (NonKas)	-	-	-
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.141.104.813	11.109.728.000	(89,73)
Total Belanja Barang	1.134.821.487.817	2.310.737.637.085	(50,89)
Pengembalian Belanja Barang	(5.088.152.838)	(4.457.456.456)	14,15
Jumlah Belanja	1.129.733.334.979	2.306.280.180.629	(51,01)

Belanja Modal
Rp281.229.565.563,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp281.229.565.563,00 dan Rp59.356.839.440,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 373,79 persen dibandingkan per 31 Desember 2018 karena terdapat pembayaran tunggakan belanja modal tahun 2018 dan peningkatan penyerapan awal tahun anggaran.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.861.560.569	49.860.153.910	250,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.720.209.000	6.388.337.000	(57,42)
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	103.699.620.994	3.109.298.530	3.235,15
Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah (Non Kas)	-	-	-
Total Belanja Modal	281.281.390.563	59.357.789.440	373,87
Pengembalian Belanja Modal	(51.825.000)	(950.000)	5.355,26
Jumlah Belanja	281.229.565.563	59.356.839.440	373,79

Belanja Modal
Tanah
Rp0,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp174.861.560.569,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp174.861.560.569,00 dan Rp49.860.153.910,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 250,70 persen dibandingkan per 31 Desember 2018 karena terdapat pembayaran tunggakan belanja modal tahun 2018 dan peningkatan penyerapan awal tahun anggaran.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.584.351.569	49.611.584.710	251,90
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	277.209.000	248.569.200	11,52
Jumlah Belanja Kotor	174.861.560.569	49.860.153.910	250,70
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja	174.861.560.569	49.860.153.910	250,70

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp2.668.384.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.668.384.000,00 dan Rp6.387.387.000,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 58,22 persen dibandingkan 31 Desember 2018 karena terdapat realokasi belanja rehab gedung.

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.720.209.000	6.388.337.000	(57,42)
Jumlah Belanja Kotor	2.720.209.000	6.388.337.000	(57,42)
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(51.825.000)	(950.000)	5.355,26
Jumlah Belanja	2.668.384.000	6.387.387.000	(58,22)

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal Lainnya
Rp103.699.620.994,00

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp103.699.620.994,00 dan Rp3.109.298.530,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.221,72 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2018 disebabkan antara lain karena terdapat pembayaran tunggakan belanja modal tahun 2018 dan peningkatan penyerapan awal tahun anggaran.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	4.345.435.994	2.918.858.530	48,87
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau aset	99.354.185.000	190.440.000	52.070,86
Jumlah Belanja Kotor	103.699.620.994	3.109.298.530	3.235,15
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja	103.699.620.994	3.109.298.530	3.235,15

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp38.136.194,00

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp38.136.194,00 dan Rp205.713.244,00.

Selain itu, terdapat Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan perincian pembagian sebagai berikut :

Tabel 19 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP)

NO	SATKER	PPK	UP KKP (40%)
1	SATKER BAPPENAS	DM I	124.000.000
2		DM II	140.000.000
3		DM III	178.000.000
4		DM IV	80.000.000
5		DM V	50.000.000
6		DM VI	40.000.000
7		03.01 P2A2	108.000.000
8		06.01 PPN I	100.000.000
9		06.02 PPN II	90.000.000
10		06.03 PPN III	90.000.000
11		06.04 PPN IV	98.000.000
12		06.05 PPN V	108.000.000
13		06.06 PPN VI	100.000.000
14		06.07 PPN VII	120.000.000
15		06.08 PPN VIII	78.000.000
16		06.09 PPN IX	110.000.000
17		06.10 PPN X	140.000.000
18		06.11 PPN XI	76.000.000
19		06.12 PPN XII	110.000.000
20		06.14 ICCTF	60.000.000
21	SATKER KNKS	KNKS	200.000.000
22	SATKER ICCTF	ICCTF	200.000.000
23	SATKER MCC	MCC	60.000.000
Total			Rp. 2.480.000.000

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp5.967.367.257,00

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.967.367.257,00 dan Rp26.811.835.914,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	per 31 Desember 2019	per 31 Desember 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.736.498.862	2.779.754.868
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya dari Hibah	4.230.868.395	24.032.081.048
Jumlah	6.967.367.257	26.811.835.916

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.967.367.257,00 merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.736.498.862,00 dan Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp4.230.868.395,00. Rincian atas akun Kas lainnya dari Hibah adalah sebagai berikut:

Pada Satker Bappenas terdapat saldo kas lainnya dari hibah sudah disahkan sebesar Rp5.082.697.571,00 yang berasal dari proyek UNICEF sebesar Rp3.270.395,00 dan Proyek READSI sebesar Rp5.079.427.176,00. Namun terdapat belanja hibah yang belum disahkan sebesar Rp851.829.176,00 yang mengurangi saldo kas hibah sehingga total kas lainnya dari hibah sebesar Rp4.230.868.395.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan pada lampiran 3.

C.3. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di
Muka
Rp43.207.682.176,00

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp43.207.682.176,00 dan Rp28.553.827.881,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Karyasiswa PHRD	38.053.477.967	28.150.127.881
Karyasiswa PHRD Premium	2.079.816.667	-
Karyasiswa Program Coremap	3.074.387.542	-
Karyasiswa Program Linkage UNHAS-Australia	-	403.700.000
Jumlah	43.207.682.176	28.553.827.881

Data belanja dibayar dimuka akan diperbaharui data secara tahunan sesuai aturan yang berlaku.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan pada lampiran 4.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp2.287.530,00*

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.287.530,00 dan Rp224.200,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada lampiran 5.

*Piutang PNB
Rp0,00*

C.5. Piutang PNB

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.516.480,00.

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 6.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp51.805.080,00*

C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp51.805.080,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian TP/TGR disajikan pada lampiran 7.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(259.025,00)*

C.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(259.025,00) dan Rp17.582,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TER			
Lancar	259,025	0.50%	1,295
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	259,025	-	1,295
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259,025	-	1,295

Persediaan
Rp88.524.541.338,00

C.8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp88.524.541.338,00 dan Rp1.003.556.532.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	4,687,466,842	4,886,559,913
Barang untuk Pemeliharaan	186,435,625	151,802,768
Suku Cadang	33,435,914	72,899,760
Pita Cukai, Material & Legas	1,225,000	-
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	8,597,374,045	9,073,215,553
Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat	2,695,169,710	6,004,949,741
Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	46,785,182,927	873,936,694,817
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	24,875,944,149	86,058,368,983
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	442,853,200	20,952,843,800
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	413,650,502
Bahan Baku	713,570	348,587,586
Persediaan Lainnya	235,738,740	1,855,269,325
Jumlah	88,524,541,338	1,003,556,532,748

Saldo akhir tersebut merupakan penggabungan dari Laporan Barang Persediaan 36 (tiga puluh enam) Satuan Kerja, dan khusus untuk Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas menggunakan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh melalui Aplikasi Persediaan dari 20 (dua puluh) Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang (sesuai

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan).

Satuan kerja yang masih memiliki saldo persediaan per 31 Desember 2019 yaitu:

Tabel 24 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja		Saldo
017312	Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas	5,589,431,199
966009	Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation	66,874,209,492
966010	MWA ICCTF	16,015,685,397
220060	Bappeda Bali	173,100
180060	BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1,625,500
160019	BAPPEDA PROP.KAL-TIM	570,000
417951	Komite Nasional Keuangan Syariah	42,846,650
Total		88,524,541,338

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 termasuk persediaan berupa tanah dan bangunan/hewan dan tanaman/peralatan dan mesin/jalan, irigasi dan jaringan/aset lain-lain yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu:

- a. Satuan Kerja MWA ICCTF senilai Rp16.015.685.397,00 (enam belas milyar lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp8.597.374.046,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam rupiah),
 - 2) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 2.695.169.719,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah),
 - 3) Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp4.578.746.691,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dan
 - 4) Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Dalam Proses senilai Rp0,00 (nol rupiah).
 - 5) Suku cadang alat pertanian lainnya dan persediaan lainnya merupakan persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp144.394.941,00.

- b. Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation senilai Rp66.850.310.500,00 (enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) yaitu:
- 1) Peralatan dan mesin untuk diserahkan senilai Rp41.528.513.151,00 (empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah),
 - 2) Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp24.878.944.149,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dan
 - 3) Barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp442.853.200,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- c. Satuan kerja Kementerian PPN/Bappenas senilai peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat Rp677.922.685,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Rincian Persediaan disajikan pada lampiran 8.

Tanah
Rp1.484.443.750.305,00

C.9. Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.484.443.750.305,00 dan Rp180.483.709.805,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	180,483,709,805
Mutasi tambah :	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	1,177,775,324,500
Koreksi Kesalahan input IP	126,184,716,000
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2019	1,484,443,750,305

Mutasi tambah:

1. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

2. Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Rincian Tanah per 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran 9.

Peralatan dan Mesin
Rp
433.773.685.330,00

C.10. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp433.773.685.330,00 dan Rp332.663.047.278,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	332,663,047,278
Mutasi tambah:	
Penambahan Saldo Awal	9,200,000
Pembelian	158,292,662,176
Pengembangan Nilai Aset	300,755,200
Hibah (Masuk)	366,482,577
Reklasifikasi Masuk	1,161,020,160
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4,000
Pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	-
Mutasi kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(203,620,218)
Penghentian aset dari penggunaan	(20,655,656,195)
Reklasifikasi Keluar	(1,161,020,160)
Transfer Keluar	(36,451,538,074)
Hibah (Keluar)	(336,425,155)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(1,786,923)
Penghapusan	(104,565,000)
Aset Ekstrakomptabel	(104,874,336)
Saldo per 31 Desember 2019	433,773,685,330
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(236,258,194,736)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	197,515,490,594

Mutasi tambah:

1. Saldo Awal → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh tahun sebelumnya.
2. Pembelian → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
3. Hibah (masuk) → merupakan transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

4. Pengembangan nilai aset → transaksi pengembangan (rehabilitasi/restorasi) peralatan dan mesin yang menambah nilai buku sebelumnya;
5. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas → merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari perbaikan atas ke salahan Pembukuan berupa nilai.

Mutasi Kurang:

1. Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap → Saldo minus.
2. Penghentian Aset dari Penggunaan → transaksi penghentian aset merupakan transaksi atas peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat dan dalam proses penghapusan dengan cara pemindahtanganan.
3. Transfer Keluar → merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain. Adapun rincian transaksi transfer keluar yaitu Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran 9.

C.11. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp
157.938.995.269,00

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp157.938.995.269,00 dan Rp144.131.361.953,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	144.131.361.953
Mutasi tambah :	
Pembelian	198.392.000
Pengembangan Nilai Aset	2.105.993.023
Selisih Revaluasi Aset Tetap	13.035.719.906
Mutasi kurang :	
Koreksi Kesalahan input IP	(1.131.106.000)
Koreksi Revaluasi	(30.226.000)
Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya	(371.139.613)
Saldo per 31 Desember 2019	157.938.995.269
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	18.822.558.857
Nilai Buku per 31 Desember 2019	139.116.436.412

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan gedung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF,

86-

Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas.

2. Pengembangan Nilai Aset: transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) gedung dan bangunan yang menambah nilai buku sebelumnya.
3. Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

Mutasi kurang:

1. Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp6.020.002.566,00

C.12. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.020.002.566,00 dan Rp6.507.585.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	6.507.585.170
Mutasi tambah :	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	1.622.161.396
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5.057.000
Mutasi kurang :	
Koreksi Kesalahan input IP	(2.109.744.000)
Transaksi Normalisasi BMN	(5.057.000)
Saldo per 31 Desember 2019	6.020.002.566
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	3.121.445.789
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.898.556.777

Mutasi tambah:

1. Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018.

Mutasi kurang:

1. Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

C.13. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp101.395.867.321,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp101.395.867.321,00 dan Rp5.379.109.730,00.

Tabel 29 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	5.379.109.730
Mutasi tambah	
Pembelian	1.568.466.164
Pengembangan nilai aset	94.600.574.942
Mutasi kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(152.283.515)
Saldo per 31 Desember 2019	101.395.867.321

Mutasi tambah:

1. Pembelian : transaksi perolehan aset tetap dalam renovasi berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi. Dan transaksi perolehan aset tetap lainnya berupa Monografi, Lukisan Kanvas, Ukiran Logam dan Sejenisnya, Lukisan Cat Air Serta Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2. Pengembangan Nilai Aset: transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) aset tetap dalam renovasi yang menambah nilai buku sebelumnya berupa rumah dinas Menteri PPN/Bappenas di Jalan Denpasar milik Kementerian Sekretariat Negara dan pekerjaan penataan ruang kerja Kementerian PPN/Bappenas di gedung sewa.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp0,00

C.14. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Tabel 30 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	-
Mutasi Tambah	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Mutasi Kurang	-
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap	-
Saldo per 31 Desember 2019	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019.

Rincian lebih lanjut terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran 9.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(258.202.199.382,00)

C.15. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp258.202.199.382,00 dan Rp257.457.197.160,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Tabel 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.484.443.750.305	-	1.484.443.750.305
2	Peralatan dan Mesin	433.773.885.330	(236.258.194.736)	197.515.690.594
3	Gedung dan Bangunan	157.938.895.259	(18.822.558.857)	139.116.336.402
4	Jalan, Inggas dan Jaringan	6.020.002.566	(3.121.445.789)	2.898.556.777
6	Aset Tetap Lainnya	4.050.945.179	-	4.050.945.179
7	Aset Tetap Renovasi	97.304.922.142	-	97.304.922.142
7	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	2.184.573.385.781	(258.202.199.382)	1.926.370.186.409

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 9.

C.16. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp51.805.080,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing

sebesar Rp51.805.080,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp(259.025,00)

C.17. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(259.025,00) dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	259.025	0,50%	1.295
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	259.025		1.295
Tagihan PPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	259.025		1.295

Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga
Rp490.209.375.000,00

C.18. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375.000,00 dan Rp83.647.500.000,00. Kenaikan nilai tersebut berasal dari hasil revaluasi Tahun 2017/2018 atas aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu PT Bakrie Swasakti Utama untuk pembangunan gedung Wisma Bakrie 2 dengan Perjanjian Bangun Guna Serah/BOT Nomor 4300/SES/09/2004, tanggal 24 September 2004 dengan jangka waktu 2005 - 2029.

Aset Tak Berwujud
Rp55.783.312.439,00

C.19. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp55.783.312.439,00 dan Rp49.586.947.884,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)		
No	Uraian	Nilai Buku
1	Software	46.691.725.067
2	Lisensi	6.091.587.352
	Jumlah	55.783.312.439

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi aset Tak Berwujud pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

Tabel 34 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2018	49.586.947.884
Mutasi tambah	
Koreksi Saldo Awal	12.003.613
Pengembangan Nilai Aset	572.220.000
Pembelian	12.526.976.304
Hibah	270.329.824
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.240.910.000
Pengembangan Melalui KDP	1.100.000.000
Mutasi keluar	
Transfer Keluar	(9.526.075.185)
Saldo per 31 Desember 2019	55.783.312.439
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2019	(35.825.335.474)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	19.957.976.965

Mutasi tambah:

1. Saldo Awal : transaksi perolehan Aset Tak Berwujud yang diperoleh tahun sebelumnya.
2. Pembelian : transaksi perolehan aset tak berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.
3. Hibah (Masuk) : transaksi untuk membukukan perolehan BMN yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Perolehan/Penambahan KDP → perolehan Barang Milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin) sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Mutasi Kurang :

1. Transfer Keluar : transaksi penghapusan aset tak berwujud pada Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation ke Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran 9.

C.20. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud
dalam Pengerjaan
Rp0,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Terdapat mutasi tambah aset tak berwujud dalam pengerjaan Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019.

Tabel 35 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Saldo per 31 Desember 2019	-

Mutasi tambah:

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan.

Rincian per eselon I disajikan pada lampiran 9.

C.21. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp68.180.544.422,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp68.180.544.422,00 dan Rp62.680.178.299,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PPN/Bappenas serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 36 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	68.180.544.422
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
	Jumlah	68.180.544.422

Adapun mutasi aset lainnya yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	62.680.178.299
Mutasi tambah	-
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	20.986.281.104
Mutasi kurang	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(15.472.571.731)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(13.343.250)
Saldo per 31 Desember 2019	68.180.544.422
Akumulasi Penyusutan	(6.977.126.803)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	61.203.417.619

Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya: transaksi reklasifikasi yang disebabkan karena adanya Barang Milik Negara yang rusak berat dan akan diusulkan untuk penghapusan dengan cara pemindahtanganan.

Mutasi kurang:

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola : Transaksi usulan Barang Rusak Berat yang sudah di usulkan penghapusan ke Pengelola Barang.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran 9 dan 10.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp42.802.462.277,00)

C.22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp42.802.462.277,00 dan Rp38.314.958.551,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	49,691,725,087	(33,538,223,962)	16,153,501,125
2	Lisensi	5,091,587,352	(2,287,111,512)	3,804,475,840
	Jumlah	54,783,312,439	(35,825,335,474)	18,957,976,965
B	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	68,180,544,422	(6,977,126,803)	61,203,417,619
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan			
	Jumlah	68,180,544,422	(6,977,126,803)	61,203,417,619
	Total	122,963,856,861	(42,802,462,277)	81,161,394,584

Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 9.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp4.546.685.157,00

C.23. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.546.685.157,00 dan Rp21.715.821.483,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran 11.

Hibah Belum
Disahkan Rp0,00

C.24. Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.824.966,00.

Rincian saldo hibah langsung yang belum disahkan dapat dilihat pada lampiran 3.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp197.392.416,00*

C.25. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp197.392.416,00 dan Rp200.409.583,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada lampiran 12.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp38.136.194,00*

C.26. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp38.136.194,00 dan Rp205.713.244,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp2.629.750.217.776,00*

C.27. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.629.750.217.776,00 dan Rp1.606.311.148.017,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Rp526.895.890,00

Jumlah Pendapatan pada Kementerian PPN/Bappenas untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan adalah masing-masing sebesar Rp526.895.890,00 dan Rp516.260.813,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39 Perbandingan Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	135.423.365	124.906.953	8,42
Pendapatan dan Bangun, Guna dan Serah (BGS)	360.047.373	360.047.373	-
Jumlah Pendapatan dan Pengelolaan BMN	495.470.738	484.954.326	2,17
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.802	1.062.287	(99,00)
Jumlah Pendapatan Jasa	10.802	1.062.287	(99,00)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.414.000	224.200	530,69
Pendapatan Denda Lainnya	30.000.000	30.000.000	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	526.895.540	516.260.813	2,06
Pendapatan Anggaran Lain-lain	350	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
Jumlah	526.895.890	516.260.813	2,06

Pendapatan dari Pengelolaan BMN-LO berasal dari dari sewa gedung koperasi, sewa ruang pelaksanaan ujian TPA.

Tabel 40 Perbandingan PNBP Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Uraian Jenis Pendapatan	PNBP Lainnya-LO (Rp)	PNBP Lainnya-LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan dan Pemindahalangan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	135.423.365	135.922.978	(499.313,00)
Pendapatan dan Bangun, Guna dan Serah (BGS)	360.047.373	360.047.373	-
Jumlah Pendapatan dan Pengelolaan BMN	495.470.738	495.970.051	(499.313,00)
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.802	10.802	-
Jumlah Pendapatan Jasa	10.802	10.802	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.414.000	1.638.200	(224.200,00)
Pendapatan Denda Lainnya	30.000.000	30.000.000	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	526.895.540	527.619.053	(723.513,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	350	350	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	526.895.890	527.619.403	(723.513,00)

Perhitungan selisih nilai dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 41 Selisih nilai PNPB Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

			(Dalam Rupiah)
Saldo PNPB Lainnya - LRA			527.619,403
Penambah			
1. Pengakuan pendapatan operasional Koperasi, Jumlah Balik koreksi, sewa ATM, sewa rumah dinas, sewa u	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	189.531.563	
2. Jurnal balik denda keterlambatan PT. Sumber Berkas Usaha Mandiri TA.2018 PPK P2SPAB (telah dibayar)	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	224.200	
Jumlah Penambah		189.755.763	
Pengurang			
1. Pengakuan pendapatan sewa ATM, kegiatan operasional Koperasi, Piutang sewa rumah dinas, dan jurnal balik sewa ATM dan kegiatan operasional koperasi	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	189.032.250	
Jumlah Pengurang		189.032.250	
Total Tambah/Kurang			723.513
Saldo Beban Perumahan - LO			526.895.890

Beban Pegawai Rp
161,031,193,376,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp161.031.193.376,00 dan Rp.158.912.926.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

				(Dalam Rupiah)
Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %	
Beban Gaji Pokok PNS	43.845.986.960	40.988.314.180	6,97	
Beban Pembulatan Gaji	644.426	561.639	14,74	
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.441.266.508	3.283.471.014	4,81	
Beban Tunjangan Anak PNS	786.536.047	797.022.840	(1,32)	
Beban Tunjangan Struktural	5.857.650.000	5.876.105.000	(0,31)	
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.781.965.000	2.677.940.000	3,88	
Beban Tunjangan PPh PNS	512.164.857	432.443.225	18,44	
Beban Tunjangan Beras PNS	1.921.012.920	1.955.774.520	(1,78)	
Beban Uang Makan PNS	4.365.800.000	4.836.203.000	(9,73)	
Beban Tunjangan Umum	688.590.000	606.880.000	13,45	
Beban Uang Lembur	362.684.050	364.675.000	(0,55)	
Beban Pegawai TK/Kegiatan	96.492.980.909	97.134.908.252	(0,66)	
Jumlah Beban Pegawai	161.057.281.677	158.954.298.670	1,32	
Pengembalian	(26.088.301)	(41.372.190)	(36,94)	
Jumlah	161.031.193.376	158.912.926.480	1,33	

Tabel 43 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	43.845.986.960	43.796.268.560	49.718.400
Beban Pembulatan Gaji	644.426	637.135	7.291
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.441.266.508	3.437.173.628	4.092.880
Beban Tunjangan Anak PNS	786.536.047	785.495.059	1.040.988
Beban Tunjangan Struktural	5.857.650.000	5.848.505.000	9.145.000
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.781.965.000	2.764.405.000	17.560.000
Beban Tunjangan PPh PNS	512.164.857	510.884.177	1.280.680
Beban Tunjangan Beras PNS	1.921.012.920	1.921.012.920	-
Beban Uang Makan PNS	4.365.800.000	4.365.800.000	-
Beban Tunjangan Umum	688.590.000	688.205.000	385.000
Beban Uang Lembur	362.684.050	364.357.000	(1.672.950)
Beban Pegawai TK/Kegiatan	96.492.980.909	104.779.139.445	(8.286.158.536)
Jumlah Beban Pegawai	161.057.281.677	169.261.882.924	(8.204.601.247)
Pengembalian	(26.088.301)	(26.088.301)	-
Jumlah	161.031.193.376	169.235.794.623	(8.204.601.247)

Perhitungan selisih nilai dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Selisih nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

Penambah			
1. Pembayaran kekurangan pembulatan gaji akrual Januari 2020 (Bank BNI Syariah dan Konvensional) dan kekurangan bulan Januari s.d Maret 2019	Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Tunj. Suamistri PNS, Beban Tunj. Anak PNS	54.859.559	
2. Pembayaran kekurangan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural bulan November 2019, akrual Januari 2020 dan kekurangan bulan Januari s.d Maret 2019	Beban Tunj. Struktural PNS, Beban Tunj. Fungsional PNS	27.985.680	
3. Pembayaran kekurangan tunjangan umum akrual Januari 2020 dan kekurangan bulan Januari s.d Maret 2019	Beban Tunjangan Umum PNS	385.000	
4. Tunjangan kinerja Menteri Desember 2019	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.580.706	
5. Akrual Tukin periode 19 s.d 31 Des 2019	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.143.424.346	
6. Jurnal Baik an Putri Saraswati (Koreksi Seharusnya TGR)	Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS	51.805.080	
7. Jurnal Baik Salah Jurnal Tukin Menteri	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.580.706	
Jumlah Penambah		2.367.621.077	
Pengurang			
1. Pengembalian Belanja Pegawai an Putri Saraswati	Beban Gaji Pokok PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS	51.805.080	
2. Jurnal Baik Salah Jurnal Tukin Menteri	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	44.580.706	
3. Jurnal Baik Pembayaran belanja pegawai tahun 2018 dibayarkan tahun 2019	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	10.474.163.588	
4. Pengembalian TAYL 2019		1.572.950	
Jumlah Pengurang		10.572.222.324	
Total Tambah/Kurang			(8.204.601.247)
Saldo Beban Persediaan - LO			161.034.193.376

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp18.275.935.263,00

Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.275.935.263,00 dan Rp10.360.216.882,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)			
Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	16.284.021.065	10.102.604.798	61,19
Beban Persediaan Pita Cukai, Material dan Legas	1.050.000	15.887.300	(93,38)
Beban Persediaan Bahan Baku	351.245.380	4.949.390	8.998,74
Beban Persediaan Lainnya	1.639.618.818	230.787.394	592,41
Jumlah	18.275.935.263	10.360.216.882	76,30

Perhitungan Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)			
Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	16.284.021.065	17.209.870.717	(925.849.652)
Beban Persediaan Pita Cukai, Material, Legas	1.050.000	11.693.250	(10.643.250)
Beban Persediaan Bahan Baku	351.245.380	-	351.245.380
Beban Persediaan Lainnya	1.639.618.818	-	1.639.618.818
Jumlah	18.275.935.263	17.221.563.967	1.054.371.296

Perhitungan selisih nilai dari tabel diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 47 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Beban Persediaan - LRA		17.221.563.967
Penambah		
Pemakaian	Beban Persediaan Konsumsi	187.150.576
Jumlah Penambah		187.150.576
Pengurang		
Pemakaian	Beban Persediaan Konsumsi	16.470.508.791
	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	1.050.000
	Beban Persediaan Bahan Baku	351.245.380
	Beban Persediaan Lainnya	1.639.618.818
Opname Fisik	Beban Persediaan Konsumsi	662.850
SP2D Terbit	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	17.209.870.717
SP2D Terbit	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	11.693.250
Jumlah Pengurang		35.684.649.806
Total Tambah(Kurang)		(35.497.499.230)
Saldo Beban Persediaan - LO		(18.275.935.263)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp1.585.356.306.021,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.585.356.306.021,00 dan Rp2.364.818.950.150,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Perbandingan rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	944.222.347	14.421.710.149	(93,45)
Beban Jasa Pos dan Giro	39.517.120	55.535.998	(28,84)
Beban Jasa Konsultan	1.044.764.439.052	1.926.048.564.646	(45,76)
Beban Jasa Profesi	37.302.182.110	24.284.884.027	53,60
Beban Jasa Lainnya	124.908.390.683	73.309.914.320	70,38
Beban Sewa	87.778.098.327	37.330.403.026	135,14
Beban Air, Listrik, Telepon	7.908.432.075	7.944.874.958	(0,46)
Beban Pengganti Pajak	-	5.632.424.060	(100,00)
Beban Barang Non Operasional	150.056.029.810	158.100.003.016	(5,09)
Beban Honor Output Kegiatan	30.497.403.500	41.137.622.649	(25,86)
Beban Bahan	55.241.816.131	46.128.895.802	19,76
Beban Barang Operasional	10.309.435.452	2.967.219.405	247,44
Beban Honor Operasional	4.552.471.000	4.446.813.000	2,38
Beban Pengiriman Surat Dinas	301.054.882	364.855.249	(17,49)
Beban Keperluan Perkantoran	30.863.796.477	22.635.127.311	36,35
Beban Barang Transito	-	300.000	(100,00)
Beban Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	298.612.555	110.354.220	170,59
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	22.000.000	-	-
Beban Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Beban	1.585.787.901.521	2.364.919.501.836	(32,95)
Pengembalian	(431.595.500)	(100.551.686)	329,23
Jumlah	1.585.356.306.021	2.364.818.950.150	(32,96)

Adapun perbandingan antara saldo Beban Barang dan Jasa pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Langganan Daya dan Jasa	944.222.347	927.859.946	16.362.401,00
Beban Jasa Pos dan Giro	39.517.120	39.517.120	-
Beban Jasa Konsultan	1.044.704.439,052	168.644.607,055	876.119.831,997,00
Beban Jasa Profesi	37.302.182.110	35.852.927.345	1.449.254.765,00
Beban Jasa Lainnya	124.908.390,683	125.360.889,019	(452.498.336,00)
Beban Sewa	87.778.098,327	87.854.197,369	(76.039,041,00)
Beban Air, Listrik, Telepon	7.908.432,075	7.875.232,540	33.199.539,00
Beban Pengganti Pajak	-	-	-
Beban Barang Non Operasional	150.056.029,810	164.902.714,105	(14.846.684,295,00)
Beban Honor Output Kegiatan	30.497.403,500	31.006.810,000	(509.206.500,00)
Beban Bahan	55.241.816,131	54.757.740,399	484.075.732,00
Beban Barang Operasional	10.309.435,452	10.299.536,452	9.900,000,00
Beban Honor Operasional	4.552.471,000	4.552.471,000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas	301.054.882	301.054.882	-
Beban Keperluan Perkantoran	30.863.796,477	31.024.581,601	(160.785.124,00)
Beban Barang Transito	-	-	-
Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	298.612.555	-	298.612.555,00
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	22.000.000	22.000.000	-
Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Beban	1.585.787.901,521	723.421.877,832	862.366.023.689,00
Pengembalian	(431.595.500)	(431.595.500)	-
Jumlah	1.585.356.406,021	722.990.282,339	862.366.023.689,00

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

			(Dalam Rupiah)
Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA			722.990.282.332
Penambah			
1. Belanja Hibah READSI (522119) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Tagihan TV Kabel, Kesalahan MAK, Jurnal balik tagihan bulan Desember 2018 yang sudah dibayarkan TA 2019	Beban Langganan Daya dan Jasa	16.362.401	
2. MPHLBJS terbit, Jurnal balik belanja barang di TA 2018, Salah MAK jasa konsultan data center, SP3 yang belum terbit PPK PPN XI	Beban Jasa Konsultan	876.119.831.997	
3. Jurnal balik Koreksi SPHL Hibah READSI Akun 524119, Belanja Hibah READSI (524119) berdasarkan belanja bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Tunggakan belanja TA 2019	Beban Jasa Profesi	1.449.254.765	
4. Tagihan Telepon , Listrik, Tunggakan belanja TA 2019, Jurnal balik belanja barang di TA 2018	Beban Air, Listrik, Telepon	33.199.535	
5. Tunggakan belanja TA 2019, Koreksi SPHL Hibah READSI Akun 524119, Salah MAK PPN 5 (seharusnya belanja bahan), Salah MAK Peralatan mesin ke belanja bahan, Jurnal balik belanja barang di TA 2018 PPK PPN 6	Beban Bahan	484.075.732	
6. Tunggakan belanja TA 2019 PPK PPN 10, Belanja Hibah READSI (521119) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan)	Beban Barang Operasional	9.900.000	
7. Koreksi aset ekstrakomtabel hibah READSI, Aset ekstrakomtabel Satker Bappenas dan KNKS	Beban Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin	298.612.555	
Jumlah Penambah		878.411.236.985	
Pengurang			
1. Tunggakan belanja TA 2019, Belanja Hibah READSI (521111) berdasarkan belanja bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Proyek READSI IFAD No Register 2KCIY8LA yang belum disahkan	Beban Keperluan Kantor	160.785.124	
2. Pengembalian TAYL 2019, Belanja Hibah READSI (522191) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Jurnal balik belanja barang di TA 2018	Beban Jasa Lainnya	452.498.336	
3. Belanja Hibah READSI (522141) bulan Oktober s.d. Desember 2019 (Belum Disahkan), Jurnal balik kekurangan pembayaran sewa gudang ICCTF, Jurnal balik belanja barang di TA 2018, Tunggakan Belanja TA 2019	Beban Sewa	76.039.041	
4. Koreksi karyasiswa Linkage Premium, Karyasiswa program PHRD IV-Premium tahun 2020, Karyasiswa program PHRD IV-II tahun 2020, Karyasiswa program Coremap tahun 2020, Koreksi karyasiswa Coremap dan PHRD IV, Jurnal balik atas pembayaran karyasiswa program linkage Unhas-Australia multiyears dan PHRD TA 2018	Beban Barang Non Operasional	14.846.684.295	
5. SSBP Bulan Februari 2020, Pengembalian TAYL 2019, Jurnal balik belanja barang di TA 2018	Beban Honor Output Kegiatan	509.206.500	
Jumlah Pengurang		16.045.213.296	
Total Tambah/Kurang			862.356.023.689
Saldo Bahan Persediaan - LO			1.585.356.306.021

Beban Pemeliharaan
Rp17.541.575.727,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.541.575.727,00 dan Rp9.760.589.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.601.273.800	6.077.775.170	(7,84)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.825.645.162	9.479.384.890	14,20
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.290.000	1.642.211.800	(72,52)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	33.752.771	5.994.289	463,08
Beban Pemeliharaan Lainnya	350.000	32.499.940	(98,92)
Beban Persediaan Suku Cadang	59.615.546	13.573.300	339,21
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	569.648.448	536.140.951	6,25
Jumlah Beban	17.541.575.727	17.787.580.340	(1,38)
Pengembalian	-	(317.761.766)	(100,00)
Jumlah	17.541.575.727	17.469.818.574	0,41

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pemeliharaan pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.601.273.800	5.601.273.800	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.825.645.162	11.186.876.533	(361.231.371)
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	8.252.000	(8.252.000)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.290.000	451.290.000	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	33.752.771	33.752.771	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	350.000	-	350.000
Beban Persediaan Suku Cadang	59.615.546	-	59.615.546
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	569.648.448	-	569.648.448
Jumlah Beban	17.541.575.727	17.281.445.104	260.130.623
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	17.541.575.727	17.281.445.104	260.130.623

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Selisih nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Pemeliharaan-LRA		17.281.445.104
Penambah		
Pemakaian	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.097.000
	Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	569.648.448
	Beban Persediaan Suku Cadang	59.615.546
		350.000
Koreksi	Beban Pemeliharaan Lainnya	
Jumlah Penambah		671.710.994
Pengurang		
Pemakaian	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	403.328.371
	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.252.000
Jumlah Pengurang		411.580.371
Total Tambah(Kurang)		260.130.623
Saldo Beban Persediaan - LO		17.541.574.727

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp365,843,175,874,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp365.843.175.874,00 dan Rp314.615.332.977,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	145.240.786.382	121.348.223.772	19,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.143.618.981	3.519.394.410	(10,68)
	81.186.667.460	62.424.882.392	30,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105.383.292.221	108.403.442.382	(2,79)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	19.162.386.130	16.258.224.148	17,86
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	16.382.982.038	6.700.308.877	144,51
Jumlah Beban	370.499.733.212	318.654.475.981	16,27
Pengembalian	(4.656.557.338)	(4.039.143.004)	15,29
Jumlah	365.843.175.874	314.615.332.977	16,28

Adapun perbandingan antara saldo Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	145.240.786.382	145.155.085.921	85.700.461
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.143.618.981	3.127.506.481	16.112.500
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.186.667.460	81.221.007.960	(34.340.500)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105.383.292.221	104.988.403.686	394.888.535
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	19.162.386.130	19.253.199.714	(90.813.584)
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	16.382.982.038	16.502.259.239	(119.277.201)
Jumlah Beban	370.499.733.212	370.247.463.001	252.270.211
Pengembalian	(4.656.557.338)	(4.656.557.338)	-
Jumlah	365.843.175.874	365.590.905.663	252.270.211

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal Belanja Perjalanan Dinas-LRA			366.999.720.663
Penambah			
Tunggakan		304.056.581	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.054.500	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.065.335	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000	
Jurnal Balik	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	211.450.000	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	
Koreksi (Salah MAK)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.812.500	
Jurnal READSI	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.408.815.500	
Jumlah Penambah		2.208.304.416	
Pengurang			
SSBP	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	85.027.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.387.244	
Pengembalian TAYL		456.847.924	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.145.000	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	153.886.001	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.873.040	
Jurnal Koreksi	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.511.496	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	706.000	
Jurnal Balik	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.502.465.500	
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100.000.000	
Jumlah Pengurang		3.364.849.205	
Total Tambah (Kurang)			(1.156.544.789)
Saldo Beban Perjalanan Dinas - LO			365.843.175.874

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp903.122.004.477,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp903.122.004.477,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.906.836.648	-	-
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	4.294.617.114	-	-
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	808.053.874.347	-	-
Beban Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	66.769.607.066	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	21.097.069.302	-	-
Jumlah	903.122.004.477	-	-

Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Barang Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.906.836.648	-	2.906.836.648
Beban Barang Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	4.294.617.114	-	4.294.617.114
Beban Barang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	808.053.874.347	1.120.333.300	806.933.541.047
Beban Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	66.769.607.066	1.141.104.813	65.628.502.253
Beban Barang Fisik Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	2.978.884.800	(2.978.884.800)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	21.097.069.302	-	21.097.069.302
Jumlah	903.122.004.477	5.240.322.913	897.881.681.564

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - LRA			5.240.322.913
Penambah			
1 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.906.836.648	
2 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	4.294.617.114	
3 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	808.053.874.347	
4 Jurnal Otomatis BMN	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	66.769.607.066	
5 Jurnal Otomatis BMN	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	21.097.069.302	
Jumlah Penambah		903.122.004.477	
Pengurang			
1 SP2D terbit nomor 191400507900001 dan	Belanja Peralatan Dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	1.120.333.300	
2 SP2D terbit nomor 190191382022474, 191400507900001, dan 191400507920002	Belanja Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	1.141.104.813	
3 SP2D terbit nomor 191400507900001 dan 191400507920002	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.978.884.800	
Jumlah Pengurang		5.240.322.913	
Total Tambah/Kurang			897.881.681.564
Saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - LO			903.122.004.477

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp68.644.464.941,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.644.464.941,00 dan Rp65.496.481.486,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.234.487.984	51.783.701.729	6,86
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.723.303.038	6.656.171.603	16,03
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	181.345.015	218.072.844	(16,84)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	741.614.013	30.253.103	2.351,37
Jumlah Penyusutan	63.880.760.030	58.688.199.279	8,85
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.763.704.911	6.808.282.207	(30,03)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	4.763.704.911	6.808.282.207	(30,03)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	68.644.464.941	65.496.481.486	4,81

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang
Tak Tertagih
Rp259,025,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp259,025,00 dan Rp107.638,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	-	90.056	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	259.025	-	-
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	17.582	-
Jumlah Penyisihan	259.025	107.638	140,64

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp1.023.539.644,00

Pendapatan pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.023.539.644,00 dan Rp3.310.578.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 62 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	Desember 2019	Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	991.150.756	45.100.000	2.050,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.388.886	3.254.478.340	(3.232.089,452)
Jumlah	1.023.539.642	3.310.578.340	(10.232.087,402,00)

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	991.150.756	991.150.756	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	32.388.888	32.388.888	-
Jumlah	1.023.539.644	1.023.539.644	-

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp461.465.409,00

Beban dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp461.465.409,00 dan Rp49.500.000,00.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp15.958.915.433,00

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp15.958.915.433,00 dan Rp1.115.517.022.144,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36.389.578	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.270.441.023	1.768.745.319	84,90
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	37.445.535	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12.562.834.217	1.113.718.257.718	(98,87)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Negara	51.805.080	30.019.107	72,57
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-	-
Jumlah	15.958.915.433	1.115.517.022.144	98,60

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	36,389,578	36,389,578	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3,270,441,023	3,270,441,023	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	37,445,535	37,445,535	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Rugi Kerugian Negara	51,805,080	-	51,805,080
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12,562,834,217	-	12,562,834,217
Jumlah	18,958,915,433	3,344,276,136	12,614,639,297,00

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 66 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LRA		3,344,276,136
Penambah		
Jurnal Otomatis BMN	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	12,562,834,217
TGR atas nama Putri Saraswati	Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara	51,805,080
Jumlah Penambah		12,614,639,297
Pengurang		
		-
Jumlah Pengurang		-
Total Tambah/Kurang		12,614,639,297
Saldo Beban Persediaan - LO		18,958,915,433

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 14.482.630.961,00

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp14.482.630.961,00 dan Rp1.112.403.779.740,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	14,237,560,823	394,369,316	3,510,21
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	245,070,138	-	-
Jumlah	14,482,630,961	394,369,316	3,510,21

Tabel 68 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	14,237,560,823	-	14,237,560,823,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	245,070,138	-	245,070,138,00
Jumlah	14,482,630,961	-	14,237,560,823,00

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.606.311.148.017,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.606.311.148.017,00 dan Rp1.366.285.820.528,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(3.117.249.660.107,00)

Jumlah (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(3.117.249.660.107,00) dan Rp (2.924.783.254.630,00).

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
Rp1.733.431.226.092,00

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.733.431.226.092,00 dan Rp127.695.483.155,00.

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari :

Tabel 69 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

(Dalam Rupiah)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	Nilai
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi atas Reklasifikasi	(13.638.230.904)
Selisih Revaluasi Aset	1.342.010.649.166
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	407.852.279.839
Koreksi Lain-lain	(2.793.472.009)
Jumlah	1.733.431.226.092

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Selisih Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp127.120.422.226,00.

E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi
(Rp13.638.230.904,00)

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(13.638.230.904,00) dan Rp0,00.

Tabel 70 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi

(Dalam Rupiah)	
Satker	Nilai
MWA ICCTF	(246.607.005)
MCC	13.884.837.909
Jumlah	13.638.230.904

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset
Rp1.342.010.649.166,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018 dan hasil koreksi/perbaikan pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.342.010.649.166,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp407.852.279.839,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp407.852.279.839,00 dan Rp1.687.230.149,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari :

Tabel 71 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Nilai
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.323.834.573
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	406.528.445.266
Jumlah	407.852.279.839

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker terdiri dari :

Tabel 72 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)		
No	Satker	Nilai
1	Bappenas	715.454.673
2	MCC	4.421.497.367
3	Satker Konsolidasi	(3.813.117.467)
Jumlah		1.323.834.573

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per Satker terdiri dari :

Tabel 73 Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Bappenas	(5.690.637)
2	MCC	(27.739.097)
3	Satker Konsolidasi	406.561.875.000
Jumlah		406.528.445.266

Satker Konsolidasi merupakan Satker sementara untuk menampung pembatalan nilai revaluasi Aset sesuai dengan kebijakan nasional.

Koreksi Lain-Lain
Rp
(2.793.472.009,00)

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.793.472.009,00) dan Rp(1.112.169.220,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp
2.407.257.503.774,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.407.257.503.774,00 dan Rp3.037.113.098.964,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

Tabel 74 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	(4.895.435.183)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.538.268.769.112
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(26.154.967.366)
Pengesahan Hibah Langsung	902.016.992.846
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(1.977.855.635)
Jumlah	2.407.257.503.774

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember

2019, DDEL sebesar Rp(4.895.435.183,00) sedangkan DKEL sebesar Rp1.538.268.769.112,00.

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker terdiri dari :

Diterima dari Entitas Lain
(Rp4.895.435.183,00)

Tabel 75 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp1.538.268.769.112,00,00

Uraian	Jumlah
Bappenas	-4.694.714.941
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	-2.385.000
Bappeda Provinsi DIY	-10.802
ICCTF	-299.000
MCC	-198.025.440
Jumlah	(4.895.435.183)

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain(DKEL) per Satker terdiri dari :

Tabel 76 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker

(Dalam Rupiah)	
Satker	Nilai
KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	1.420.090.347.994
Bappeda Provinsi Jawa Tengah	1.128.034.316
Bappeda Provinsi DIY	768.091.550
Bappeda Provinsi Jawa Timur	369.394.549
BAPPEDA PROVINSI ACEH	232.470.217
Bappeda Provinsi Sumatera Utara	879.060.200
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	937.596.887
BAPPEDA PROVINSI RIAU	962.347.965
BAPPEDA PROVINSI JAMBI	910.957.122
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	1.096.247.632
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	1.411.433.795
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	893.712.632
BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	499.612.373
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	715.166.400
BAPPEDA PROP KAL-TIM	979.564.700
Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1.350.857.142
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1.202.685.300
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	492.906.193
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	954.198.312
BAPPEDA PROVINSI MALUKU	1.358.694.281
Bappeda Provinsi Bali	505.629.588
BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	869.826.033
Bappeda Provinsi NTT	1.294.846.190
Bappeda Provinsi Papua	1.252.891.000
Bappeda Provinsi Bengkulu	884.205.017
BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	1.063.585.594
BAPPEDA PROVINSI BANTEN	656.422.100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	843.039.790
Bappeda Provinsi Gorontalo	1.265.641.774
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	911.613.856
Bappeda Provinsi Papua Barat	526.672.717
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1.042.731.643
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.209.430.362
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	56.206.461.993
Pengelola Hibah MCC	14.911.015.936
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	17.591.375.959
Jumlah	1.538.268.769.112

Nilai DKEL sebesar Rp1.538.268.769.112,00 berasal dari seluruh transaksi yang telah terbit SP2D dikurangi pengembaliannya (SSPB). Sedangkan nilai DDEL sebesar Rp(4.895.435.183,00) merupakan seluruh setoran penerimaan ke Bendahara Umum Negara melalui setoran SSPB.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp0,00 / Transfer
Keluar Rp
(26.154.967.366,00)

Transfer masuk/transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(26.154.967.366,00).

Rincian Transfer Masuk/Transfer Keluar diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 77 Rincian Transfer Masuk per Satker

(Dalam Rupiah)	
Satker	Nilai
Jumlah	-

Tabel 78 Rincian Transfer Keluar per Satker

Satker	Nilai
MCC	(25.720.272.430)
Bappenas	(434.694.936)
Jumlah	(26.154.967.366)

Nilai Transfer Keluar sebesar (Rp26.154.967.366,00) merupakan :

1. Alih status dari Satker Bappenas kepada BLU (Universitas Kuala Syiah dan Universitas Brawijaya)
2. Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan
Hibah
Langsung
Rp902.016.992.846,00

Pengesahan
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp
(1.977.855.635,00)

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp902.016.992.846,00 sedangkan untuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(1.977.855.635,00).

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut.

Tabel 79 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
Bappenas	896.044.609.337
ICCTF	5.972.383.509
Jumlah	902.016.992.846

Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 80 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
Bappenas	(1.977.855.635)
Jumlah	(1.977.855.635)

Ekuitas Akhir Rp
2.629.750.217.776,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.629.750.217.776,00 dan Rp1.366.285.820.528,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Kejadian –
Kejadian Penting
Setelah Tanggal
Neraca*

F.1. Rekening Pemerintah

Dalam penyelenggaraan Bagian Anggaran 055, satuan kerja pusat/KP memiliki 4 rekening bendahara pengeluaran dan 20 rekening bendahara pengeluaran pembantu yang digunakan dan dipertahankan sedangkan pada satuan kerja Dekonsentrasi/DK memiliki 32 rekening bendahara pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan. Rincian rekening pemerintah sebagaimana tersaji pada lampiran 14.

Selain tersebut diatas, berdasarkan hasil rekonsiliasi rekening dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian PPN/Bappenas dalam BA 055 juga memiliki 7 rekening lainnya dari Satker Bappenas dan Satker MWA ICCTF. Rincian rekening lainnya sebagaimana tersaji pada lampiran 15.

*Pengungkapan
Lain-lain*

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Selain data keuangan yang telah diungkapkan diatas, terdapat beberapa informasi terkait data keuangan dan non keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2019 Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019 disusun berbasis akrual dan menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan bulan Desember tahun 2019 melakukan 4 (empat) kali revisi DIPA dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Realokasi kegiatan dari Direktorat;
 - b. Realokasi anggaran Tunjangan Kinerja;
 - c. Penambahan hibah
 - d. Realokasi anggaran ke seluruh Direktorat
3. Rekomendasi atas Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2018 masih dalam proses tindak lanjut sebagaimana terlampir dalam lampiran 21.

4. Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan *Stunting* DIPA Bappenas

Tabel 81 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan *Stunting* DIPA Bappenas

No (a)	Program/Kegiatan/Output (b)		Pagu (c)	Realisasi (d)	% (e)
055 01 06	2937	Program Perencanaan Pembangunan Nasional			
		Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
		608 Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan			
		Komp. 640 Koordinasi Strategis Gerakan dan Percepatan Perbaikan Gizi	845	779,93	92%
		D. Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	13.684	6.210	45%

Beberapa capaian utama kegiatan antara lain: (a) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PG di tingkat K/L tahun 2018 dan semester 1 tahun 2019; (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG di tingkat daerah (regional barat serta tengah dan timur); (c) pendampingan penyusunan RAD-PG di daerah; (d) penyusunan ringkasan output K/L TA 2019 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*; (e) penentuan lokasi fokus prioritas percepatan penurunan *stunting* tahun 2019 dan 2020; (f) penyusunan Rancangan Perpres Percepatan Penurunan *Stunting*; (g) rewiu penajaman intervensi sensitif penurunan *stunting*; (h) penyusunan modul pelatihan aksi integrasi intervensi penurunan *stunting*; (i) pengembangan dashboard monitoring program percepatan penurunan *stunting*; (j) rencana pengembangan sistem penandaan tematik *stunting* pada KRISNA; (k) pemutakhiran Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Petunjuk Teknis Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota; (l) rewiu kinerja anggaran dan pembangunan semester 1 program percepatan penurunan *stunting*; (m) pendampingan dan bimbingan teknis ke daerah untuk pelaksanaan aksi integrasi; (n) penyusunan kriteria praktik baik intervensi penurunan *stunting*; (o) workshop pemanfaatan DAK tematik *stunting*; (p) analisis data *stunting* dan determinannya; dan (q)

- pemetaan penelitian terkait *stunting*; dan (r) Scaling Up Nutrition (SUN) Indonesia Annual Meeting 2019.
5. Penyerapan anggaran bersumber dari hibah INEY di bawah 50 persen karena proses revisi DIPA untuk memasukkan komponen hibah INEY baru terbit pada bulan Maret 2019 sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, proses pengadaan Administrative Service Firm (ASF) dan tenaga ahli/konsultan di bawah pengelolaan ASF juga memerlukan waktu. Firma ASF baru terkontrak per 31 Juli 2019 dan baru 5 (lima) dari 14 posisi tenaga ahli/konsultan yang sudah terkontrak per Oktober 2019 yaitu Tenaga Ahli Dokumentasi Praktik Baik, Tenaga Ahli Kebijakan Gizi, Tenaga Analis Sistem, Tenaga Analis Data, dan Tenaga Asisten Penelitian dan Pengembangan. Hal ini juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 belum optimal.
 6. Terdapat Tuntutan Hukum kepada Bappenas yang tercantum dalam Nomor Perkara : 318.PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang pokok gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum (PMH) oleh penyelenggaraan negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999. Penggugat Terguga adalah Masyarakat Maluku-Maluku Utara yang diwakili oleh Syamsuri Launa sedangkan pihak tergugat adalah :
 - a. Presiden RI (Tergugat 1/T1);
 - b. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Tergugat 2/T2);
 - c. Menteri Sosial (Tergugat 3/T3);
 - d. Gubernur Maluku (Tergugat 4/T4);
 - e. Gubernur Maluku Utara (Tergugat 5/T5);
 - f. Gubernur Sulawesi Tenggara (Tergugat 6/T6);
 - g. Menteri Keuangan (Tergugat 7/T7);
 - h. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Tergugat 8/T8);
 - i. Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (Tergugat 9/T9);
 - j. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Tergugat 10/T10);
 - k. Menteri Koordinator Perekonomian (Tergugat 11/T11).

Status gugatan bersifat Inkracht yang bernilai materiil sebesar RP. 110.744.438.640.000.

Potensi pengeluaran Negara bernilai Rp 3.994.523.616.000 (Rp 3.944.514.500.000 + Rp 6.116.000 + Rp 500.000 + Rp 2.500.000).

Amar Putusan antara lain Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X:

- a. Menteri Sosial Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Republik Indonesia,
- b. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Dahulu Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal),
- c. Gubernur Maluku Utara,
- d. Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
- e. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
- f. Menteri Keuangan Republik Indonesia,
- g. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,
- h. Gubernur Provinsi Maluku,
- i. Gubernur Sulawesi Tenggara,
- j. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam), tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Per 31 Desember 2019 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47, yaitu Program Compact dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sedang dalam proses persetujuan presiden senilai Rp580.108.270.754 (lima ratus delapan puluh triliun seratus

delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu).

- b. Sedang dalam proses serah terima dan penghapusan senilai Rp19.825.611.160 (sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh).

- 8. Terdapat Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 13 yang berlokasi di Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa SHP No. 07 seluas 12.000 m2 yang telah dilakukan revaluasi pada bulan Januari 2020 dan menghasilkan LPK 001/1/1MKN.07/KNL.01/01.00/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang menghasilkan nilai wajar baru yaitu sebesar Rp58.011.750.000,00. Sehingga terdapat koreksi nilai wajar sebesar Rp57.006.925.635,00 yang belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (*Audited*).

LAMPIRAN PENDUKUNG

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 18/04/20 4:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	39,120,714,000	43,920,714,000	43,796,268,560	3,862,800	43,792,405,760	99.72	128,308,240
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	583,000	1,583,000	637,135	55,201	581,934	40.25	1,001,066
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,178,631,000	3,463,631,000	3,437,173,628	0	3,437,173,628	99.24	26,457,372
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	767,306,000	792,306,000	785,495,059	0	785,495,059	99.14	6,810,941
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	8,768,410,000	6,568,410,000	5,848,505,000	3,240,000	5,845,265,000	89.04	723,145,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2,419,200,000	2,819,200,000	2,764,405,000	14,100,000	2,750,305,000	98.06	68,895,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,188,020,000	713,020,000	510,884,177	0	510,884,177	71.65	202,135,823
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,017,691,000	2,017,691,000	1,921,012,920	0	1,921,012,920	95.21	96,678,080
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,264,720,000	5,728,720,000	4,365,800,000	314,250	4,365,485,750	76.21	1,363,234,250
511129	Belanja Uang Makan PNS	986,573,000	986,573,000	688,205,000	2,960,000	685,245,000	69.76	301,328,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	64,711,848,000	67,011,848,000	64,118,386,479	24,532,251	64,093,854,228	95.68	2,917,993,772
5122	Belanja Lembur	1,500,000,000	1,500,000,000	364,357,000	683,050	363,673,950	24.29	1,136,326,050
512211	Belanja Uang Lembur	1,500,000,000	1,500,000,000	364,357,000	683,050	363,673,950	24.29	1,136,326,050
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio	109,905,214,000	107,605,214,000	104,779,139,445	873,000	104,778,266,445	97.37	2,826,947,555
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	109,905,214,000	107,605,214,000	104,779,139,445	873,000	104,778,266,445	97.37	2,826,947,555
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	176,117,062,000	176,117,062,000	169,261,882,924	26,088,301	169,235,794,623	96.11	6,881,267,377
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	24,912,333,000	32,683,526,000	31,024,581,601	0	31,024,581,601	94.92	1,658,944,399
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	331,500,000	479,500,000	301,054,882	0	301,054,882	62.79	178,445,118
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,578,697,000	4,723,470,000	4,552,471,000	0	4,552,471,000	96.38	170,999,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,734,227,000	21,716,439,000	10,299,535,452	0	10,299,535,452	47.43	11,416,903,548
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,556,757,000	59,602,935,000	46,177,642,935	0	46,177,642,935	77.48	13,425,292,065
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional	51,059,925,000	65,827,858,000	54,757,740,399	6,901,750	54,750,838,649	83.18	11,077,019,351
521211	Belanja Bahan	61,001,588,000	37,317,789,000	31,006,610,000	405,438,750	30,601,171,250	83.09	6,716,617,750
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	30,000,000	22,000,000	0	22,000,000	73.33	8,000,000
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN	193,064,043,000	177,849,297,000	164,902,714,105	1,430,000	164,901,284,105	92.72	12,948,012,895
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	305,125,556,000	281,024,944,000	250,689,064,504	413,770,500	250,275,294,004	89.21	30,749,649,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5218	Belanja Barang Persediaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 18/04/20 4:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,184,346,000	19,486,814,000	17,209,870,717	0	17,209,870,717	88.32	2,276,943,283
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	13,793,000	19,715,000	11,893,250	0	11,893,250	59.31	8,021,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	18,198,139,000	19,506,529,000	17,221,563,967	0	17,221,563,967	88.29	2,284,965,033
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	6,758,400,000	9,274,716,000	6,201,543,172	0	6,201,543,172	66.87	3,073,172,828
522112	Belanja Langganan Telepon	1,580,200,000	2,047,063,000	941,597,224	0	941,597,224	46	1,105,465,776
522113	Belanja Langganan Air	834,600,000	1,011,844,000	732,092,144	0	732,092,144	72.35	279,751,856
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	971,200,000	1,057,333,000	927,859,946	0	927,859,946	87.75	129,473,054
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	22,190,000	47,332,000	39,517,120	0	39,517,120	83.49	7,814,880
522131	Belanja Jasa Konsultan	193,352,756,000	192,751,929,000	168,644,607,055	0	168,644,607,055	87.49	24,107,321,945
522141	Belanja Jasa Sewa	146,364,259,000	105,394,067,000	87,854,137,368	0	87,854,137,368	83.37	17,529,929,632
522151	Belanja Jasa Profesi	47,154,967,000	44,573,997,000	35,852,927,345	17,825,000	35,835,102,345	80.43	8,738,894,655
522191	Belanja Jasa Lainnya	101,773,085,000	140,473,212,000	125,360,889,019	0	125,360,889,019	89.24	15,112,322,981
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	498,811,657,000	496,621,493,000	426,555,170,393	17,825,000	426,537,345,393	85.89	70,084,147,607
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,582,347,000	16,940,347,000	5,601,273,800	0	5,601,273,800	33.06	11,339,073,200
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,456,000	34,776,000	8,252,000	0	8,252,000	23.73	26,524,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	334,250,000	0	0	0	0	0	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,330,224,000	16,519,534,000	11,186,876,533	0	11,186,876,533	67.72	5,332,657,467
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus	126,000,000	123,000,000	33,752,771	0	33,752,771	27.44	89,247,229
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,297,000	451,290,000	451,290,000	0	451,290,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	35,462,574,000	34,076,147,000	17,281,445,104	0	17,281,445,104	50.71	16,794,701,896
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	140,398,939,000	163,398,403,000	145,155,085,921	1,818,986,368	143,336,099,553	88.84	20,062,303,447
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,982,719,000	4,664,738,000	3,127,506,481	406,878	3,127,099,603	67.05	1,537,638,397
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	87,103,896,000	99,879,093,000	81,221,007,960	139,970,371	81,081,037,589	81.32	18,798,055,411
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60,513,885,000	128,284,128,000	106,397,218,686	1,821,814,320	104,575,404,366	82.94	23,708,723,634
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	294,999,439,000	396,226,362,000	335,900,819,048	3,781,177,937	332,119,641,111	84.77	64,106,720,889
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	28,852,212,000	23,420,193,000	19,253,199,714	572,955,820	18,680,243,894	82.21	4,739,949,106
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	7,106,181,000	20,716,293,000	16,502,259,239	302,423,581	16,199,835,658	79.66	4,516,457,342
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	35,958,393,000	44,136,486,000	35,755,458,953	875,379,401	34,880,079,552	81.01	9,256,406,448
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	0	1,120,334,000	1,120,333,300	0	1,120,333,300	100	700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 18/04/20 4:06 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	0	2,978,884,800	2,978,884,800	0	2,978,884,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	0	4,099,219,000	4,099,218,100	0	4,099,218,100	100	900
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	1,141,105,000	1,141,104,813	0	1,141,104,813	100	187
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	1,141,105,000	1,141,104,813	0	1,141,104,813	100	187
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	1,336,435,220,000	1,134,821,487,817	5,088,152,838	1,129,733,334,979	84.91	206,701,885,021
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246,496,043,000	210,621,914,000	174,584,351,569	0	174,584,351,569	82.89	36,037,562,431
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	923,164,000	392,243,000	277,209,000	0	277,209,000	70.67	115,034,000
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	247,419,207,000	211,014,157,000	174,861,560,569	0	174,861,560,569	82.87	36,152,596,431
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130,388,204,000	3,868,700,000	2,720,209,000	51,825,000	2,668,384,000	70.31	1,200,316,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	130,388,204,000	3,868,700,000	2,720,209,000	51,825,000	2,668,384,000	70.31	1,200,316,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331							
5361	Belanja Modal Lainnya	4,918,809,000	5,669,043,000	4,345,435,994	0	4,345,435,994	76.65	1,323,607,006
536111	Belanja Modal Lainnya	133,000,000	104,090,325,000	99,354,185,000	0	99,354,185,000	95.45	4,736,140,000
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	5,051,809,000	108,759,368,000	103,699,620,994	0	103,699,620,994	94.48	6,059,747,006
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	382,924,220,000	324,707,225,000	281,281,390,563	51,825,000	281,229,565,563	86.63	43,477,659,437
	JUMLAH BELANJA	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:07 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl -rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	12,900,000,000	19,094,016,000	18,611,732,990	25,139,964	18,586,593,026	97.34	507,422,974
2911	Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	3,000,000,000	3,162,800,000	3,037,172,309	4,032,500	3,033,139,809	95.9	129,660,191
2912	Pembinaan dan Pelayanan Hukum	5,000,000,000	5,000,000,000	4,146,120,329	12,577,500	4,133,542,829	82.67	866,457,171
2913	Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	21,700,000,000	21,700,000,000	19,478,274,281	425,617,239	19,052,657,042	87.8	2,647,342,958
2914	Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	440,329,066,000	422,301,856,000	354,837,329,732	738,735,211	354,098,594,521	83.85	68,203,261,479
2915	Pelayanan Umum dan Keuangan	9,610,000,000	13,020,000,000	8,637,083,828	37,411,117	8,599,672,711	66.05	4,420,327,289
2916	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	75,876,000,000	90,144,684,000	69,432,396,977	894,404,093	68,537,992,884	76.03	21,606,691,116
2918	Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	0	0	0	1,275,000	-1,275,000	0	1,275,000
2935	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	301,824,934,000	295,816,644,000	254,178,087,294	50,550,000	254,127,537,294	85.91	41,689,106,706
2946	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	870,240,000,000	870,240,000,000	732,358,197,740	2,189,742,624	730,168,455,116	84.156	140,071,544,884
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01							
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas							
2920	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	8,050,000,000	7,200,000,000	6,942,254,467	140,396,218	6,801,858,249	94.47	398,141,751
2921	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	2,200,000,000	3,050,000,000	3,026,197,881	29,332,994	2,996,864,887	98.26	53,135,113
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03							
		10,250,000,000	10,250,000,000	9,968,452,348	169,729,212	9,798,723,136	97.253	451,276,864
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2922	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	7,000,000,000	6,510,327,000	5,963,777,850	30,493,825	5,933,284,025	91.14	577,042,975
2923	Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	12,505,679,000	11,879,777,000	9,216,389,892	33,425,000	9,182,964,892	77.3	2,696,812,108
2925	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	3,975,000,000	3,975,000,000	3,838,788,726	8,646,833	3,830,141,893	96.36	144,858,107

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:07 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl-rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2926	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	13,000,000,000	12,617,800,000	12,138,217,424	2,372,272	12,135,845,152	96.18	481,954,848
2927	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	22,000,000,000	21,340,000,000	20,810,588,580	80,643,222	20,729,945,358	97.14	610,054,642
2928	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	26,500,000,000	25,705,000,000	19,797,815,364	57,132,874	19,740,682,490	76.8	5,964,317,510
2929	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	5,000,000,000	5,000,000,000	4,334,027,798	1,371,600	4,332,656,198	86.65	667,343,802
2930	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	5,200,000,000	4,214,000,000	4,013,824,983	953,900	4,012,871,083	95.23	201,128,917
2931	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	81,193,406,000	73,973,406,000	60,173,585,216	169,548,779	60,004,036,437	170.5	13,969,369,563
2932	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	8,850,000,000	8,850,000,000	7,632,784,460	172,789,306	7,459,995,154	84.29	1,390,004,846
2933	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	5,500,000,000	5,115,258,000	4,900,383,528	3,757,563	4,896,625,965	95.73	218,632,035
2934	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	10,800,000,000	9,396,302,000	9,248,298,545	13,401,904	9,234,896,641	98.28	161,405,359
2935	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	19,500,000,000	16,965,546,000	13,841,694,572	50,366,271	13,791,328,301	81.29	3,174,217,699
2936	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	7,346,300,000	6,832,405,000	6,223,486,288	66,603,141	6,156,883,147	90.11	675,521,853
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	6,600,000,000	6,138,310,000	5,753,582,100	32,755,138	5,720,826,962	93.2	417,483,038
2938	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	4,450,000,000	4,168,000,000	3,553,000,360	4,593,000	3,548,407,360	85.13	619,592,640
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	24,500,000,000	22,429,160,000	22,348,301,369	9,845,200	22,338,456,169	198.56	90,703,831
2940	Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	7,700,000,000	7,700,000,000	6,673,648,044	23,948,571	6,649,699,473	86.36	1,050,300,527
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	11,000,000,000	9,570,308,000	8,471,920,677	118,480,100	8,353,440,577	87.28	1,216,867,423
2942	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	3,945,000,000	3,595,000,000	3,138,151,001	97,404,332	3,040,746,669	84.58	554,253,331
2943	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	3,900,000,000	3,900,000,000	3,741,584,611	950,000	3,740,634,611	95.91	159,365,389
2944	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	5,180,000,000	4,920,744,000	4,904,788,297	0	4,904,788,297	99.68	15,955,703
2945	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	3,962,000,000	3,763,704,000	3,418,514,569	6,405,570	3,412,108,999	90.66	351,595,001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:07 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	12,509,230,000	11,019,380,000	10,619,467,225	25,137,503	10,594,329,722	96.14	425,050,278
2948	Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	50,000,000,000	55,500,000,000	41,439,235,945	179,288,980	41,259,946,965	74.34	14,240,053,035
2949	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	15,900,000,000	10,600,000,000	8,416,418,390	22,988,532	8,393,429,858	79.18	2,206,570,142
2950	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	6,500,000,000	5,705,000,000	4,906,804,590	14,224,700	4,892,579,890	85.76	812,420,110
2951	Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	3,400,487,000	3,230,295,000	2,957,192,490	4,459,275	2,952,733,215	91.41	277,561,785
2952	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	8,200,000,000	7,850,000,000	7,031,242,990	12,423,334	7,018,819,656	89.41	831,180,344
2953	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	7,800,000,000	7,740,000,000	6,861,519,987	11,451,234	6,850,068,753	88.5	889,931,247
2954	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	4,649,825,000	4,069,825,000	3,861,526,655	2,850,000	3,858,676,655	94.81	211,148,345
2956	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	3,750,000,000	3,750,000,000	3,634,471,740	0	3,634,471,740	96.92	115,528,260
2957	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	5,250,000,000	5,250,000,000	5,169,527,573	0	5,169,527,573	98.47	80,472,427
2958	Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	19,300,000,000	12,760,000,000	10,547,624,692	145,389,842	10,402,234,850	81.52	2,357,765,150
2959	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	6,550,000,000	5,698,684,000	5,650,777,265	32,491,600	5,618,285,665	98.59	80,398,335
2960	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	4,800,000,000	4,800,000,000	4,640,726,173	21,075,100	4,619,651,073	96.24	180,348,927
2961	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	3,900,000,000	3,680,000,000	3,437,718,628	0	3,437,718,628	93.42	242,281,372
2962	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	15,500,000,000	14,900,150,000	13,800,084,123	36,590,318	13,763,493,805	92.37	1,136,656,195
5203	Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	7,500,000,000	15,290,000,000	14,958,161,836	47,145,900	14,911,015,936	97.52	378,984,064
5215	Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	5,541,657,000	5,541,657,000	5,463,484,508	0	5,463,484,508	98.59	78,172,492
5216	Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	11,715,542,000	11,129,188,000	9,781,235,734	32,308,152	9,748,927,582	87.6	1,380,260,418
5217	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	3,500,000,000	3,321,150,000	3,239,818,038	29,212,140	3,210,605,898	96.67	110,544,102
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	135,240,948,000	170,719,560,000	153,732,035,375	483,613,222	153,248,422,153	2908.13	17,471,137,847

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:07 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl -rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	67,378,475,000	58,333,904,000	50,980,016,687	607,178,449	50,372,838,238	86.35	7,961,065,762
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	698,493,549,000	699,448,840,000	615,266,244,898	2,693,716,682	612,572,528,216	87.964	86,876,311,784
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,578,983,549,000	1,579,938,840,000	1,357,592,894,986	5,053,188,518	1,352,539,706,468	85.927	227,399,133,532
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengaliran dan Irigasi	13,076,937,000	10,597,949,000	5,437,187,049	5,066,300	5,432,120,749	51.26	5,165,828,251
2953	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	4,750,000,000	5,344,450,000	4,002,100,000	0	4,002,100,000	74.88	1,342,350,000
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	145,824,623,000	145,824,623,000	136,718,732,818	0	136,718,732,818	93.76	9,105,890,182
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	163,651,580,000	161,767,022,000	146,158,019,867	5,066,300	146,152,953,567	90.351	15,614,068,433
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	163,651,580,000	161,767,022,000	146,158,019,867	5,066,300	146,152,953,567	90.351	15,614,068,433
03	RUPIAH MURNI PENDAMPING							
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	33,318,688,000	33,318,688,000	29,064,987,862	0	29,064,987,862	87.23	4,253,700,138
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	33,318,688,000	33,318,688,000	29,064,987,862	0	29,064,987,862	87.233	4,253,700,138
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	33,318,688,000	33,318,688,000	29,064,987,862	0	29,064,987,862	87.233	4,253,700,138
09	HIBAH LUAR NEGERI							
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2923	Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	0	938,695,000	396,650,000	50,610,300	346,039,700	36.86	592,655,300
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	0	13,684,732,000	6,210,271,685	53,069,021	6,157,202,664	44.99	7,527,529,336
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	0	300,000,000	148,324,400	0	148,324,400	49.44	151,675,600

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:07 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl-rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	4,000,000,000	4,000,000,000	3,863,686,451	4,132,000	3,859,554,451	96.49	140,445,549
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	4,000,000,000	18,923,427,000	10,618,932,536	107,811,321	10,511,121,215	56.115	8,412,305,785
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	4,000,000,000	18,923,427,000	10,618,932,536	107,811,321	10,511,121,215	56.115	8,412,305,785
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas							
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	0	0	417,566,824	0	417,566,824	0	-417,566,824
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	417,566,824	0	417,566,824		-417,566,824
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2936	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	0	4,500,966,000	4,193,621,925	0	4,193,621,925	93.17	307,344,075
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	0	5,730,933,000	4,656,686,518	0	4,656,686,518	81.26	1,074,246,482
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	200,000,000	29,779,758,000	29,779,744,786	0	29,779,744,786	100	13,214
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	0	3,299,873,000	2,882,306,000	0	2,882,306,000	87.35	417,567,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	200,000,000	43,311,530,000	41,512,359,229	0	41,512,359,229	95.846	1,799,170,771
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	200,000,000	43,311,530,000	41,929,926,053	0	41,929,926,053	96.81	1,381,603,947
	JUMLAH	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 18/04/20 4:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL							
51	BELANJA PEGAWAI	176,117,062,000	176,117,062,000	169,261,882,924	26,088,301	169,235,794,623	96.09	6,881,267,377
52	BELANJA BARANG	1,221,112,515,000	1,336,435,220,000	1,134,821,487,817	5,088,152,838	1,129,733,334,979	84.53	206,701,885,021
53	BELANJA MODAL	382,924,220,000	324,707,225,000	281,281,390,563	51,825,000	281,229,565,563	86.61	43,477,659,437
	JUMLAH BELANJA (01) KEMENTERIAN PERENCANAAN	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835
	JUMLAH BELANJA	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 17/04/20 5:06 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satter DK Provinsi Gorontalo	1,340,483,000	1,340,483,000	1,265,641,774	0	1,265,641,774	94.42	74,841,226
310060	Bappeda Provinsi Gorontalo	1,340,483,000	1,340,483,000	1,265,641,774	0	1,265,641,774	94.42	74,841,226
055010100KP	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satter DK Provinsi Gorontalo							
017312	BA(055) ES1(01) DKI JAKARTA	1,647,240,376,000	1,671,655,064,000	1,437,142,600,443	4,902,071,182	1,432,240,529,261	85.68	239,414,534,739
966010	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	19,000,000,000	47,549,758,000	47,372,690,945	1,570,200	47,371,120,745	99.62	178,637,255
	Majelis Wali Amanat Dana Penilaian Perubahan Iklim Indonesia/KCTF							
	JUMLAH BELANJA BA(055) ES1(01) DKI JAKARTA	1,666,240,376,000	1,719,204,822,000	1,484,515,291,388	4,903,641,382	1,479,611,650,006	86.35	239,593,171,994
055010800	BA(055) ES1(01) SUMATERA BARAT	958,891,000	958,891,000	937,596,887	0	937,596,887	97.78	21,294,113
080019	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	958,891,000	958,891,000	937,596,887	0	937,596,887	97.78	21,294,113
055012600	JUMLAH BELANJA BA(055) ES1(01) SUMATERA BARAT							
260070	BA(055) ES1(01) BENGKULU	940,291,000	940,291,000	884,205,017	0	884,205,017	94.04	56,085,983
	Bappeda Provinsi Bengkulu	940,291,000	940,291,000	884,205,017	0	884,205,017	94.04	56,085,983
	JUMLAH BELANJA BA(055) ES1(01) BENGKULU							
055012900	BA(055) ES1(01) BANTEN	823,291,000	823,291,000	656,422,100	0	656,422,100	79.73	166,868,900
290009	BAPPEDA PROVINSI BANTEN	823,291,000	823,291,000	656,422,100	0	656,422,100	79.73	166,868,900
	JUMLAH BELANJA BA(055) ES1(01) BANTEN							
055013400	BA(055) ES1(01) SULAWESI BARAT	1,066,291,000	1,066,291,000	1,044,641,643	1,910,000	1,042,731,643	97.79	23,559,357
340030	Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1,066,291,000	1,066,291,000	1,044,641,643	1,910,000	1,042,731,643	97.97	23,559,357
	JUMLAH BELANJA BA(055) ES1(01) SULAWESI BARAT							
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
030060	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	1,144,613,000	1,144,613,000	1,128,034,316	0	1,128,034,316	98.55	16,578,684
040069	Bappeda Provinsi DIY	920,491,000	920,491,000	768,091,550	0	768,091,550	83.44	152,399,450
050060	Bappeda Provinsi Jawa Timur	471,645,000	471,645,000	369,394,549	0	369,394,549	78.32	102,250,451
060004	BAPPEDA PROVINSI ACEH	522,645,000	522,645,000	232,470,217	0	232,470,217	44.48	290,174,783
070060	Bappeda Provinsi Sumatera Utara	1,006,891,000	1,006,891,000	879,260,200	200,000	879,060,200	87.3	127,830,800
090020	BAPPEDA PROVINSI RIAU	962,491,000	962,491,000	962,347,965	0	962,347,965	99.99	143,035
100086	BAPPEDA PROVINSI JAMBI	931,291,000	931,291,000	910,957,122	0	910,957,122	97.82	20,333,878
110060	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	1,100,613,000	1,100,613,000	1,096,247,632	0	1,096,247,632	99.6	4,365,368
120022	BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	1,411,434,000	1,411,434,000	1,411,433,795	0	1,411,433,795	100	205
130019	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	949,291,000	949,291,000	893,712,632	0	893,712,632	94.15	55,578,368
140018	BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	672,483,000	672,483,000	499,612,373	0	499,612,373	74.29	172,870,627
150060	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	961,291,000	961,291,000	715,166,400	0	715,166,400	74.4	246,124,600

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 17/04/20 5:06 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl -

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
160019	BAPPEDA PROP. KAL-TIM	1,006,291,000	1,006,291,000	979,564,700	0	979,564,700	97.34	26,726,300
170021	Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1,354,491,000	1,354,491,000	1,350,857,142	0	1,350,857,142	99.73	3,633,858
180060	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1,355,091,000	1,355,091,000	1,202,685,300	0	1,202,685,300	88.75	152,405,700
190060	Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	504,045,000	504,045,000	492,906,193	0	492,906,193	97.79	11,138,807
200019	Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	1,027,891,000	1,027,891,000	954,198,312	0	954,198,312	92.83	73,692,688
210019	BAPPEDA PROVINSI MALUKU	1,427,101,000	1,427,101,000	1,367,843,163	9,148,882	1,358,694,281	95.21	68,406,719
220060	Bappeda Provinsi Bali	976,291,000	976,291,000	505,629,588	0	505,629,588	51.79	470,661,412
230020	BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	974,491,000	974,491,000	869,826,033	0	869,826,033	89.26	104,664,967
240026	Bappeda Provinsi NTT	1,303,291,000	1,303,291,000	1,302,117,940	7,271,750	1,294,846,190	99.35	8,444,810
250060	Bappeda Provinsi Papua	1,252,891,000	1,252,891,000	1,252,891,000	0	1,252,891,000	100	0
280016	BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	1,167,091,000	1,167,091,000	1,063,585,594	0	1,063,585,594	91.13	103,505,406
300092	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	913,291,000	913,291,000	843,039,790	0	843,039,790	92.31	70,251,210
320099	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0	955,291,000	911,613,856	0	911,613,856	95.43	43,677,144
330096	Bappeda Provinsi Papua Barat	1,260,448,000	1,260,448,000	526,672,717	0	526,672,717	41.78	733,775,283
417761	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1,006,291,000	1,352,264,000	1,242,187,308	32,756,946	1,209,430,362	89.44	142,833,638
417951	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	75,000,000,000	69,750,000,000	56,370,453,272	163,991,279	56,206,461,993	80.58	13,543,538,007
966009	Pengelola Hibah MCC	7,500,000,000	15,290,000,000	14,958,161,836	47,145,900	14,911,015,936	97.52	378,984,064
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	108,784,174,000	112,925,438,000	96,060,962,495	260,514,757	95,800,447,738	85.07	17,124,990,262
	JUMLAH BELANJA 01	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835
	JUMLAH BELANJA	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:15 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_bel_fsf_kl-rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas							
2911	Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan	12,900,000,000	19,094,016,000	18,611,732,990	25,139,964	18,586,593,026	97.34	507,422,974
2912	Pembinaan dan Pelayanan Hukum	3,000,000,000	3,162,800,000	3,037,172,309	4,032,500	3,033,139,809	95.9	129,660,191
2913	Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana	5,000,000,000	5,000,000,000	4,146,120,329	12,577,500	4,133,542,829	82.67	866,457,171
2914	Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian	21,700,000,000	21,700,000,000	19,478,274,281	425,617,239	19,052,657,042	87.8	2,647,342,958
2915	Pelayanan Umum dan Keuangan	440,329,066,000	422,301,856,000	354,837,329,732	738,735,211	354,098,594,521	83.85	68,203,261,479
2916	Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	9,610,000,000	13,020,000,000	8,637,083,828	37,411,117	8,599,672,711	66.05	4,420,327,289
2918	Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan	75,876,000,000	90,144,694,000	69,432,396,977	894,404,093	68,537,992,884	76.03	21,606,691,116
2935	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	0	0	0	1,275,000	-1,275,000	0	1,275,000
2946	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional	301,824,934,000	295,816,644,000	254,178,087,294	50,550,000	254,127,537,294	85.91	41,689,106,706
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	870,240,000,000	870,240,000,000	732,358,197,740	2,189,742,624	730,168,455,116	84.156	140,071,544,884
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas							
2920	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum	8,050,000,000	7,200,000,000	6,942,254,467	140,396,218	6,801,858,249	94.47	398,141,751
2921	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan	2,200,000,000	3,050,000,000	3,026,197,881	29,332,994	2,996,864,887	98.26	53,135,113
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03	10,250,000,000	10,250,000,000	9,968,452,348	169,729,212	9,798,723,136	97.253	451,276,864
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2922	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan dan Agama	7,000,000,000	6,510,327,000	5,963,777,850	30,493,825	5,933,284,025	91.14	577,042,975
2923	Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	12,505,679,000	11,879,777,000	9,216,389,892	33,425,000	9,182,964,892	77.3	2,696,812,108
2925	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara	3,975,000,000	3,975,000,000	3,838,788,726	8,646,833	3,830,141,893	96.36	144,858,107

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:15 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_bel_fsf_kl -rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2926	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Energi, Telekomunikasi dan Informatika	13,000,000,000	12,617,800,000	12,138,217,424	2,372,272	12,135,845,152	96.18	481,954,848
2927	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah	22,000,000,000	21,340,000,000	20,810,588,580	80,643,222	20,729,945,358	97.14	610,054,642
2928	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral	26,500,000,000	25,705,000,000	19,797,815,364	57,132,874	19,740,682,490	76.8	5,964,317,510
2929	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi	5,000,000,000	5,000,000,000	4,334,027,798	1,371,600	4,332,656,198	86.65	667,343,802
2930	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	5,200,000,000	4,214,000,000	4,013,824,983	953,900	4,012,871,083	95.23	201,128,917
2931	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN	81,193,406,000	73,973,406,000	60,173,585,216	169,548,779	60,004,036,437	81.12	13,969,369,563
2932	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan	8,850,000,000	8,850,000,000	7,632,784,460	172,789,306	7,459,995,154	84.29	1,390,004,846
2933	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	5,500,000,000	5,115,258,000	4,900,383,528	3,757,563	4,896,625,965	95.73	218,632,035
2934	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air	10,800,000,000	9,396,302,000	9,248,298,545	13,401,904	9,234,896,641	98.28	161,405,359
2935	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan	19,500,000,000	16,965,546,000	13,841,694,572	50,366,271	13,791,328,301	81.29	3,174,217,699
2936	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	7,346,300,000	6,832,405,000	6,223,486,288	66,603,141	6,156,883,147	90.11	675,521,853
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	6,600,000,000	6,138,310,000	5,753,582,100	32,755,138	5,720,826,962	93.2	417,483,038
2938	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter	4,450,000,000	4,168,000,000	3,553,000,360	4,593,000	3,548,407,360	85.13	619,592,640
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	24,500,000,000	22,429,160,000	22,348,301,369	9,845,200	22,338,456,169	99.6	90,703,831
2940	Perencanaan Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Otonomi Daerah	7,700,000,000	7,700,000,000	6,673,648,044	23,948,571	6,649,699,473	86.36	1,050,300,527
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	11,000,000,000	9,570,308,000	8,471,920,677	118,480,100	8,353,440,577	87.28	1,216,867,423
2942	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi	3,945,000,000	3,595,000,000	3,138,151,001	97,404,332	3,040,746,669	84.58	554,253,331
2943	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial	3,900,000,000	3,900,000,000	3,741,584,611	950,000	3,740,634,611	95.91	159,365,389
2944	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Bilateral	5,180,000,000	4,920,744,000	4,904,788,297	0	4,904,788,297	99.68	15,955,703
2945	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Luar Negeri Multilateral	3,962,000,000	3,763,704,000	3,418,514,569	6,405,570	3,412,108,999	90.66	351,595,001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:15 AM

Halaman : 3

Prig ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	12,509,230,000	11,019,380,000	10,619,467,225	25,137,503	10,594,329,722	96.14	425,050,278
2948	Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun	50,000,000,000	55,500,000,000	41,439,235,945	179,288,980	41,259,946,965	74.34	14,240,053,035
2949	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Wilayah dan Kawasan	15,900,000,000	10,600,000,000	8,416,418,390	22,988,532	8,393,429,858	79.18	2,206,570,142
2950	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional	6,500,000,000	5,705,000,000	4,906,804,590	14,224,700	4,892,579,890	85.76	812,420,110
2951	Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan Pembangunan	3,400,487,000	3,230,295,000	2,957,192,490	4,459,275	2,952,733,215	91.41	277,561,785
2952	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	8,200,000,000	7,850,000,000	7,031,242,990	12,423,334	7,018,819,656	89.41	831,180,344
2953	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	7,800,000,000	7,740,000,000	6,861,519,987	11,451,234	6,850,068,753	88.5	889,931,247
2954	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial	4,649,825,000	4,069,825,000	3,861,526,655	2,850,000	3,858,676,655	94.81	211,148,345
2956	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan	3,750,000,000	3,750,000,000	3,634,471,740	0	3,634,471,740	96.92	115,528,260
2957	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi	5,250,000,000	5,250,000,000	5,169,527,573	0	5,169,527,573	98.47	80,472,427
2958	Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	19,300,000,000	12,760,000,000	10,547,624,692	145,389,842	10,402,234,850	81.52	2,357,765,150
2959	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	6,550,000,000	5,698,694,000	5,650,777,265	32,491,600	5,618,285,665	98.59	80,398,335
2960	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Pertanahan	4,800,000,000	4,800,000,000	4,640,726,173	21,075,100	4,619,651,073	96.24	180,348,927
2961	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	3,900,000,000	3,680,000,000	3,437,718,628	0	3,437,718,628	93.42	242,281,372
2962	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi	15,500,000,000	14,900,150,000	13,800,084,123	36,590,318	13,763,493,805	92.37	1,136,656,195
5203	Pengelolaan Hibah MCC Indonesia	7,500,000,000	15,290,000,000	14,958,161,836	47,145,900	14,911,015,936	97.52	378,984,064
5215	Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	5,541,657,000	5,541,657,000	5,463,484,508	0	5,463,484,508	98.59	78,172,492
5216	Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendidikan Pembangunan	11,715,542,000	11,129,188,000	9,781,235,734	32,308,152	9,748,927,582	87.6	1,380,260,418
5217	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan	3,500,000,000	3,321,150,000	3,239,818,038	29,212,140	3,210,605,898	96.67	110,544,102
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	135,240,948,000	170,719,560,000	153,732,035,375	483,613,222	153,248,422,153	89.77	17,471,137,847

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:15 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap_bel_isf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	67,378,475,000	58,333,904,000	50,980,016,687	607,178,449	50,372,838,238	86.35	7,961,065,762
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	698,493,549,000	699,448,840,000	615,266,244,898	2,693,716,682	612,572,528,216	87.964	86,876,311,784
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,578,983,549,000	1,579,938,840,000	1,357,592,894,986	5,053,188,518	1,352,539,706,468	85.927	227,399,133,532
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi	13,076,937,000	10,597,949,000	5,437,187,049	5,066,300	5,432,120,749	51.26	5,165,828,251
2953	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman	4,750,000,000	5,344,450,000	4,002,100,000	0	4,002,100,000	74.88	1,342,350,000
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	145,824,623,000	145,824,623,000	136,718,732,818	0	136,718,732,818	93.76	9,105,890,182
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	163,651,560,000	161,767,022,000	146,158,019,867	5,066,300	146,152,953,567	90.351	15,614,068,433
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	163,651,560,000	161,767,022,000	146,158,019,867	5,066,300	146,152,953,567	90.351	15,614,068,433
03	RUPIAH MURNI PENDAMPING							
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
5847	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	33,318,688,000	33,318,688,000	29,064,987,862	0	29,064,987,862	87.23	4,253,700,138
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	33,318,688,000	33,318,688,000	29,064,987,862	0	29,064,987,862	87.233	4,253,700,138
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	33,318,688,000	33,318,688,000	29,064,987,862	0	29,064,987,862	87.233	4,253,700,138
09	HIBAH LUAR NEGERI							
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2923	Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	0	938,695,000	396,650,000	50,610,300	346,039,700	36.86	592,655,300
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	0	13,684,732,000	6,210,271,685	53,069,021	6,157,202,664	44.99	7,527,529,336
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	0	300,000,000	148,324,400	0	148,324,400	49.44	151,675,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 18/04/20 4:15 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap_bel_fsf_kl-rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2947	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengaliran dan Irigasi	4,000,000,000	4,000,000,000	3,863,686,451	4,132,000	3,859,554,451	96.49	140,445,549
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	4,000,000,000	18,923,427,000	10,618,932,536	107,811,321	10,511,121,215	56.115	8,412,305,785
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	4,000,000,000	18,923,427,000	10,618,932,536	107,811,321	10,511,121,215	56.115	8,412,305,785
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas							
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	0	0	417,566,824	0	417,566,824	0	-417,566,824
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	0	0	417,566,824	0	417,566,824		-417,566,824
06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional							
2936	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	0	4,500,966,000	4,193,621,925	0	4,193,621,925	93.17	307,344,075
2937	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat	0	5,730,933,000	4,656,686,518	0	4,656,686,518	81.26	1,074,246,482
2939	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup	200,000,000	29,779,758,000	29,779,744,786	0	29,779,744,786	100	13,214
2941	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian	0	3,299,873,000	2,882,306,000	0	2,882,306,000	87.35	417,567,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	200,000,000	43,311,530,000	41,512,359,229	0	41,512,359,229	95.846	1,799,170,771
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	200,000,000	43,311,530,000	41,929,926,053	0	41,929,926,053	96.81	1,381,603,947
	JUMLAH	1,780,153,797,000	1,837,259,507,000	1,585,364,761,304	5,166,066,139	1,580,198,695,165	86.29	257,060,811,835

Daftar Penerimaan Hibah Langsung

REKAPITULASI DATA PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA
MUTU LANGSUNG UANG
PERIODE 5/10 DESEMBER 2019[illegible]

REKAPITULASI DATA PENERIMAAN DAN REALISASI BELANJA
HIBAH LANGSUNG UANG
PERIODE 5/D DESEMBER 2019

[illegible]

Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas

DAFTAR KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	5.943.328.761
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	-
3	MWA ICCTF	-
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	24.023.496
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
24	Bappeda Propinsi Maluku	-
25	Bappeda Propinsi Bali	-
26	Bappeda Propinsi NTB	-
27	Bappeda Propinsi NTT	-
28	Bappeda Propinsi Papua	-
29	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
30	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
31	Bappeda Propinsi Banten	-
32	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
33	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
34	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
35	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
36	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
37	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
	Jumlah	5.967.352.257

RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas		Jumlah	
- Pengembalian Belanja TAYL Bulan Januari 2020	1.055.193.905	1.712.460.366	
- Pengembalian Belanja TAYL Bulan Februari 2020	225.050.846		
- Pengembalian Belanja TAYL Bulan Maret 2020	100.887.244		
- Pengembalian Belanja BBM Januari - Desember 2019 (523121)	331.328.371		
- Pengembalian Belanja Gaji dan Pegawai TAYL an. Putri Saraswati			
- Saldo Kas Hibah Langsung		4.230.868.395	
Saldo kas hibah langsung yang telah disahkan	5.082.697.571		
Kas hibah langsung belum disahkan	(851.829.176)		
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker Kantor Meneg PPN/Bappenas			5.943.328.761
Satker Komite Nasional Keuangan Syariah			
- Pengembalian Belanja TAYL		24.023.496	
Pengembalian Belanja yang belum disetorkan per 31 Desember 2019	6.511.496		
Pengembalian Belanja TAYL Bulan Februari 2020	17.512.000		
- Saldo Kas Hibah Langsung			
Saldo kas hibah langsung yang telah disahkan	-		
Kas hibah langsung belum disahkan	-		
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker Komite Nasional Keuangan Syariah			24.023.496
Satker MWA ICCTF			
- Saldo Kas Hibah Langsung		-	
Saldo kas hibah langsung yang telah disahkan	-		
Kas hibah langsung belum disahkan	-		
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker MWA ICCTF			-
Total Kas Lainnya dan Setara Kas			5.967.352.257

TAYL Bulan Februari 2020

NO	MAK	PPK	NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KLU/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTPN	KODE AKUN	SETORAN PER AKUN (Rp)	JUMLAH
1	521213	P2A2	BPP PPN VII	04/02/2020	055/01/017312	820200203845821	5200090000990	D98701JNEPH9405T	425912	637.500	
2	521213	P2A2	BPP PPN III	04/02/2020	055/01/017312	820200203846713	5200090000990	258243CIEEM1U11P	425912	637.500	
3	521213	P2A2	BPP PPN IX	04/02/2020	055/01/017312	820200203846106	5200090000990	F9CA261QTUD750EQ	425912	5.950.000	
4	521213	DM III	BPP PPK DM III	04/02/2020	055/01/017312	820200204977116	5200090000990	D786261QTUD87GUS	425912	21.250.000	
5	521213	DM III	BPP PPK DM III	04/02/2020	055/01/017312	820200204978053	5200090000990	C6BC73CIEEM30HS5	425912	26.775.000	
6	521213	DM III	BPP PPK DM III	05/02/2020	055/01/017312	820200205102725	5200090000990	52E5355DE3QRUBK5	425912	1.360.000	
7	521213	DM III	BPP PPK DM III	05/02/2020	055/01/017312	820200205083918	5200090000990	309E17QLTJ114P8E	425912	475.000	500
8	521213	P2A2	BPP DM I	06/02/2020	055/01/017312	820200206275185	5200090000990	7334855DE3QT24JH	425912		
9	521213	DM III	BPP PPK DM III	06/02/2020	055/01/017312	820200206292842	5200090000990	B29EE2G4UK3NRLRA	425912	475.000	
10	521213	PPN VIII	bpp08	06/02/2020	055/01/017312	820200206298264	5200080000990	705AA48VU98GLR4O	425912	340.000	
11	521213	PPN VIII	bpp08	07/02/2020	055/01/017312	820200206261172	5255210000990	F6A7A2G4UK3NQMTK	425912	2.465.000	
12	521213	PPN I	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPN I	07/02/2020	055/01/017312	820200206284193	5200090000990	68FF23CIEEM48DD1	425912	1.275.000	
13	521213	DM III	BPP PPK DM III	10/02/2020	055/01/017312	820200207396316	5200090000990	F88ED61QTUDAHBES	425912	1.425.000	
14	521213	PPN III	Tejaningsih	10/02/2020	055/01/017312	820200207375308	5255210000990	1EC0E7QLTJ13AMUC	425912	850.000	
15	521213	DM III	Bendahara Pengeluaran Pembantu DM III	10/02/2020	055/01/017312	820200210482261	5200090000990	4A2781JNEPHEH2L	425912	5.100.000	
16	521213	PPN II	BPP	10/02/2020	055/01/017312	820200207332506	5200090000990	3CA4A361QTUDAFD4Q	425912	2.125.000	
17	521213	PPN II	BPP	10/02/2020	055/01/017312	820200207333502	5200090000990	AE5322G4UK3ORE3U	425912	712.500	
18	521213	PPN II	BPP	10/02/2020	055/01/017312	820200207334730	5200090000990	C6FF70N9UUV01FAA	425912	712.500	
19	521213	PPN II	BPP	10/02/2020	055/01/017312	820200207332719	5200090000990	B8B6B8N3DE4FMDBF	425912	1.062.500	
20	521213	PPN II	Pengembalian Honor Tim	10/02/2020	055/01/017312	820200210533723	5255210000990	961743CIEEMBA3AR	425912	9.690.000	
21	521213	PPN III	Tejaningsih	10/02/2020	055/01/017312	820200210567564	5200090000990	AA48748VU98KO4CC	425912	4.462.500	
22	521213	PPN VI	BPP PPK PPN VI	13/02/2020	055/01/017312	820200212811272	5255210000990	324262G4UK3U2JG8	425912	4.845.000	
23	521213	PPN V	Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas	13/02/2020	055/01/017312	820200212810459	5255210000990	7A8328N3DE4KTMIR	425912	1.912.500	
24	521213	PPN V	Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas	13/02/2020	055/01/017312	820200212810762	5255210000990	6F7AA2G4UK3U2J0A	425912	1.062.500	
25	521213	PPN V	Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas	13/02/2020	055/01/017312	820200212809465	5255210000990	1ED4E55DE3R39HNP	425912	1.912.500	
26	521213	PPN V	Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas	13/02/2020	055/01/017312	820200212810658	5255210000990	40C287QLTJ18GIT2	425912	637.500	
27	521213	PPN V	Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas	13/02/2020	055/01/017312	820200212809920	5255210000990	24D7EON9UUV58160	425912	1.275.000	
28	521213	PPN V	Bendahara Pengeluaran Anggaran Bappenas	13/02/2020	055/01/017312	820200212810290	5255210000990	B4A310N9UUV581HI	425912	1.785.000	
29	521213	PPN I	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPN I	14/02/2020	055/01/017312	820200211693811	5200090000990	255ED1JNEPHGJG7J	425912	4.462.500	
30	521213	PPN I	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPN I	14/02/2020	055/01/017312	820200211694768	5200090000990	188E57QLTJ17EH5G	425912	4.987.500	
31	521213	DM III	BPP PPK DM III	14/02/2020	055/01/017312	820200212715232	5200090000990	292B42G4UK3TVLNO	425912	237.500	
32	521213	PPN4	Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK PPN IV	14/02/2020	055/01/017312	820200214003793	5200090000990	3197C3CIEEMBK02H	425912	7.225.000	
33	521213	P2A2	BPP P2A2	15/02/2020	055/01/017312	820200214993795	5200090000990	4C80955DE3R5C6S3	425912	850.000	
34	521213	PPN9	Bendahara Pengeluaran Pembantu IX	18/02/2020	055/01/017312	820200217150078	5200090000990	627807QLTJICL03U	425912	1.275.000	
35	521213	PPN9	Bendahara Pengeluaran Pembantu IX	18/02/2020	055/01/017312	820200217148290	5200090000990	4ED70N9UUV9CUS2	425912	6.630.000	
36	521213	PPN9	Bendahara Pengeluaran Pembantu IX	18/02/2020	055/01/017312	820200217147957	5200090000990	DE9436U8DP007UHL	425912	3.570.000	

[illegible]

PENGEMBALIAN BBM BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2019

No	Satker	Bulan	Jumlah
1	Satker Bappenas	November 2019	293.693.095
2		Desember 2019	37.635.276
Total			331.328.371

RINCIAN BELANJA PEGAWAI AN PUTRI SARASWATI

No	MAK	Bulan	Keterangan	Jumlah	
1	511111	Januari	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.273.600	
		Februari	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.273.600	
		Maret	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.273.600	
		April	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum- Potongan Lain	2.805.020	
		Mei	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	5.207.550	
		Juni	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	5.207.550	
		Juli	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.463.050	
		Agustus	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.463.050	
		September	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.463.050	
		Oktober	Gaji Pokok - Potongan IWP dan Taperum	2.463.050	
					29.893.120
2	511124	Januari	Tunjangan Fungsional	325.000	
		Februari	Tunjangan Fungsional	325.000	
		Maret	Tunjangan Fungsional	325.000	
		April	Tunjangan Fungsional	325.000	
		Mei	Tunjangan Fungsional	650.000	
		Juni	Tunjangan Fungsional	650.000	
		Juli	Tunjangan Fungsional	325.000	
		Agustus	Tunjangan Fungsional	325.000	
		September	Tunjangan Fungsional	325.000	
		Oktober	Tunjangan Fungsional	325.000	
					3.900.000
3	511119	Januari	Tunjangan Pembulatan	80	
		Februari	Tunjangan Pembulatan	80	
		Maret	Tunjangan Pembulatan	80	
		April	Tunjangan Pembulatan	60	
		Mei	Tunjangan Pembulatan	30	
		Juni	Tunjangan Pembulatan	30	
		Juli	Tunjangan Pembulatan	30	
		Agustus	Tunjangan Pembulatan	30	
		September	Tunjangan Pembulatan	30	
		Oktober	Tunjangan Pembulatan	30	
					480
4	511126	Januari	Tunjangan Beras	72.420	
		Februari	Tunjangan Beras	72.420	
		Maret	Tunjangan Beras	72.420	
		April	Tunjangan Beras	72.420	
		Mei	Tunjangan Beras	72.420	
		Juni	Tunjangan Beras	72.420	
		Juli	Tunjangan Beras	72.420	
		Agustus	Tunjangan Beras	72.420	
		September	Tunjangan Beras	72.420	
		Oktober	Tunjangan Beras	72.420	
					724.200
5	512411	20 Jan-19 Feb	Tunjangan Kinerja	3.047.520	
		20 Feb- 19 Mar	Tunjangan Kinerja	3.047.520	
		20 Mar- 19 Apr	Tunjangan Kinerja	3.047.520	
		20 Apr- 19 Mei	Tunjangan Kinerja	3.047.520	
		TK THR	Tunjangan Kinerja	5.097.200	
					17.287.280
TOTAL					51.805.080

RINCIAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS DARI HIBAH LANGSUNG
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERIODE S/D DESEMBER 2019

No.	Nama Proyek / Register	Saldo Akhir/Saldo Hibah yg disahkan	Penerimaan yang Belum Disahkan	Kas Lainnya Setara Kas dari Hibah
1	2			
A	Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas			
1	Kerjasama RI (Bappenas) - UNICEF 71539501	3.270.395	0	3.270.395
2	Dir. KPP - UNFPA Bappenas 71509501	0	0	0
3	READSI - IFAD 191SRJYA	5.079.427.176	0	5.079.427.176
	Sub Total A	5.082.697.571	0	5.082.697.571
B	Satker MWA ICCTF			
1	Dukungan Environmental Support Programme Phase III (ESP3) kepada Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) - DANIDA 2JCK3X5Q	-	-	0
2	USAID Support for Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) 25LYR55M	-	0	0
3	Forest and Peatland to Reduce Emission through Local Actions - The Government of United Kingdom of the Great Britain and Northern Ireland acting through the Department for International (DFID) - UKCCU 2MFFVJHA	-	0	0
	Sub Total B	-	-	-
	TOTAL	5.082.697.571	-	5.082.697.571

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	43.207.682.176
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	-
3	MWA ICCTF	-
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	-
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
24	Bappeda Propinsi Maluku	-
25	Bappeda Propinsi Bali	-
26	Bappeda Propinsi NTB	-
27	Bappeda Propinsi NTT	-
28	Bappeda Propinsi Papua	-
29	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
30	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
31	Bappeda Propinsi Banten	-
32	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
33	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
34	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
35	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
36	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
37	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
	Jumlah	43.207.682.176

BELANJA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No	PPK	Transaksi	Penyedia Jasa	MAK	Nilai	Keterangan
1	PPN X	Karyasiswa PHRD		521219	38.053.477.967	
		Karyasiswa PHRD IV - Premium		521219	2.079.816.667	
		Karyasiswa Program Coremap		521219	3.074.387.542	
	Total				43.207.682.176	

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	-
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	-
3	MWA ICCTF	2.287.530
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	-
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
24	Bappeda Propinsi Maluku	-
25	Bappeda Propinsi Bali	-
26	Bappeda Propinsi NTB	-
27	Bappeda Propinsi NTT	-
28	Bappeda Propinsi Papua	-
29	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
30	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
31	Bappeda Propinsi Banten	-
32	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
33	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
34	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
35	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
36	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
37	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
	Jumlah	2.287.530

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA PER 31 DESEMBER 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	NAMA	PERUNTUKAN	Total Pendapatan	Pembayaran	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
				NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6
1	Satker ICCTF	SSBP Pengembalian Jasa Giro Hibah USAID TA 2015 yang ada temuan auditor tahun 2019 dibayarkan di TA 2020	2.287.530		2.287.530
	TOTAL		2.287.530	-	2.287.530

Daftar Piutang Bukan Pajak

DAFTAR PIUTANG BUKAN PAJAK

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	-
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	-
3	MWA ICCTF	-
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	-
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
24	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
25	Bappeda Propinsi Maluku	-
26	Bappeda Propinsi Bali	-
27	Bappeda Propinsi NTB	-
28	Bappeda Propinsi NTT	-
29	Bappeda Propinsi Papua	-
30	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
31	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
32	Bappeda Propinsi Banten	-
33	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
34	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
35	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
36	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
37	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
	Jumlah	-

DAFTAR PIUTANG SEWA RUMAH DINAS PER 31 DESEMBER 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	NAMA & ALAMAT YANG BERTUTANG	Sewa Per Bulan	Piutang Sewa PER 31 DES 2018 (Saldo Awal)		Pembayaran Tunggakan Sewa S.D 30 SEPTEMBER 2019		Saldo Pembayaran Tunggakan Sewa		Sewa Per 31 Desember 2019		Pembayaran Sewa Per 31 Desember 2019		Tunggakan Sewa Per 31 Desember 2019		Piutang Sewa Per 31 Desember 2019 (Saldo Akhir)	
			BULAN	NILAI	BULAN	NILAI	BULAN	NILAI	BULAN	NILAI	BULAN	NILAI	BULAN	NILAI	BULAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8=4-6	9=5-7	10	11	12	13	14=10-12	15=11-13	16=8+14	17=9+15
1	Arifin Rudyanto (Mulai 1 Mei 2018)		8	3.516.480	8	3.516.480	0	0	8	3.516.480	8	3.516.480	0	-	0	-
			0	0	0	0	0	0	12	5.116.500	12	5.116.500	0	-	0	-
2	Siamet Sudarsono (Mulai Agustus 2012)		0	0	0	0	0	0	6	2.558.250	6	2.558.250	0	-	0	-
3	Subandi (Mulai Januari 2018)		0	0	0	0	0	0	12	5.116.500	12	5.116.500	0	-	0	-
TOTAL									26		26					

**KARTU PENYISIHAN PIUTANG SEWA RUMAH DINAS
PER 31 Desember 2019**

[illegible]

PIUTANG BUKAN PAJAK PER 31 DESEMBER 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	NAMA	PERUNTUKAN	NILAI
1	2	3	4
1	Arifin Rudyanto	Sewa Rumah Dinas (Mulai 1 Mei 2018)	-
2	Slamet Sudarsono	Sewa Rumah Dinas (Mulai Agustus 2012)	-
3	Subandi	Sewa Rumah Dinas (Mulai Januari 2018)	-
	TOTAL		-

Daftar Piutang Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung, Penyusutan Piutang
Tidak Tertagih, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (BL TGR) dan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) & BOT

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

[illegible]

KARTU PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI (BLTGR)
PER 31 Desember 2019

No	Nama Debitur	No & Tanggal SPn	Saldo Piutang (Rp)	Aguan/Barang Sitaan			Kualitas Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
				Bentuk Aguan/Sitaan	Nilai Aguan/Sitaan (Rp)	Nilai Aguan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp)		Saldo Piutang setelah Aguan/Sitaan (Rp)	Prosentase Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Putri Saraswati, SE	Kep. 184/M.PPN/08/2019	51.805.080	0	0	0	Lancar		0,5	259.025	
JUMLAH											
										259.025	

KARTU PENYISIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

PER 31 Desember 2019

No	Nama Debitur	No & Tanggal SPn	Saldo Piutang (Rp)	Agunan/Barang Sitaan			Kualitas Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
				Bentuk Agunan/Sitaan	Nilai Agunan/Sitaan (Rp)	Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp)		Saldo Piutang setelah Agunan/Sitaan (Rp)	Prosentase Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Putri Saraswati, SE	Kep. 184/M.PPN/08/2019	51.805.080	0	0	0	Lancar		0,5	259.025	
				JUMLAH						259.025	

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	NAMA	PERUNTUKAN	Sewa Per Bulan/Kegiatan	Piutang Sewa PER 31 DES 2018 (Saldo Awal)		Pembayaran Tunggakan Sewa S.D 31 DES 2019		Saldo Pembayaran Tunggakan Sewa		Sewa TA 2019		Pembayaran Sewa Per 31 Desember 2019		Tunggakan Sewa Per 31 Desember 2019		Piutang Sewa Per 31 Desember 2019	
				TAHUN	NILAI	BULAN	NILAI	TAHUN	NILAI	TAHUN	NILAI	TAHUN	NILAI	TAHUN	NILAI	TAHUN	NILAI
1	2		3	4	5	6	7	8-4-6	9-5-7	10	11	12	13	14=10-12	15=11-13	16=8+14	17=9+15
1	Bakrie Swasakti Utama	BOT	360.047.373							1	360.047.373	1	360.047.373	0	-	0	-
	TOTAL									1		1		-		-	

Daftar Rincian Persediaan

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	5.589.431.199
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	66.874.209.492
3	MWA ICCTF	16.015.685.397
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	42.846.650
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	570.000
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	1.625.500
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
24	Bappeda Propinsi Maluku	-
25	Bappeda Propinsi Bali	173.100
26	Bappeda Propinsi NTB	-
27	Bappeda Propinsi NTT	-
28	Bappeda Propinsi Papua	-
29	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
30	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
31	Bappeda Propinsi Banten	-
32	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
33	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
34	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
35	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
36	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
37	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
	Jumlah	88.524.541.338

Laporan SIMAK-BMN



**Kementerian PPN/
Bappenas**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BAGIAN ANGGARAN 055

PERIODE TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

(AUDITED)

DAFTAR ISI

- Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPB dan UAPA
 - Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2019
 - Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
 - Laporan Barang Persediaan
 - Laporan Barang Intrakomptabel
 - Laporan Barang Ekstrakomptabel
 - Laporan Barang Gabungan
 - Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - Laporan Aset Tak Berwujud
 - Laporan Bersejarah
 - Laporan Barang Rusak Berat
 - Laporan Barang Hilang
 - Laporan Barang BPYDS
 - Laporan Barang Hibah DK/TP
 - Laporan Penyusutan Intrakomptabel
 - Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
 - Laporan Amortisasi ATB
 - Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN)
 - Laporan PNBPN (yang bersumber dari pengelolaan BMN)
 - ADK Dokumen Pengelolaan BMN
 - Neraca Percobaan Berbasis AkruaL dan Laporan Neraca Tingkat K/L
 - Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar
-

**Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN
antara UAPB dan UAPA**

Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2019

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 02/05/20 11:00 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	4,687,468,842
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	166,435,625
117114	Suku Cadang	33,435,914
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	1,225,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8,597,374,046
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	2,695,169,719
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	46,785,182,527
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	442,853,200
117131	Bahan Baku	713,570
117199	Persediaan Lainnya	235,738,746
131111	Tanah	1,484,443,750,305
132111	Peralatan dan Mesin	433,773,685,330
133111	Gedung dan Bangunan	157,938,995,269
134111	Jalan dan Jembatan	352,692,000
134112	Irigasi	39,492,000
134113	Jaringan	5,627,818,566
135111	Aset Tetap Renovasi	97,304,922,142
135121	Aset Tetap Lainnya	4,090,945,179
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(236,746,432,724)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,822,558,857)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(125,961,430)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(2,752,535)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,992,731,824)
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000
162151	Software	49,691,725,087
162161	Lisensi	6,091,587,352
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	68,180,544,422
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(6,977,126,803)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(33,617,243,814)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,287,111,512)
J U M L A H		2,584,698,154,491

Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 02/05/20 10:08 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	4,886,559,913
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	151,802,768
117114	Suku Cadang	72,699,760
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9,073,215,553
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	6,004,949,741
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	873,938,584,817
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	86,058,368,983
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	20,952,843,800
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam	413,650,502
117131	Bahan Baku	348,587,586
117199	Persediaan Lainnya	1,655,269,325
131111	Tanah	1,358,782,569,305
132111	Peralatan dan Mesin	332,663,047,278
133111	Gedung dan Bangunan	157,167,081,859
134111	Jalan dan Jembatan	51,605,000
134112	Irigasi	2,450,323,000
134113	Jaringan	5,627,818,566
135111	Aset Tetap Renovasi	2,185,255,200
135121	Aset Tetap Lainnya	3,193,854,530
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(219,799,543,037)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,828,859,797)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(11,058,214)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(104,177,820)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,862,872,395)
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000
162151	Software	42,498,350,595
162161	Lisensi	7,088,597,289
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	62,680,178,299
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,595,154,195)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(33,783,114,399)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(1,924,109,957)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(12,580,000)
J U M L A H		3,195,233,118,855

Laporan Barang Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 02/05/20 11:02 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	78,813,443
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	319,800
1010301003	Penjepit Kertas	130,950,079
1010301004	Penghapus/Korektor	8,586,820
1010301005	Buku Tulis	10,565,924
1010301006	Ordner Dan Map	91,413,813
1010301007	Penggaris	2,771,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	27,618,575
1010301009	Pita Mesin Ketik	1,490,500
1010301010	Alat Perekat	13,291,120
1010301012	Staples	17,365,710
1010301013	Isi Staples	13,154,211
1010301014	Barang Cetak	340,992,398
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	12,543,072
1010302001	Kertas HVS	160,326,770
1010302002	Berbagai Kertas	58,092,795
1010302003	Kertas Cover	12,815,255
1010302004	Amplop	29,856,740
1010302005	Kop Surat	19,338,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	24,893,040
1010303001	Transparant Sheet	2,260,935
1010304001	Continuous Form	1,511,780
1010304004	Tinta/Toner Printer	3,164,420,182
1010304005	Disket	33,477,400
1010304006	USB/Flash Disk	169,030,700
1010304007	kartu Memori	3,971,495
1010304010	Mouse	7,145,080
1010306001	Kabel Listrik	15,258,480
1010306002	Lampu Listrik	107,858,845
1010306003	Stop Kontak	21,064,400
1010306004	Saklar	17,826,020
1010306005	Stacker	9,498,590
1010306006	Balast	6,034,600
1010306007	Starter	4,326,300
1010306008	Vitting	11,187,000
1010306010	Batu Baterai	17,925,500
1010306999	Alat Listrik Lainnya	36,304,470
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,168,000
Jumlah Barang Konsumsi		4,687,468,842
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	6,046,780
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	743,050
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	31,119,244
1010305006	Alat Pengikat	20,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	4,020,500

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 02/05/20 11:02 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	19,917,937
1010305012	Pengharum Ruangan	24,018,335
1010305013	Kuas	274,890
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	80,274,889
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		166,435,625
117114	Suku Cadang	
1010203999	Suku Cadang Alat Kedokteran Lainnya	160,500
1010206002	Suku Cadang Alat Komunikasi	31,675,414
1010207999	Suku Cadang Alat Pertanian Lainnya	1,600,000
Jumlah Suku Cadang		33,435,914
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	1,225,000
Jumlah Pita Cukai, Materai dan Leges		1,225,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501002	Tanah dan Bangunan	8,597,374,046
Jumlah Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		8,597,374,046
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501003	Hewan dan Tanaman	2,695,169,719
Jumlah Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		2,695,169,719
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501004	Peralatan dan Mesin	46,785,182,527
Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		46,785,182,527
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
1010501007	Aset Lain-lain	24,878,944,149
Jumlah Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		24,878,944,149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
1010501008	Barang Persediaan	442,853,200
Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		442,853,200
117131	Bahan Baku	
1010101006	Cat	330,000
1010101999	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya	383,570
Jumlah Bahan Baku		713,570
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	1,411,056
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	39,294,299
1010401999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	52,238,450
1010802002	Pertanian	21,384,941
1010802003	Perikanan	106,790,000
1020103999	Komponen Peralatan Lainnya	14,620,000
Jumlah Persediaan Lainnya		235,738,746
TOTAL		88,524,541,338

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tanggal : 02/05/20 10:09 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl_kel

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	4,687,468,842
	Jumlah Barang Konsumsi	4,687,468,842
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	166,435,625
	Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan	166,435,625
117114	Suku Cadang	
10102	SUKU CADANG	33,435,914
	Jumlah Suku Cadang	33,435,914
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	1,225,000
	Jumlah Pita Cukai, Materai dan Leges	1,225,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	8,597,374,046
	Jumlah Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8,597,374,046
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	2,695,169,719
	Jumlah Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,695,169,719
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	46,785,182,527
	Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	46,785,182,527
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	24,878,944,149
	Jumlah Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	442,853,200
	Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	442,853,200
117131	Bahan Baku	
10101	BAHAN	713,570
	Jumlah Bahan Baku	713,570
117199	Persediaan Lainnya	
10104	OBAT-OBATAN	92,943,805
10108	PERSEDIAAN PENELITIAN	128,174,941
10201	KOMPONEN	14,620,000
	Jumlah Persediaan Lainnya	235,738,746
	Jumlah	88,524,541,338

Laporan Barang Intrakomptabel

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 02/05/20 11:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
KODE	URAIAN	KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	KUANITAS	NILAI			
				KUANITAS	NILAI	KUANITAS	NILAI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
131111	Tanah	84,395	1,358,782,569,305	0	125,661,181,000	0	0	84,395	1,484,443,750,305					
20101	TANAH PERSIL	84,395	1,358,782,569,305	0	125,661,181,000	0	0	84,395	1,484,443,750,305					
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0					
132111	Peralatan dan Mesin	22,871	332,663,047,278	7,448	159,832,451,558	3,343	58,721,813,506	26,976	433,773,685,330					
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0					
30103	ALAT BANTU	53	10,964,838,805	20	4,044,618,068	3	19,583,300	70	14,989,873,573					
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	177	34,723,367,804	0	85,525,000	2	104,565,000	175	34,704,327,804					
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	14	32,803,258	1	2,585,000	0	0	15	35,388,258					
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	282	822,949,484	17	445,432,760	114	268,395,744	185	999,986,500					
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	26	544,492,855	1	1,760,000	3	23,705,000	24	522,547,855					
30303	ALAT UKUR	26	95,378,800	0	0	12	46,010,800	14	49,368,000					
30401	ALAT PENGOLAHAN	10	94,650,690	2	7,700,000	0	0	12	102,350,690					
30501	ALAT KANTOR	4,349	31,855,508,656	605	17,106,780,430	840	6,760,849,597	4,114	42,201,439,489					
30502	ALAT RUMAH TANGGA	11,520	58,388,494,130	4,679	53,182,349,562	1,679	4,397,783,846	14,520	107,173,059,846					
30601	ALAT STUDIO	609	29,316,779,445	240	10,292,035,433	71	6,496,142,789	778	33,112,672,089					
30602	ALAT KOMUNIKASI	624	2,986,754,638	594	2,478,639,350	113	318,489,811	1,105	5,146,904,177					
30603	PERALATAN PEMANCAR	3	2,248,000	0	0	0	0	3	2,248,000					
30701	ALAT KEDOKTERAN	57	2,045,418,428	0	0	15	48,459,400	42	1,996,959,028					
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	25	378,115,458	2	100,452,000	0	0	27	478,567,458					
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000					
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	4	74,762,839	0	0	0	0	4	74,762,839					
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	2	3,770,870	0	0	0	0	2	3,770,870					
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0					
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	6	998,768,155	0	0	0	0	6	998,768,155					
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	4	1,980,000	0	0	0	0	4	1,980,000					
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	9	156,965,000	0	0	7	38,715,000	2	118,250,000					
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	26	131,027,054	0	0	0	0	26	131,027,054					
31001	KOMPUTER UNIT	2,955	45,329,823,202	742	17,817,190,608	254	3,064,051,593	3,443	60,082,962,217					
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,041	112,167,695,390	541	54,127,126,747	230	37,135,061,626	2,352	129,159,760,511					
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	713,636,220	0	0	0	0	4	713,636,220					
31502	ALAT PELINDUNG	24	148,369,464	0	0	0	0	24	148,369,464					
31503	ALAT SAR	6	7,527,233	0	0	0	0	6	7,527,233					
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	4	396,186,800	2	93,005,000	0	0	6	489,191,800					
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	1,924,000	0	0	0	0	1	1,924,000					
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0					
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9	277,310,600	2	47,251,600	0	0	11	324,562,200					
133111	Gedung dan Bangunan	41	157,167,081,859	1	14,806,469,023	1	14,034,555,613	41	157,938,995,269					

**LAPORAN BARANG PENGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 02/05/20 11:03 AM
Halaman : 2
Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
KODE	URAIAN	KUNJANTITAS	NILAI	BERTAMBAH			BERKURANG			KUNJANTITAS	NILAI	NILAI
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30	150,677,288,186	1	13,220,373,985	1	13,903,825,613	30	149,993,836,558			
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	3,577,532,000	0	574,122,038	0	128,784,000	4	4,022,870,038			
40201	CANDITUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	3,800,000	0	0	0	1,946,000	1	1,854,000			
40401	TUGU/TANDA BATAS	6	2,908,461,673	0	1,011,973,000	0	0	6	3,920,434,673			
134111	Jalan dan Jembatan	55	51,605,000	0	301,087,000	0	0	55	352,692,000			
50101	JALAN	55	51,605,000	0	301,087,000	0	0	55	352,692,000			
134112	Irigasi	2	2,450,323,000	0	0	0	2,410,831,000	2	39,492,000			
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	2	2,450,323,000	0	0	0	2,410,831,000	2	39,492,000			
134113	Jaringan	71	5,627,818,566	0	0	0	0	71	5,627,818,566			
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1	167,500,000	0	0	0	0	1	167,500,000			
50302	INSTALASI AIR KOTOR	3	1,298,374,309	0	0	0	0	3	1,298,374,309			
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	2,043,487,500	0	0	0	0	3	2,043,487,500			
50310	INSTALASI LAIN	58	1,144,349,667	0	0	0	0	58	1,144,349,667			
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	554,917,000	0	0	0	0	1	554,917,000			
50402	JARINGAN LISTRIK	2	143,522,500	0	0	0	0	2	143,522,500			
50403	JARINGAN TELEPON	2	273,522,590	0	0	0	0	2	273,522,590			
50404	JARINGAN GAS	1	2,145,000	0	0	0	0	1	2,145,000			
135111	Aset Tetap Renovasi	8	2,185,255,200	2	95,119,666,942	0	0	10	97,304,922,142			
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	8	2,185,255,200	2	95,119,666,942	0	0	10	97,304,922,142			
135121	Aset Tetap Lainnya	16,467	3,193,854,530	107	1,049,374,164	3,084	152,283,515	13,490	4,090,945,179			
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	16,282	2,561,256,530	51	67,003,668	3,084	152,283,515	13,249	2,475,976,683			
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	79	479,017,000	0	0	0	0	79	479,017,000			
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	41	768,554,600	0	0	41	768,554,600			
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	97	152,294,000	15	213,815,896	0	0	112	366,109,896			
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	9	1,287,000	0	0	0	0	9	1,287,000			
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3,750	490,209,375,000	0	0	0	0	3,750	490,209,375,000			
20101	TANAH PERSIL	3,750	490,209,375,000	0	0	0	0	3,750	490,209,375,000			
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	49,952	62,680,178,299	6,115	20,966,281,104	2,991	15,485,914,981	53,076	68,180,544,422			
20101	TANAH PERSIL	41,849	45,937,327,125	0	0	0	0	41,849	45,937,327,125			
20103	LAPANGAN	8,078	13,462,070,000	0	0	0	0	8,078	13,462,070,000			
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0			
30103	ALAT BANTU	6	2,063,250,536	3	19,583,300	3	19,583,300	6	2,063,250,536			
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	337,552,000	0	0	1	13,343,250	4	324,188,750			
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0			
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	114	268,395,744	114	268,395,744	0	0			
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	3	23,705,000	3	23,705,000	0	0			

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:03 AM
Halaman : 3
Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30303	ALAT UKUR	0	0	12	46,010,800	11	45,185,800	1	825,000	
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
30501	ALAT KANTOR	0	0	787	6,584,352,522	780	6,546,805,147	7	37,547,375	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	59,729	1,460	3,766,261,125	1,445	3,741,380,894	16	24,939,960	
30601	ALAT STUDIO	0	0	67	5,047,159,673	59	411,638,728	8	4,635,520,945	
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	113	318,489,811	113	318,489,811	0	0	
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	15	48,459,400	15	48,459,400	0	0	
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0	
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0	
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0	
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	7	38,715,000	7	38,715,000	0	0	
31001	KOMPUTER UNIT	3	66,584,310	254	3,064,051,593	248	2,999,713,143	9	130,922,760	
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	195	1,237,674,008	192	1,010,499,764	3	227,174,244	
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4	1,540,000	0	0	0	0	4	1,540,000	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	368,611,749	1	371,139,613	0	0	4	739,751,362	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	273,176,850	0	0	0	0	2	273,176,850	
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	3,084	152,283,515	0	0	3,084	152,283,515	
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	170,026,000	0	0	0	0	1	170,026,000	
TOTAL			2,415,011,108,037		417,756,510,791		90,805,398,615		2,741,962,220,213	

Laporan Barang Ekstrakomptabel

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
132111	Peralatan dan Mesin	3,309	605,182,634	465	298,612,555	1,578	192,798,219	2,196	710,996,970			
30103	ALAT BANTU	2	495,000	0	0	0	0	2	495,000			
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	218,000	1	880,000		1	218,000	1	880,000		
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	171,600	3	1,546,600	1	44,000	4	1,674,200			
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10	1,589,500	0	0	7	1,210,000	3	379,500			
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0			
30501	ALAT KANTOR	1,082	180,980,081	91	38,041,472	670	74,342,530	503	144,679,023			
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,275	244,617,201	230	148,451,383	765	102,255,500	740	290,813,084			
30601	ALAT STUDIO	19	4,115,000	2	850,000	2	500,000	19	4,465,000			
30602	ALAT KOMUNIKASI	760	121,791,392	44	28,492,500	42	3,433,000	762	146,850,892			
30701	ALAT KEDOKTERAN	4	1,343,100	2	1,650,000	1	210,100	5	2,783,000			
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	599,000	0	0	0	0	2	599,000			
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10	8,500,000	0	0	0	0	10	8,500,000			
30902	PERSENUAAN NON SENJATA API	70	8,734,000	0	0	70	8,734,000	0	0			
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	13	1,694,050	6	3,834,600	12	1,144,000	7	4,384,650			
31002	PERALATAN KOMPUTER	48	22,285,739	83	73,091,000	7	707,089	124	94,669,650			
31503	ALAT SAR	9	6,321,699	2	825,000	0	0	11	7,146,699			
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	2	1,727,272	1	950,000	0	0	3	2,677,272			
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0			
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0			
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	1,578	192,798,219	1,576	192,484,719	2	313,500			
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	1	218,000	1	218,000	0	0			
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	1	44,000	1	44,000	0	0			
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	7	1,210,000	7	1,210,000	0	0			
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0			
30501	ALAT KANTOR	0	0	670	74,342,530	670	74,342,530	0	0			
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	765	102,255,500	764	102,024,500	1	231,000			
30601	ALAT STUDIO	0	0	2	500,000	2	500,000	0	0			
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	42	3,433,000	41	3,350,500	1	82,500			
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	1	210,100	1	210,100	0	0			
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0			
30902	PERSENUAAN NON SENJATA API	0	0	70	8,734,000	70	8,734,000	0	0			
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	12	1,144,000	12	1,144,000	0	0			
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	7	707,089	7	707,089	0	0			
TOTAL				605,182,634		491,410,774		385,282,938				711,310,470

Laporan Barang Gabungan

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG				SALDO PER 1 JANUARI 2019				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
				BERTAMBAH				BERKURANG							
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
131111	Tanah	84,395	1,358,782,569,305		125,661,181,000	0	0	84,395	1,484,443,750,305						
20101	TANAH PERSIL	84,395	1,358,782,569,305		125,661,181,000	0	0	84,395	1,484,443,750,305						
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0						
132111	Peralatan dan Mesin	26,180	333,268,229,912	7,913	160,131,064,113	4,921	58,914,611,725	29,172	434,484,682,300						
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0						
30103	ALAT BANTU	55	10,965,333,805	20	4,044,618,068	3	19,583,300	72	14,990,368,573						
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	177	34,723,367,804	0	85,525,000	2	104,565,000	175	34,704,327,804						
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	15	33,021,258	2	3,465,000	1	218,000	16	36,268,258						
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	284	823,121,084	20	446,979,360	115	268,439,744	189	1,001,660,700						
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	36	546,082,355	1	1,760,000	10	24,915,000	27	522,927,355						
30303	ALAT UKUR	26	95,378,800	0	0	12	46,010,800	14	49,368,000						
30401	ALAT PENGOLAHAN	10	94,650,690	2	7,700,000	0	0	12	102,350,690						
30501	ALAT KANTOR	5,431	32,036,488,737	696	17,144,821,902	1,510	6,835,192,127	4,617	42,346,118,512						
30502	ALAT RUMAH TANGGA	12,795	58,633,111,331	4,909	53,330,800,945	2,444	4,500,039,346	15,260	107,463,872,930						
30601	ALAT STUDIO	628	29,320,894,445	242	10,292,885,433	73	6,495,642,789	797	33,117,137,069						
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,384	3,108,546,030	638	2,507,131,850	155	321,922,811	1,867	5,293,755,069						
30603	PERALATAN PEMANCAR	3	2,248,000	0	0	0	0	3	2,248,000						
30701	ALAT KEDOKTERAN	61	2,046,761,528	2	1,650,000	16	48,669,500	47	1,999,742,028						
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	27	378,714,458	2	100,452,000	0	0	29	479,166,458						
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000						
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	14	83,262,839	0	0	0	0	14	83,262,839						
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	2	3,770,870	0	0	0	0	2	3,770,870						
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0						
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	6	998,768,155	0	0	0	0	6	998,768,155						
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	4	1,980,000	0	0	0	0	4	1,980,000						
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	79	165,699,000	0	0	77	47,449,000	2	118,250,000						
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	39	132,721,104	6	3,834,600	12	1,144,000	33	135,411,704						
31001	KOMPUTER UNIT	2,955	45,329,823,202	742	17,817,190,608	254	3,064,051,593	3,443	60,082,962,217						
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,089	112,189,981,129	624	54,200,217,747	237	37,135,768,715	2,476	129,254,430,161						
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	713,636,220	0	0	0	0	4	713,636,220						
31502	ALAT PELINDUNG	24	148,369,464	0	0	0	0	24	148,369,464						
31503	ALAT SAR	15	13,848,932	2	825,000	0	0	17	14,673,932						
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	6	397,914,072	3	93,955,000	0	0	9	491,869,072						
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	1,924,000	0	0	0	0	1	1,924,000						
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0						
31901	PERALATAN OLAH RAGA	9	277,310,600	2	47,251,600	0	0	11	324,562,200						

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:13 PM
Halaman : 2
Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
KODE	URAIAN	KUNJANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI
				KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
133111	Gedung dan Bangunan	41	157,167,081,859	1	14,806,469,023	1	14,034,555,613	41	157,938,995,269				
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30	150,677,288,186	1	13,220,373,985	1	13,903,825,613	30	149,993,836,558				
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	3,577,532,000	0	574,122,038	0	128,784,000	4	4,022,870,038				
40201	CANDITUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	3,800,000	0	0	0	1,946,000	1	1,854,000				
40401	TUGUTANDA BATAS	6	2,908,461,673	0	1,011,973,000	0	0	6	3,920,434,673				
134111	Jalan dan Jembatan	55	51,605,000	0	301,087,000	0	0	55	352,692,000				
50101	JALAN	55	51,605,000	0	301,087,000	0	0	55	352,692,000				
134112	Irigasi	2	2,450,323,000	0	0	0	2,410,831,000	2	39,482,000				
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	2	2,450,323,000	0	0	0	2,410,831,000	2	39,482,000				
134113	Jaringan	71	5,627,818,566	0	0	0	0	71	5,627,818,566				
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1	167,500,000	0	0	0	0	1	167,500,000				
50302	INSTALASI AIR KOTOR	3	1,298,374,309	0	0	0	0	3	1,298,374,309				
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	2,043,487,500	0	0	0	0	3	2,043,487,500				
50310	INSTALASI LAIN	58	1,144,349,667	0	0	0	0	58	1,144,349,667				
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	554,917,000	0	0	0	0	1	554,917,000				
50402	JARINGAN LISTRIK	2	143,522,500	0	0	0	0	2	143,522,500				
50403	JARINGAN TELEPON	2	273,522,590	0	0	0	0	2	273,522,590				
50404	JARINGAN GAS	1	2,145,000	0	0	0	0	1	2,145,000				
135111	Aset Tetap Renovasi	8	2,185,255,200	2	95,119,666,942	0	0	10	97,304,922,142				
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	8	2,185,255,200	2	95,119,666,942	0	0	10	97,304,922,142				
135121	Aset Tetap Lainnya	16,467	9,193,854,530	107	1,049,374,164	3,084	152,283,515	13,490	4,090,945,179				
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	16,282	2,561,256,530	51	67,003,668	3,084	152,283,515	13,249	2,475,976,683				
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	79	479,017,000	0	0	0	0	79	479,017,000				
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	41	768,554,600	0	0	41	768,554,600				
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	97	152,294,000	15	213,815,896	0	0	112	366,109,896				
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	9	1,287,000	0	0	0	0	9	1,287,000				
161111	Kemiraan Dengan Pihak Ketiga	3,750	490,209,375,000	0	0	0	0	3,750	490,209,375,000				
20101	TANAH PERSIL	3,750	490,209,375,000	0	0	0	0	3,750	490,209,375,000				
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	49,952	62,680,178,299	7,693	21,179,079,323	4,567	15,678,399,700	53,078	68,180,857,922				
20101	TANAH PERSIL	41,849	45,937,327,125	0	0	0	0	41,849	45,937,327,125				
20103	LAPANGAN	8,078	13,462,070,000	0	0	0	0	8,078	13,462,070,000				
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0				
30103	ALAT BANTU	6	2,063,250,536	3	19,583,300	3	19,583,300	6	2,063,250,536				
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	5	337,532,000	0	0	0	13,343,250	4	324,188,750				
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	1	218,000	1	218,000	0	0				

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPOTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:13 PM
Halaman : 3
Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
KODE	URAIAN	KUNANTITAS	NILAI	BERTAMBAH			BERKURANG			KUNANTITAS	NILAI
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	115	268,439,744	115	268,439,744	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	10	24,915,000	10	24,915,000	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	12	46,010,800	11	45,185,800	1	825,000	1	825,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	1,457	6,658,695,052	1,450	6,621,147,677	7	37,547,375	7	37,547,375
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	59,729	2,225	3,888,516,525	2,209	3,843,405,394	17	25,170,960	17	25,170,960
30601	ALAT STUDIO	0	0	69	5,047,659,673	61	412,138,728	8	4,635,520,945	8	4,635,520,945
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	155	321,922,811	154	321,840,311	1	82,500	1	82,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	16	48,669,500	16	48,669,500	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	77	47,449,000	77	47,449,000	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	12	1,144,000	12	1,144,000	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	3	66,584,310	254	3,064,051,593	248	2,999,713,143	9	130,922,760	9	130,922,760
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	202	1,238,381,097	199	1,011,206,853	3	227,174,244	3	227,174,244
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4	1,540,000	0	0	0	0	4	1,540,000	4	1,540,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	368,611,749	1	371,139,613	0	0	4	739,751,362	4	739,751,362
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	273,176,850	0	0	0	0	2	273,176,850	2	273,176,850
40401	TUGAS/ANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	3,084	152,283,515	0	0	3,084	152,283,515	3,084	152,283,515
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	170,026,000	0	0	0	0	0	170,026,000	1	170,026,000
TOTAL			2,415,616,290,671		418,247,921,565		91,190,681,553		2,742,673,530,683		

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2019		PENAMBAHAN		KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF		JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7				
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	0	0	0		
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0	0		
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0	0		
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	2,340,910,000	2,340,910,000	2,340,910,000	2,340,910,000	0	0	
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	0	0	2,340,910,000	2,340,910,000	2,340,910,000	2,340,910,000	0	0	
TOTAL		0	0	2,340,910,000	2,340,910,000	2,340,910,000	2,340,910,000	0	0	

Laporan Aset Tak Berwujud

LAPORAN BARANG PENGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2019		
					BERTAMBAH		BERKURANG				
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI			
KODE	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0		
80301	ASET KEMITRAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		
162151	Software	664	42,498,350,595	106	15,542,010,241	45	8,348,635,749	725	49,691,725,087		
80101	ASET TAK BERWUJUD	664	42,498,350,595	106	15,542,010,241	45	8,348,635,749	725	49,691,725,087		
162161	Lisensi	100	7,088,597,289	11	180,429,500	3	1,177,439,437	108	6,091,587,352		
80101	ASET TAK BERWUJUD	100	7,088,597,289	11	180,429,500	3	1,177,439,437	108	6,091,587,352		
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0		
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			49,586,947,884		9,526,075,186		15,722,439,741		55,783,312,439		

Laporan Bersejarah

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
KODE	URAIAN		BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	4	5	6	7
		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS

Laporan Barang Rusak Berat

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_dbrb_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG			SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI		
				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
132111	Peralatan dan Mesin	(64)	(8,096,549,947)	4,568	15,666,843,373	4,552	11,822,400,284	(48)	(4,252,106,858)		
30103	ALAT BANTU	(4)	(431,737,464)	3	19,583,300	3	19,583,300	(4)	(431,737,464)		
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	(60)	(7,664,812,483)	0	0	10	833,212,500	(70)	(8,498,024,983)		
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	1	218,000	1	218,000	0	0		
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	115	268,439,744	115	268,439,744	0	0		
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	10	24,915,000	8	23,897,500	2	1,017,500		
30303	ALAT UKUR	0	0	11	45,185,800	7	14,990,800	4	30,195,000		
30501	ALAT KANTOR	0	0	1,450	6,621,147,677	1,437	2,004,175,621	13	4,616,972,056		
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	2,211	3,845,192,317	2,205	3,818,681,384	6	26,510,933		
30601	ALAT STUDIO	0	0	61	412,138,728	61	412,138,728	0	0		
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	154	321,840,311	153	318,880,211	1	2,960,100		
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	16	48,669,500	16	48,669,500	0	0		
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	77	47,449,000	77	47,449,000	0	0		
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	12	1,144,000	12	1,144,000	0	0		
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	248	2,999,713,143	248	2,999,713,143	0	0		
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	199	1,011,206,853	199	1,011,206,853	0	0		
162151	Software	(102)	(1,179,050,705)	0	0	0	0	(102)	(1,179,050,705)		
80101	ASET TAK BERWUJUD	(102)	(1,179,050,705)	0	0	0	0	(102)	(1,179,050,705)		
162161	Lisensi	(118)	(218,830,304)	0	0	0	0	(118)	(218,830,304)		
80101	ASET TAK BERWUJUD	(118)	(218,830,304)	0	0	0	0	(118)	(218,830,304)		
TOTAL			(9,494,430,956)		15,666,843,373		11,822,400,284		(5,649,987,867)		

Laporan Barang Hilang

LAPORAN BARANG HILANG
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:13 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_dbh_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Laporan Barang BPYDS

LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
(BPYBDS)
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_bpybds_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019			
				BERTAMBAH		BERKURANG					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Laporan Barang Hibah DK/TP

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:15 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_dhdktp_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
		BERTAMBAH		BERKURANG					
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Laporan Penyusutan Intrakomptabel

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 02/05/20 10:15 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG										SALDO 31 DESEMBER 2019			
KODE	URAIAN	KUANITTAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			TOTAL	NILAI BUKU					
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI							
1	2	3	4	5	6	7	8-5+6+7	9=4-8					
132111	Peralatan dan Mesin	26,976	433,773,685,330	219,799,543,037	55,387,339,569	(38,440,449,882)	236,746,432,724	187,027,252,606					
30101	ALAT BESAR DARAT	0	0	0	0	0	0	0					
30103	ALAT BANTU	70	14,989,873,573	5,467,150,236	1,776,422,435	(19,445,800)	7,224,126,871	7,765,746,702					
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	175	34,704,327,804	29,348,139,910	2,305,576,898	(154,065,000)	31,499,651,808	3,204,675,996					
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	15	35,388,258	29,606,607	3,842,901	0	33,449,508	1,938,750					
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	185	999,986,500	273,255,995	77,403,507	(115,855,087)	234,804,415	765,182,085					
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	24	522,547,855	538,131,555	4,207,500	(23,705,000)	518,634,055	3,913,600					
30303	ALAT UKUR	14	49,368,000	87,071,600	4,681,600	(46,010,800)	45,742,400	3,625,600					
30401	ALAT PENGOLAHAN	12	102,350,690	74,685,690	1,443,750	0	76,129,440	26,221,250					
30501	ALAT KANTOR	4,114	42,201,439,489	24,184,549,789	5,043,807,812	(6,733,320,051)	22,495,037,550	19,706,401,939					
30502	ALAT RUMAH TANGGA	14,520	107,173,059,846	39,373,883,645	12,372,620,717	(4,317,553,795)	47,428,950,567	59,744,109,279					
30601	ALAT STUDIO	778	33,112,672,089	21,224,710,561	5,018,358,825	(4,929,602,165)	21,313,467,221	11,799,204,868					
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,105	5,146,904,177	2,532,595,769	513,555,568	(317,113,411)	2,729,037,926	2,417,866,251					
30603	PERALATAN PEMANCAR	3	1,056,800	224,800	0	0	1,281,600	966,400					
30701	ALAT KEDOKTERAN	42	1,996,959,028	2,035,139,559	4,440,381	(48,459,400)	1,991,120,540	5,838,488					
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	27	478,567,458	135,914,830	45,885,251	0	181,800,081	296,767,377					
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	1,500,000	500,000	100,000	0	600,000	900,000					
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIRELEKTRONIKA	4	74,762,839	8,232,093	3,344,188	0	11,576,281	63,186,558					
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	2	3,770,870	1,537,354	435,100	(377,088)	1,595,366	2,175,504					
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0					
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	6	998,768,155	738,636,940	66,584,546	0	805,221,486	193,546,669					
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	4	1,980,000	693,000	198,000	0	891,000	1,089,000					
30902	PENSIJILAN NON SENJATA API	2	118,250,000	156,965,000	0	0	118,250,000	0					
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	26	131,027,054	145,524,161	0	(23,405,400)	122,118,761	8,908,293					
31001	KOMPUTER UNIT	3,443	60,082,962,217	28,314,976,142	9,069,975,660	(3,280,153,082)	34,104,798,720	25,978,163,497					
31002	PERALATAN KOMPUTER	2,352	129,159,760,511	64,017,058,580	18,903,037,879	(18,389,228,803)	64,530,867,656	64,628,892,855					
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	4	713,636,220	535,227,160	71,363,624	0	606,590,784	107,045,436					
31502	ALAT PELINDUNG	24	148,369,464	29,673,888	29,673,888	0	59,347,776	89,021,388					
31503	ALAT SAR	6	7,527,233	3,545,618	1,779,615	0	5,325,233	2,202,300					
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	6	489,191,800	279,578,454	44,210,358	(3,440,000)	320,348,812	168,842,988					
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	1,924,000	240,500	240,500	0	481,000	1,443,000					
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0					
31901	PERALATAN OLAH RAGA	11	324,562,200	261,261,601	23,924,266	0	285,185,867	39,376,393					
133111	Gedung dan Bangunan	41	157,938,995,269	11,828,859,797	7,723,303,038	(729,603,978)	18,822,558,857	138,116,436,412					
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30	149,993,836,558	11,509,148,257	7,485,463,854	(752,387,475)	18,242,224,636	131,751,611,922					
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	4,022,870,038	221,786,958	149,561,600	(11,688,297)	359,640,261	3,663,229,777					
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	1,854,000	123,912	40,304	(63,456)	100,760	1,753,240					
40401	TUGUTANDA BATAS	6	3,920,434,673	97,820,670	88,237,280	34,535,250	220,593,200	3,699,841,473					

Tanggal : 02/05/20 10:16 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALDO 31 DESEMBER 2019

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 02/05/20 10:16 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	9	130,922,760	45,604,074	22,194,771	63,123,915	130,922,760	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	227,174,244	0	0	227,174,244	227,174,244	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4	1,540,000	1,540,000	0	0	1,540,000	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	739,751,362	87,955,727	15,900,219	62,256,890	166,112,836	573,638,526
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2	273,176,850	55,242,301	5,463,538	0	60,705,839	212,471,011
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	170,025,000	0	0	0	0	170,025,000
	JUMLAH	27,332	704,032,578,985	237,201,665,458	64,033,601,635	(35,567,702,920)	265,667,564,173	438,365,014,812

Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 02/05/20 10:24 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG										SALDO 31 DESEMBER 2019			
KODE	URAIAN	Kuantittas	Nilai Perolehan	AKUMULASI PENYUSUTAN				Nilai Buku					
				Saldo Awal	Periode Berjalan	Koreksi	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8					
132111	Peralatan dan Mesin	2,196	710,996,970	475,053,449	72,140,898	(192,589,309)	354,605,038	356,391,932					
30103	ALAT BANTU	2	495,000	212,141	70,715	0	282,856	212,144					
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	880,000	218,000	0	(218,000)	0	880,000					
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	1,674,200	124,300	131,670	(28,600)	227,370	1,446,830					
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	379,500	1,437,700	75,900	(1,210,000)	303,600	75,900					
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0					
30501	ALAT KANTOR	503	144,679,023	143,709,825	17,987,737	(74,318,530)	87,379,032	57,299,991					
30502	ALAT RUMAH TANGGA	740	290,813,084	195,772,378	32,030,872	(102,085,980)	125,717,260	165,085,824					
30601	ALAT STUDIO	19	4,465,000	4,115,000	66,000	(500,000)	3,681,000	784,000					
30602	ALAT KOMUNIKASI	762	146,850,892	106,193,000	6,394,500	(3,433,000)	109,154,500	37,696,392					
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	2,783,000	652,300	525,800	(210,100)	968,000	1,815,000					
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	599,000	299,498	0	0	299,498	299,502					
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10	8,500,000	566,660	0	0	566,660	7,933,340					
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	8,734,000	0	(8,734,000)	0	0					
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	4,384,650	1,281,512	958,650	(1,144,000)	1,096,162	3,288,488					
31002	PERALATAN KOMPUTER	124	94,669,650	8,403,553	10,325,709	(707,089)	18,022,173	76,647,477					
31503	ALAT SAR	11	7,146,699	3,160,854	3,573,345	0	6,734,199	412,500					
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	3	2,677,272	172,728	0	0	172,728	2,504,544					
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0					
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0					
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2	313,500	0	0	313,500	313,500	0					
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0					
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0					
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0					
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0					
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0					
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	231,000	0	0	231,000	231,000	0					
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0					
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	82,500	0	0	82,500	82,500	0					
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0					
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0					
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0					
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0					
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0					
JUMLAH		2,198	711,310,470	475,053,449	72,140,898	(192,275,809)	354,918,538	356,391,932					

Laporan Amortisasi ATB

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 02/05/20 10:17 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162151	Software	725	49,691,725,087	33,783,114,399	5,905,466,335	(6,071,336,920)	33,617,243,814	16,074,481,273
80101	ASET TAK BERWUJUD	725	49,691,725,087	33,783,114,399	5,905,466,335	(6,071,336,920)	33,617,243,814	16,074,481,273
162161	Lisensi	108	6,091,587,352	1,924,109,957	664,950,690	(301,949,135)	2,287,111,512	3,804,475,840
80101	ASET TAK BERWUJUD	108	6,091,587,352	1,924,109,957	664,950,690	(301,949,135)	2,287,111,512	3,804,475,840
165112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	12,580,000	0	(12,580,000)	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	12,580,000	0	(12,580,000)	0	0
JUMLAH		833	55,783,312,439	35,719,804,356	6,570,417,025	(6,385,866,055)	35,904,355,326	19,878,957,113

Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN)

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE TAHUNAN (AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara beserta perubahannya terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 532/KM.6/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;

B. Entitas Pelaporan

Kementerian PPN/Bappenas memiliki 37 (tiga puluh tujuh) satuan kerja, yang terdiri dari 4 (empat) satuan kerja kantor pusat dan 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja dekonsentrasi. Adapun daftar satuan kerja Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Satuan kerja Kementerian PPN/Bappenas
2. Satuan kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation
3. Satuan kerja Majelis Wali Amanat ICCTF
4. Satuan kerja Komite Nasional Keuangan Syariah
5. Satuan kerja Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara
7. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
8. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
9. Satuan kerja Bappeda Provinsi Jambi
10. Satuan kerja Bappeda Provinsi Riau
11. Satuan kerja Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
12. Satuan kerja Bappeda Provinsi Bangka Belitung
13. Satuan kerja Bappeda Provinsi Bengkulu
14. Satuan kerja Bappeda Provinsi Lampung
15. Satuan kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
16. Satuan kerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah
17. Satuan kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur
18. Satuan kerja Bappeda Provinsi DI Yogyakarta
19. Satuan kerja Bappeda Provinsi Banten
20. Satuan kerja Bappeda Provinsi Bali

21. Satuan kerja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
22. Satuan kerja Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur
23. Satuan kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
24. Satuan kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
25. Satuan kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
26. Satuan kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
27. Satuan kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Utara
28. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
29. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Barat
30. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
31. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
32. Satuan kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
33. Satuan kerja Bappeda Provinsi Gorontalo
34. Satuan kerja Bappeda Provinsi Maluku
35. Satuan kerja Bappeda Provinsi Maluku Utara
36. Satuan kerja Bappeda Provinsi Papua
37. Satuan kerja Bappeda Provinsi Papua Barat

C. Periode Laporan

Periode Laporan yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara ini adalah periode Tahunan yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Penggolongan/Kodefikasi

Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan klasifikasi atas penggolongan/kodefikasi Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara beserta perubahannya terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 532/KM.6/2015.

B. Kapitalisasi

Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca.

Kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai; dan/atau

b) peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN:

- a) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000;- (satu juta rupiah), untuk:
 - 1) peralatan dan mesin; atau
 - 2) aset tetap renovasi peralatan dan mesin;
- b) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - 1) gedung dan bangunan; atau
 - 2) aset tetap renovasi gedung dan bangunan

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak diperlukan untuk:

- a) BMN berupa tanah;
- b) BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan;
- c) BMN berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau
- d) BMN berupa aset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

C. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi data Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kementerian PPN/Bappenas melakukan rekonsiliasi internal antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang setiap jenjang pelaporan. Adapun waktu/jadwal rekonsiliasi internal tersebut adalah:

- 1. Setiap bulan pada tingkat Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang (*sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan*);
- 2. Setiap semester dan tahunan pada tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan Pengguna Barang.

Sedangkan rekonsiliasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pengelola Barang cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilakukan setiap semester dan tahunan.

Rekonsiliasi Barang Milik Negara tersebut meliputi saldo awal, mutasi, dan saldo akhir. Unsur data pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara, meliputi:

1. Aset Lancar (Persediaan)
2. Aset Tetap
 - a. Tanah
 - b. Gedung dan Bangunan
 - c. Peralatan dan Mesin
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Aset Tetap Lainnya
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
3. Aset Lainnya
 - a. Aset Tidak Berwujud
 - b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - c. Aset Lain-Lain, berupa aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah

D. Penyusutan

1. Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas Barang Milik Negara yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012;
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

2. Metode Penyusutan Yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

3. Masa manfaat yang digunakan

Masa manfaat atas Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Amortisasi

1. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

2. Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:

- a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- b. Lisensi;
- c. Waralaba (*Franchise*);
- d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
- e. Hak Paten.

3. Amortisasi tidak dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
4. Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan padaperhitungan Pengguna Barang.
5. Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sesuai Keputusan Menteri Keputusan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut.
6. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat. Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode.

F. Penilaian Kembali

Pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang berhasil guna.

Penilaian kembali dilakukan atas Barang Milik Negara berupa aset tetap yaitu:

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan; dan
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan (Jalan dan Jembatan serta Bangunan Air), yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Penilaian kembali Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menggunakan:

1. Pendekatan data pasar;
 2. Pendekatan biaya; dan/atau
 3. Pendekatan pendapatan,
- penggunaan pendekatan penilaian tersebut di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian penilaian

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Nilai Barang Milik Negara Tahunan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada 31 Desember Tahunan Anggaran 2019 ini adalah sebesar Rp2,585,054,546,423,- (*dua triliun lima ratus delapan puluh lima milyar lima puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah*), yang merupakan nilai Barang Milik Negara berupa saldo awal laporan sebesar Rp3.195.363.248.040,- (*tiga triliun seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah*), dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp610,308,701,617,- (*enam ratus tiga belas milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima*

rupiah). Nilai mutasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari transaksi keuangan dan non-keuangan. Mutasi Barang Milik Negara yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Barang Milik Negara yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Milik Negara ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SIMAK-SAIBA;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2019

1. Saldo Awal Laporan Barang Pengguna Tahunan (Audited) Kementerian PPN/Bappenas

Nilai Barang Milik Negara per 31 Desember 2018 menurut Laporan Barang Pengguna (Audited) adalah sebesar Rp3.195.363.248.040,- (*tiga triliun seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus*

empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah) yang terdiri dari nilai Barang Milik Negara intrakomptabel (nilai Barang Milik Negara yang disajikan dalam neraca) sebesar Rp3.195.233.118.855,- (*tiga triliun seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) dan nilai Barang Milik Negara ekstrakomptabel sebesar Rp130.129.185,- (*seratus tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas

Mutasi Barang Milik Negara per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp88,524,541,338,- (*delapan puluh delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.003.556.532.748,- (*satu triliun tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar - Rp915,031,991,410,- (*minus sembilan ratus lima belas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	4.886.559.913	(199.091.071)	4.687.468.842
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	151.802.768	14.632.857	166.435.625
117114	Suku Cadang	72.699.760	(39.263.846)	33.435.914
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	1.225.000	1.225.000
117122	Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	9.073.215.553	(475.841.507)	8.597.374.046
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	6.004.949.741	(3.309.780.022)	2.695.169.719

117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	873.938.584.817	(827.153.402.290)	46.785.182.527
117127	Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	86.058.368.983	(61.179.424.834)	24.878.944.149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	20.952.843.800	(20.509.990.600)	442.853.200
117129	Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam proses	413.650.502	(413.650.502)	-
117131	Bahan Baku	348.587.586	(347.874.016)	713.570
117199	Persediaan Lainnya	1.655.269.325	(1.419.530.579)	235.738.746
Jumlah		1.003.556.532.748	(915.031.991.410)	88.524.541.338

Saldo akhir tersebut merupakan penggabungan dari Laporan Barang Persediaan 37 (tiga puluh tujuh) Satuan Kerja, dan khusus untuk Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas menggunakan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh melalui Aplikasi Persediaan dari 18 (delapan belas) Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pembantu Kuasa Pengguna Barang (*sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan*).

Satuan kerja yang masih memiliki saldo persediaan per 31 Desember 2019 yaitu:

Satuan Kerja		Saldo Akhir (Rp)
017312	Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas	Rp5.589.431.199
966009	Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation	Rp66.874.209.492
966010	Satuan Kerja MWA ICCTF	Rp16.015.685.397
417951	Komite Nasional Keuangan Syariah	Rp42.846.650
180060	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Rp1.625.500
160019	Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	Rp570.000

220060	Bappeda Provinsi Bali	Rp173.100
Total		Rp88,524,541,338

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 termasuk persediaan berupa tanah dan bangunan/hewan dan tanaman/peralatan dan mesin/jalan, irigasi dan jaringan/aset lain-lain yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu:

- a. Satuan Kerja MWA ICCTF senilai Rp15.871.290.456,- (*lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) yaitu:
 - 1) Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp8.597.374.046,- (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam rupiah*)
 - 2) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp2.695.169.719,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*),
 - 3) Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp4.578.746.691,- (*empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*), dan
- b. Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation senilai Rp66,850,310,500,- (*enam puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah*) yaitu:
 - 1) Peralatan dan mesin untuk diserahkan senilai Rp41,528,513,151,- (*empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah*),
 - 2) aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp24.878.944.149,- (*dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*), dan
 - 3) Barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp442.853.200,- (*empat ratus empat*

puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- c. Satuan kerja Kementerian PPN/Bappenas senilai peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat Rp677.922.685,- (*enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*).

Per 31 Desember 2019 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47, yaitu Program Compact senilai Rp957.026.963.748. Berdasarkan kewenangan persetujuan hibah BMN, dari jumlah tersebut terdapat BMN senilai Rp721.466.289.696 yang merupakan kewenangan Presiden RI untuk memberikan persetujuan Hibah BMN sedangkan yang menjadi kewenangan Menteri PPN/Kepala Bappenas senilai Rp235.560.674.052 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan atas pengajuan permohonan persetujuan yang menjadi kewenangan Presiden telah disampaikan seluruhnya melalui Menteri Keuangan dengan nilai total Rp721.466.289.696, dengan rincian:
- 1) Sudah mendapat persetujuan dari Presiden dan telah dilakukan penandatanganan Naskah Hibah dan BAST Senilai Rp141.358.018.943,
 - 2) Belum dapat dilakukan penandatanganan Naskah Hibah dan BAST karena belum ada persetujuan dari Presiden senilai Rp580.108.270.753.
- b. Berdasarkan atas pengajuan permohonan persetujuan yang menjadi kewenangan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Satker Pengelola Hibah MCC melanjutkan proses pemindahtanganannya pada kuartal 1 Tahun Anggaran 2020, sehingga per tanggal 31 Maret 2020. Dari total Nilai BMN Rp235.560.674.052 dengan rincian:
- 1) Telah mendapat persetujuan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan dilakukan proses pemindahtanganan BMN senilai Rp232.832.879.552.

- 2) Masih dalam tahap penelitian administrasi dan fisik oleh Tim Peneliti BMN Kementerian PPN/Bappenas BMN senilai Rp2.727.794.500.

Per 31 Desember 2019 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47, yaitu:

- a. PGSP – UNDP sebesar Rp57.708.500,- (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah*), sesuai surat permohonan persetujuan nomor 8015/SES/09/2017 tanggal 22 September 2017
- b. JFPR – ADB sebesar Rp1.283.830.003,- (*satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga rupiah*), sesuai surat permohonan persetujuan nomor 7446/B.05/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta I

2. Tanah

Saldo tanah pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,484,443,750,305,- (*satu triliun empat ratus delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.358.782.569.305 (*satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah*). Mutasi tambah Rp125,661,181,000 (*seratus dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nihil*).

Mutasi tambah tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Kesalahan input IP	Rp125,661,181,000	

- Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	Rp1.358.782.569.305	Rp125.661.181.000	Rp1.484.443.750.305
Jumlah	Rp1.358.782.569.305	Rp125.661.181.000	Rp1.484.443.750.305

Atas tanah Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 13 yang berlokasi di Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dengan bukti kepemilikan berupa SHP No. 07 seluas 12.000 m2 telah dilakukan revaluasi pada bulan Januari 2020 dan menghasilkan LPK 001/1/1/WKN.07/KNL.01/01.00/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang menghasilkan nilai wajar sebesar Rp58.011.750.000,00. Tim Penilai KPKNL Jakarta I menjelaskan bahwa nilai tersebut tidak dapat dicatat dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 karena Berita Acara Survei Lapangan Tahun 2020, sehingga tidak akan pas secara kronologis masuk di Tahun 2019. Atas penjelasan tersebut, nilai sebesar Rp57.006.925.635,00 belum tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (Audited).

3. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp434,484,682,300,- (*empat ratus tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp333.268.229.912,- (*tiga ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*). mutasi tambah sebesar Rp160,131,064,113, (*seratus enam puluh milyar seratus tiga puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp58.914.611.725,- (*lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Peralatan dan Mesin	Rp333.268.229.912	Rp101,216,452,388	Rp434,484,682,300
Jumlah	Rp333.268.229.912	Rp101,216,452,388	Rp434,484,682,300

Mutasi tambah peralatan dan mesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo awal	Rp9.200.000	
Pembelian	Rp158,150,296,713	Rp298,612,555
Hibah (Masuk)	Rp211.175.485	
Reklasifikasi Masuk	Rp1.161.020.160	
Pengembangan Nilai Aset	Rp300.755.200	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp4.000	

- Saldo Awal → transaksi yang digunakan untuk membukukan peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan namun belum dicatat dan didaftarkan dalam buku/daftar BMN periode sebelumnya.
- Pembelian → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan.
- Hibah (masuk) → transaksi untuk membukukan perolehan peralatan dan mesin yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Reklasifikasi Masuk → transaksi pencatatan peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain
- Pengembangan nilai aset → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai peralatan dan mesin sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan / atau kuantitas

barang dikarenakan adanya ke salahan Pembukuan pada nilai / kuantitas.

Mutasi kurang peralatan dan mesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Hibah (Keluar)	336.425.155	
Penghapusan	104.565.000	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	20.462.857.976	
Transaksi Normalisasi BMN	203.620.218	
Transfer Keluar	36.451.538.074	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	1.786.923	
Reklasifikasi Keluar	1.161.20.160	

- Hibah (keluar) → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin sebagai akibat dari penyerahan BMN yang disebabkan barang telah diserahkan kepada instansi Pemerintah Daerah, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan/ atau lembaga lainnya yang dapat menerima hibah dari Pemerintah Pusat.
- Penghapusan → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin sebagai akibat dari pengalihan kepada pihak lain , dengan memperoleh penggantian dalam bentuk uang;
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya → transaksi atas perubahan kondisi ke rusak berat
- Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap → transaksi yang dilakukan untuk menihilkan data BMN yang terindikasi sebagai data tidak normal berdasarkan validasi data BMN tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK
- Transfer Keluar → merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN sebagai akibat dari penyerahan BMN ke Kuasa Pengguna Barang lain. Adapun rincian transaksi transfer keluar yaitu Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah Millenium Challenge Corporation kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru

Adapun akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp237,101,037,762,- (*dua ratus tiga puluh tujuh milyar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rp236,746,432,724	Rp354,605,038

4. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp157,938,995,269,- (*seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp157.167.081.859,- (*seratus lima puluh tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp2.304.385.023,- (*dua milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp1,532,471,613,- (*satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah*).

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Gedung dan Bangunan	Rp157.167.081.859	Rp771,913,410	Rp157,938,995,269
Jumlah	Rp157.167.081.859	Rp771,913,410	Rp157,938,995,269

Mutasi tambah gedung dan bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	Rp198.392.000	-
Pengembangan Nilai Aset	Rp2.105.993.023	

- Pembelian → transaksi perolehan gedung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan.
- Pengembangan Nilai Aset → transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) gedung dan bangunan yang

memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan.

Mutasi kurang gedung dan bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Kesalahan input IP	Rp1,532,471,613	

- Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Adapun akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18,822,558,857,- (*delapan belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rp18,822,558,857	-

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.020.002.566,- (*enam milyar dua puluh dua juta dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp8.129.746.566,- (*delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp301.087.000,- (*tiga ratus satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp2.410.831.000,- (*dua milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Jalan	Rp51.605.000	Rp301.087.000	Rp352.692.000
Irigasi	Rp2.450.323.000	(Rp2.410.831.000)	Rp39.492.000

Jaringan	Rp5.627.818.566	-	Rp5.627.818.566
Jumlah	Rp8.129.746.566	(Rp2.109.744.000)	Rp6.020.002.566

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Kesalahan input IP	Rp301.087.000	-

- Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Kesalahan input IP	Rp2.410.831.000	-

- Koreksi Kesalahan input IP → transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017 - 2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Adapun akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3,121,445,789,- (*tiga milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rp3,121,445,789	-

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp101.395.867.321,- (*seratus satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga*

ratus dua puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp5.379.109.730,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Mutasi tambah sebesar Rp96.169.041.106,- (sembilan puluh enam milyar seratus enam puluh sembilan juta empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp152.283.515,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah)

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp2.185.255.200	Rp95.119.666.942	Rp97.304.922.142
Aset Tetap Lainnya	Rp3.193.854.530	Rp897.090.649	Rp4.090.945.179
Jumlah	Rp5.379.109.730	Rp96.016.757.591	Rp101.395.867.321

1) Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo aset tetap dalam renovasi pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp97.304.922.142,- (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp2.185.255.200,- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah). Mutasi tambah sebesar Rp95.119.666.942,- (sembilan puluh lima milyar seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (nihil).

Mutasi tambah aset tetap dalam renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	Rp519.092.000	-
Pengembangan nilai aset	Rp94.600.574.942	-

- Pembelian → transaksi perolehan aset tetap dalam renovasi berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi
 - Pengembangan nilai aset → transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) aset tetap dalam renovasi yang menambah nilai buku sebelumnya berupa rumah dinas

Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jalan Denpasar milik Kementerian Sekretariat Negara dan pekerjaan penataan ruang kerja Kementerian PPN/Bappenas di gedung sewa.

2) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.090.945.179,- (*empat milyar sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp3.193.854.530,- (*tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah*). Mutasi tambah sebesar Rp1.049.374.164,- (*satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp152.283.515,- (*seratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah*)

Mutasi tambah aset tetap lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	Rp1.049.374.164	-

- Pembelian → transaksi perolehan aset tetap lainnya berupa Monografi, Lukisan Kanvas, Ukiran Logam dan Sejenisnya, Lukisan Cat Air Serta Barang Bercorak Kesenian Lainnya

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,- (*nihil*). Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019.

8. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp614,173,231,861,- (*enam ratus empat belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

Rp602.476.501.183,- (*enam ratus dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*). Mutasi tambah sebesar Rp39,049,630,845,- (*tiga puluh sembilan milyar empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp27.352.900.167,- (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp490.209.375.000	-	Rp490.209.375.000
Aset Tak Berwujud	Rp49.586.947.884	Rp6,196,364,555	Rp55,783,312,439
Barang Milik Negara Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah	Rp62.680.178.299	Rp5,500,366,123	Rp68,180,544,422
Jumlah	Rp602.476.501.183	Rp11,696,730,678	Rp614,173,231,861

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo aset kemitraan dengan pihak ketiga Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp490.209.375.000,- (*empat ratus sembilan puluh milyar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019.

2) Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp55,783,312,439,- (*lima puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp49.586.947.884,- (*empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*). Mutasi tambah sebesar Rp15,722,439,741,- (*lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp9.526.075.186,- (*sembilan*

milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Software	Rp42.498.350.595	Rp7,193,374,492	RP49,691,725,087
Lisensi	Rp7.088.597.289	(Rp997.009.937)	Rp6.091.587.352
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah	Rp49.586.947.884	Rp6,196,364,555	Rp55,783,312,439

Mutasi tambah aset tak berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	Rp12.003.613	-
Hibah (Masuk)	Rp 29.000.000	-
Pembelian	Rp12,768,306,128	-
Pengembangan Nilai Aset	Rp572.220.000	-
Perolehan/Penambahan KDP	1.009.690.000	-
Pengembangan KDP	1.331.220.000	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp1.240.910.000	-
Pengembangan Melalui KDP	Rp1.100.000.000	-

- Saldo Awal → transaksi yang digunakan untuk membukukan Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan namun belum dicatat dan didaftarkan dalam buku/daftar BMN periode sebelumnya.
- Hibah (Masuk) → transaksi untuk membukukan perolehan Aset Tak Berwujud yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Pembelian → transaksi perolehan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan.
- Pengembangan Nilai Aset → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi

kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan.

- Perolehan/Penambahan KDP → perolehan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin)
- Pengembangan KDP → pengembangan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBN yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin)
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP → transaksi perolehan aset tak berwujud dari hasil penyelesaian pembangunan berupa aset tak berwujud yang telah diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima berupa pengadaan aset tak berwujud pada kegiatan model outlook makro ekonomi Indonesia, Direktorat Perencanaan Makro
- Pengembangan Melalui KDP → Perolehan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin)

Mutasi kurang aset tak berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	9.526.075.186	
Pengembangan Melalui KDP	1.100.000.000	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.240.910.000	

- Transfer Keluar → merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus Aset Tak Berwujud sebagai akibat dari penyerahan Aset Tak Berwujud ke Kuasa Pengguna Barang lain.
- Pengembangan Melalui KDP → pengembangan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBN yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (termin)
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP → transaksi perolehan aset tak berwujud dari hasil penyelesaian pembangunan berupa aset tak berwujud yang telah diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima berupa pengadaan aset tak berwujud.

Adapun akumulasi amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35,904,355,326,- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rp35,904,355,326	-

3) Barang Milik Negara Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 sebesar Rp68,180,544,422,- (*enam puluh delapan milyar seratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp62.680.178.299,- (*enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*). Terdapat mutasi tambah sebesar Rp20,986,281,104,- (*dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp15.485.914.981,- (*lima belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah*).

Mutasi tambah Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	Rp20,986,281,104	

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya → transaksi reklasifikasi yang disebabkan karena adanya Barang Milik Negara yang rusak berat dan akan diusulkan untuk penghapusan dengan cara pemindahtanganan.

Mutasi kurang Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp15.472.571.731	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp13.343.250	

- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) → mengeluarkan Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat atau usang yang telah dimohonkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang dari neraca dan melakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat
- Penghapusan (BMN yang dihentikan) → transaksi yang digunakan untuk menghapuskan BMN kondisi rusak berat atau usang dari Daftar Barang Rusak Berat

Akumulasi penyusutan dan amortisasi Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6,977,126,803,- (*enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Rp6,977,126,803	-

9. Barang Bersejarah

Sampai dengan 31 Desember 2019 Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki aset berupa barang bersejarah.

3. Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/Bappenas Per 31 Desember 2019

a. Barang Milik Negara per akun neraca

Nilai Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2,584,698,154,491,- (*dua triliun lima*

ratus delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), nilai Barang Milik Negara dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai Barang Milik Negara dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	88,524,541,338	3.42%	-	0.00%	88,524,541,338	3.42%
	Sub Jumlah (1)	88,524,541,338	3.42%	-	0.00%	88,524,541,338	3.42%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	1,484,443,750,305	57.43%	-	0.00%	1,484,443,750,305	57.42%
2	Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	16.78%	710,996,970	199.50%	434,484,682,300	16.81%
3	Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	6.11%	-	0.00%	157,938,995,269	6.11%
4	Jalan	352,692,000	0.01%	-	0.00%	352,692,000	0.01%
5	Irigasi	39,492,000	0.00%	-	0.00%	39,492,000	0.00%
6	Jaringan	5,627,818,566	0.22%	-	0.00%	5,627,818,566	0.22%
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	97,304,922,142	3.76%	-	0.00%	97,304,922,142	3.76%
8	Aset Tetap Lainnya	4,090,945,179	0.16%	-	0.00%	4,090,945,179	0.16%
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(236,746,432,724)	-9.16%	(354,605,038)	-99.50%	(237,101,037,762)	-9.17%
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,822,558,857)	-0.73%	-	0.00%	(18,822,558,857)	-0.73%
12	Akumulasi Penyusutan Jalan	(125,961,430)	0.00%	-	0.00%	(125,961,430)	0.00%
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(2,752,535)	0.00%	-	0.00%	(2,752,535)	0.00%
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,992,731,824)	-0.12%	-	0.00%	(2,992,731,824)	-0.12%
	Sub Jumlah (2)	1,924,881,863,421	74.47%	356,391,932	100.00%	1,925,238,255,353	74.48%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	18.97%	-	0.00%	490,209,375,000	18.96%
2	Software	49,691,725,087	1.92%	-	0.00%	49,691,725,087	1.92%
3	Lisensi	6,091,587,352	0.24%	-	0.00%	6,091,587,352	0.24%

4	Aset Tak berwujud Dalam Pengerjaan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5	Aset Tetap Yang Digunakan	68,180,544,422	2.64%	313,500	0.09%	68,180,857,922	2.64%
6	Aset Tak berwujud yg tdk digunakan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	(6,977,126,803)	-0.27%	(313,500)	-0.09%	(6,977,440,303)	-0.27%
8	Akumulasi Amortisasi Software	(33,617,243,814)	-1.30%	-	0.00%	(33,617,243,814)	-1.30%
9	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,287,111,512)	-0.09%	-	0.00%	(2,287,111,512)	-0.09%
10	Akumulasi Amortisasi ATB Yang Tidak Digunakan	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	Sub Jumlah (3)	571,291,749,732	22.10%	-	0.00%	571,291,749,732	22.10%
	Total	2,584,698,154,491		356,391,932		2,585,054,546,423	

Rincian nilai akumulasi penyusutan Barang Milik Negara pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	236,746,432,724	78.50%	354,605,038	99.91%	237,101,037,762	78.53%
2	Gedung dan Bangunan	18,822,558,857	6.24%	-	0.00%	18,822,558,857	6.23%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,121,445,789	1.04%	-	0.00%	3,121,445,789	1.03%
4	Aset Tetap Lainnya	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	Sub Jumlah (I)	258,690,437,370	85.78%	354,605,038	99.91%	259,045,042,408	85.80%
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2	Aset Tetap Yang Digunakan	6,977,126,803	2.31%	313,500	0.09%	6,977,440,303	2.31%
3	Aset Tak Berwujud	35,904,355,326	11.91%	-	0.00%	35,904,355,326	11.89%
	Sub Jumlah (II)	42,881,482,129	14.22%	313,500	0.09%	42,881,795,629	14.20%
	Total	301,571,919,499		354,918,538		301,926,838,037	

b. Perbandingan Nilai Barang Milik Negara pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai Barang Milik Negara yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	88,524,541,338	88,524,541,338	0
2	Tanah	1,484,443,750,305	1,484,443,750,305	0
3	Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	433,773,685,330	0
4	Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	157,938,995,269	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,020,002,566	6,020,002,566	0
6	Aset Tetap Lainnya	101,395,867,321	101,395,867,321	0
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0	0
8	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	490,209,375,000	0
9	Aset Tak Berwujud	55,783,312,439	55,783,312,439	0
10	Aset Lain-lain *)	68,180,544,422	68,180,544,422	0
11	Akumulasi Penyusutan	(301,571,919,499)	(301,571,919,499)	-
Total		2,584,698,154,491	2,584,698,154,491	0

V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara

Perkembangan nilai Barang Milik Negara secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Tahunan TA 2015 (Audited)	558,232,109,027	-	-
2	Laporan Tahunan TA 2016 (Audited)	552,281,197,459	(5,950,911,568)	-1.07%
3	Laporan Tahunan TA 2017 (Audited)	2,672,286,982,314	2,120,005,784,855	383.86%
4	Laporan Tahunan TA 2018 (Audited)	3,195,233,118,855	522,946,136,541	19.57%
5	Laporan Tahunan TA 2019 (Audited)	2,584,698,154,491	(610,534,964,364)	-19.11%

2. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Nilai Barang Milik Negara yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah	1.193.871.803.000	163.905.942.000
2	Peralatan dan Mesin	129.046.856.886	143.976.676.141
3	Gedung dan Bangunan	139.912.502.308	10.765.963.498
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	397.931.267	7.731.815.299
5	Aset tetap lainnya	2.887.040.750	229.200.080
6	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490.209.375.000	-
7	Aset Tak Berwujud	2.400.998.755	42.315.062.168
8	Aset Lain-Lain	-	63.873.985.294
Jumlah		1.958.726.507.966	432.798.644.480

Penjelasan atas Barang Milik Negara yang belum ditetapkan status penggunaannya, yaitu:

- 1) Tanah → peruntukan tanah selain kantor belum dilakukan penetapan status penggunaan karena saat ini masih dalam proses verifikasi luasan tanah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Peralatan dan Mesin → yang belum dilakukan penetapan status penggunaan adalah peralatan dan mesin perolehan tahun 2017, 2018 dan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang akan dilakukan penetapan status pada tahun 2019.
- 3) Gedung dan Bangunan → gedung selain kantor belum dilakukan penetapan status penggunaan karena saat ini masih dalam proses verifikasi luasan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan → yang belum dilakukan penetapan status penggunaan adalah jalan, irigasi dan jaringan perolehan tahun 2017, 2018 dan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang akan dilakukan penetapan status pada tahun 2019.
- 5) Aset Tetap Lainnya → yang belum dilakukan penetapan status penggunaan adalah aset tetap lainnya perolehan tahun 2017 dan 2018 yang akan dilakukan penetapan status pada tahun 2019.
- 6) Aset Tak Berwujud → yang belum dilakukan penetapan status penggunaan adalah aset tak berwujud perolehan tahun 2017, 2018 dan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang akan dilakukan penetapan status pada tahun 2019.
- 7) Aset Lain-Lain → aset lain-lain berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial belum dilakukan penetapan status penggunaan karena saat

ini masih dalam proses verifikasi luasan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

b. Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

c. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Nilai Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5,649,987,867,- (*lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).

d. Catatan Penting Lainnya

1. Inventarisasi Tanah

Terkait akun tanah, sebagai tindak lanjut temuan BPK Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2016 telah melakukan inventarisasi tanah sesuai rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 nomor 45B/LHP/XV/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Metode inventarisasi yang dilakukan yaitu:

- Melakukan identifikasi dokumen sertifikat hak pakai atas tanah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian PPN/Bappenas;
- Melakukan pengumpulan dokumen sertifikat hak milik/surat perjanjian sewa beli/surat keterangan tanda lunas/SK Golongan III/surat penghapusan dan pelepasan hak atas tanah/surat perjanjian pembayaran ganti rugi tanah;
- Melakukan inventarisasi fisik (pengukuran) sisa tanah Kementerian PPN/Bappenas berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- Melakukan penyandingan data luasan tanah antara SIMAK-BMN dengan hasil inventarisasi.

Hasil inventarisasi tersebut yaitu:

No	Nama BMN	Luas SIMAK-BMN (M2)	Luas Hasil Inventarisasi (M2)	Nomor Sertifikat Hak Pakai	Lokasi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	160	160	1	Sawangan, Depok	Rumah Negara
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	160	160	1	Sawangan, Depok	Rumah Negara
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	160	160	1	Sawangan, Depok	Rumah Negara
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	140	140	1	Sawangan, Depok	Rumah Negara
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	306	208	1	Sawangan, Depok	Tanah sisa blok A belakang rumah A-41 s.d A-46
6	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	22.401	1.853	1	Sawangan, Depok	Fasum lainnya
7	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1.483	1.524	1	Sawangan, Depok	Ruang serbaguna
8	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	153	153	1	Sawangan, Depok	Posyandu
9	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka	1.470	-	1	Sawangan, Depok	-
10	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1.753	1.789	1	Sawangan, Depok	Masjid
11	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	365	298	1	Sawangan, Depok	PDAM
12	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik	100	91	1	Sawangan, Depok	Gardu PLN

13	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	18.948	1	Sawangan, Depok	Jalan
14	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	464	1	Sawangan, Depok	Tower PDAM
15	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	155	1	Sawangan, Depok	Sekolah TK
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	173	1	Sawangan, Depok	Kavling kosong antara rumah C-59 dengan B-100
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	173	1	Sawangan, Depok	Tanah sisa antara blok A-146 dengan RTH
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	88	1	Sawangan, Depok	Kavling kosong antara blok A-129 dengan A-118
19	Tanah Lapangan Tenis	-	1.470	1	Sawangan, Depok	Lapangan tenis
20	Tanah Untuk Taman Lainnya	-	170	1	Sawangan, Depok	Taman/RTH
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	78	92	166	Tanjung Duren, Jakarta Barat	Posyandu
22	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	96	400	166	Tanjung Duren, Jakarta Barat	Jalan
23	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	-	142	166	Tanjung Duren, Jakarta Barat	Tanah fasos/fasum lainnya
24	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka	1.584	-	370, 371 & 372	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	-
25	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	149	371	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	Jalan
26	Tanah Lapangan Tenis	-	778	371	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	Lapangan tenis
27	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	119	372	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	Jalan
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	742	-	16, 17 & 18	Buncit Raya, Jakarta Selatan	-
29	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	1.305	-	16, 17 & 18	Buncit Raya, Jakarta Selatan	-
30	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik	304	49	17	Buncit Raya, Jakarta Selatan	Gardu listrik
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	135	203	26	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan	Rumah Negara Gol II

13	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	18.948	1	Sawangan, Depok	Jalan
14	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	464	1	Sawangan, Depok	Tower PDAM
15	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	155	1	Sawangan, Depok	Sekolah TK
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	173	1	Sawangan, Depok	Kavling kosong antara rumah C-59 dengan B-100
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	173	1	Sawangan, Depok	Tanah sisa antara blok A-146 dengan RTH
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	88	1	Sawangan, Depok	Kavling kosong antara blok A-129 dengan A-118
19	Tanah Lapangan Tenis	-	1.470	1	Sawangan, Depok	Lapangan tenis
20	Tanah Untuk Taman Lainnya	-	170	1	Sawangan, Depok	Taman/RTH
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	78	92	166	Tanjung Duren, Jakarta Barat	Posyandu
22	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	96	400	166	Tanjung Duren, Jakarta Barat	Jalan
23	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	-	142	166	Tanjung Duren, Jakarta Barat	Tanah fasos/fasum lainnya
24	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka	1.584	-	370, 371 & 372	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	-
25	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	149	371	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	Jalan
26	Tanah Lapangan Tenis	-	778	371	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	Lapangan tenis
27	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	119	372	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	Jalan
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	742	-	16, 17 & 18	Buncit Raya, Jakarta Selatan	-
29	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	1.305	-	16, 17 & 18	Buncit Raya, Jakarta Selatan	-
30	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik	304	49	17	Buncit Raya, Jakarta Selatan	Gardu listrik
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	135	203	26	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan	Rumah Negara Gol II

32	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	220	-	24 & 26	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan	-
33	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	581	153	24	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan	Jalan
34	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	-	68	24	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan	Pos keamanan
35	Tanah Untuk Taman Lainnya	-	151	26	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan	Taman
36	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	1.220	-	28	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	-
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	607	28	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	Gedung arsip
38	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	545	28	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	Jalan
39	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik	-	93	25	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	-
40	Tanah Untuk Taman Lainnya	-	146		Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	-
41	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	-	1.052		Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	-
42	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	-	474		Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	-
43	-	-	-	36	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	Tidak ada sisa tanah
44	-	-	-	37	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	Tidak ada sisa tanah
45	-	-	-	45	Buncit IV-VII, Jakarta Selatan	Tidak ada sisa tanah
46	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	3.935	-	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	-
47	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka	1.170	-	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	-
48	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	3.311	4.551	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	Jalan
49	Tanah Lapangan Tennis	-	748	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	Lapangan tenis
50	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik	-	174	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	Gardu listrik
51	Tanah Untuk Bangunan Masjid	-	333	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	Musholla
52	Tanah Untuk Taman Lainnya	-	160	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	Taman/RTH
53	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	-	1.623	31	Siaga Raya, Jakarta Selatan	Rumah dinas eselon I

54	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga Terbuka	1.125	-	61, 62, 63 & 64	Buncit Pejaten, Jakarta Selatan	
55	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	208	61	Buncit Pejaten, Jakarta Selatan	Kavling kosong
56	Tanah Lapangan Tenis	-	932	62	Buncit Pejaten, Jakarta Selatan	Lapangan tenis
57	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Gardu Listrik	-	280	63	Buncit Pejaten, Jakarta Selatan	Gardu listrik + lahan kosong
58	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	255	-	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	-
59	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	70	172	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	Puskesmas
60	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	144	-	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	-
61	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	2.486	-	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	-
62	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	1.885	-	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	-
63	Tanah Untuk Jalanan Khusus/Komplek	2.016	-	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	-
64	Tanah Bangunan Gudang	-	430	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	Gudang besar
65	Tanah Bangunan Gudang	-	152	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	Gudang kecil
66	Tanah Untuk Bangunan Masjid	-	228	96	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan	Musholla
67	-	-	-	29	Kalibata Utara, Jakarta Selatan	Tidak ada sisa tanah
68	-	-	-	30	Kalibata Utara, Jakarta Selatan	Tidak ada sisa tanah
69	Tanah Bangunan Gudang	523	523	599	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta Barat	-
70	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	28.172	28.172	10 & 11	Jati Sampurna, Bekasi	-
71	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.205	2.035	12, 13 & 14	Jati Sampurna, Bekasi	-
72	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	27.022	27.022	4 & 5	Jati Sari, Bekasi	-

73	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	11.943	12.000	7	Jati Sari, Bekasi	-
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.334	2.334	153 & 154	Madiun No.4-6, Jakarta Pusat	-
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.437	1.437	232	Taman Suropati No.1, Jakarta Pusat	-
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	846	846	268	Sunda Kelapa No.9, Jakarta Pusat	-
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.905	2.905	285 & 309	Taman Suropati No.2A, Jakarta Pusat	-
78	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	678	678	287	Madiun No.2, Jakarta Pusat	-
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.218	4.218	311	Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat	-
80	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	726	726	563	Proklamasi No.70, Jakarta Pusat	-
81	Aset Kemitraan	3.750	3.750	231	Wisma Bakrie, Jakarta Selatan	-
TOTAL		138.072	130.035			

Sehingga luas tanah per 31 Desember 2017 yang semula seluas 138.072 m2 menjadi seluas 130.035 m2.

Terhadap nilai tanah Kementerian PPN/Bappenas belum dilakukan koreksi luasan dan nilai tanah pada neraca SIMAK-BMN sesuai hasil inventarisasi tersebut, dikarenakan:

- a. Kementerian PPN/Bappenas belum mendapatkan tanggapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas surat:
 - 1) nomor 0064/SES/01/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan nomor 4956/SES/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 hal permohonan masukan/arahan/klarifikasi (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat).
 - 2) nomor 0063/SES/01/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan nomor 4957/SES/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 hal

permohonan masukan/arahan/klarifikasi (Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan).

3) nomor 4924/B.05/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 hal
pengukuran fasos dan fasum serta surat nomor
4938/B.05/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 hal permohonan
revisi gambar situasi (Kantor Pertanahan Kota Depok).

b. Sesuai arahan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan, setelah dilakukan
pengukuran/perhitungan atas luas tanah Kementerian
PPN/Bappenas oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian
PPN/Bappenas akan menindaklanjutinya dengan melakukan
koordinasi dengan Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan selaku pihak yang
berwenang dalam melakukan penilaian tanah.

2. Inventarisasi Peralatan dan Mesin

Terkait akun peralatan dan mesin, sebagai tindak lanjut temuan BPK
Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2016 telah melakukan
inventarisasi peralatan dan mesin sesuai rekomendasi BPK pada
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 nomor
45A/LHP/XV/05/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Metode inventarisasi yang dilakukan yaitu:

- a. Membentuk tim inventarisasi melalui SK Sesmen PPN/Sestama
Bappenas nomor KEP.91/SES/HK/06/2016 tanggal 8 Juni 2016;
- b. Melakukan kegiatan pendataan dan identifikasi BMN di ruang
kerja dan ruang penunjang dengan menghitung jumlah,
menempelkan label dan mencatat hasil inventarisasi; dan
- c. membandingkan data hasil inventarisasi dengan data
awal/dokumen sumber/tanda terima/bukti pengembalian.

Terhadap kuantitas peralatan dan mesin Kementerian
PPN/Bappenas belum dilakukan koreksi pada neraca SIMAK-BMN
sesuai hasil inventarisasi tersebut (hasil inventarisasi terlampir),
dikarenakan:

- a. Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Unit Kerja terkait atas selisih kurang BMN yang belum ditemukan sesuai dokumen sumber/tanda terima/bukti pengembalian.
- b. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan penilaian atas selisih lebih BMN yang ditemukan.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman Pengelola Barang Hibah di Unit Kerja dan Mitra Pembangunan tentang proses serah terima hibah langsung berupa barang.
2. Kurangnya pemahaman Pemilik Rumah terkait kewajiban melaporkan atas pengurusan/pemecahan sertifikat.
3. Kurangnya pemahaman Unit Kerja dalam pengelolaan dokumen administrasi Barang Milik Negara di lingkungan kerjanya.

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif terkait pengelolaan Barang Milik Negara kepada pihak-pihak terkait berupa:

1. Rapat koordinasi antara Biro Umum dengan Pengelola Barang Hibah
2. Membuat surat kepada Pemilik Rumah
3. Mengadakan Workshop/Pelatihan/Bimbingan Teknis terkait administrasi pengelolaan BMN

VI. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *"Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah."*

- (2) *Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional."*

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas Barang Milik Negara berupa aset tetap:

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan, dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - 1) jalan dan jembatan, dan
 - 2) bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain aset tetap tersebut, penilaian kembali Barang Milik Negara juga dilaksanakan terhadap aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan (aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai tahun 2017 dan selesai tahun 2017.

Rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Per 31 Desember 2019

No	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN	
			Nilai Buku Administrasi	Nilai Wajar
1	Tanah	20	1,178,298,859,500	1,847,987,120,000
2	Gedung dan Bangunan	37	39,501,621,094	147,622,414,000
3	JJBA	4	1,820,063,572	2,501,928,000
	Total	61	1,219,620,544,166	1,998,111,462,000

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S- 44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017- 2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;
2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 61 NUP dengan total nilai kenaikan/penurunan nilai BMN sebesar Rp122,390,105,000 yang berasal dari

nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp1,998,111,462,000 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp2,120,501,567,000

Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Per 31 Desember 2019

No	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN		Kenalkan/ Penurunan
			Nilai Wajar Sebelum Perbaikan	Nilai Wajar Setelah Perbaikan	
1	Tanah	20	1,847,987,120,000	1,973,648,301,000	125,661,181,000
2	Gedung & Bangunan	37	147,622,414,000	146,461,082,000	-1,161,332,000
3	JJBA	4	2,501,928,000	392,184,000	-2,109,744,000
	Total	61	1,998,111,462,000	2,120,501,567,000	122,390,105,000

Jakarta, Mei 2020
Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Himawan Hariyoga

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
131111	Tanah		84,395	1,484,443,750,305
201	TANAH		84,395	1,484,443,750,305
	000 Saldo Awal		84,395	1,358,782,569,305
	245 Koreksi Nilai barang Berlebih		0	0
	225 Koreksi Kesalahan input IP		0	125,661,181,000
132111	Peralatan dan Mesin		26,976	433,773,685,330
301	ALAT BESAR		70	14,989,873,573
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan		(3)	(19,583,300)
	000 Saldo Awal		53	10,964,838,805
	101 Pembelian		20	3,901,303,068
	202 Pengembangan Nilai Aset		0	143,315,000
302	ALAT ANGKUTAN		190	34,739,716,062
	301 Penghapusan		(2)	(104,565,000)
	202 Pengembangan Nilai Aset		0	85,525,000
	000 Saldo Awal		191	34,756,171,062
	101 Pembelian		1	2,585,000
	209 Transaksi Normalisasi BMN		0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		223	1,571,902,355
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan		(129)	(338,111,544)
	209 Transaksi Normalisasi BMN		0	0
	101 Pembelian		18	447,192,760
	000 Saldo Awal		334	1,462,821,139
304	ALAT PERTANIAN		12	102,350,690
	101 Pembelian		2	7,700,000
	000 Saldo Awal		10	94,650,690

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANITTAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	18,634	149,374,499,335
202	Pengembangan Nilai Aset	0	43,335,000
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(2)	(1,786,923)
000	Saldo Awal	15,869	90,244,002,786
209	Transaksi Normalisasi BMN	(85)	(203,620,218)
401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(2,247)	(10,350,613,647)
101	Pembelian	5,279	70,218,189,757
103	Hibah (Masuk)	4	18,405,235
100	Koreksi Saldo Awal	1	9,200,000
303	Hibah (Keluar)	(99)	(336,425,155)
302	Transfer Keluar	(86)	(266,187,500)
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1,886	38,261,924,266
401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(180)	(5,365,649,484)
000	Saldo Awal	1,236	32,305,782,083
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
101	Pembelian	834	12,748,674,783
202	Pengembangan Nilai Aset	0	22,000,000
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
302	Transfer Keluar	(4)	(1,448,983,116)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	42	1,996,959,028
000	Saldo Awal	57	2,045,418,428
401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(15)	(48,459,400)
308	ALAT LABORATORIUM	44	1,559,349,322
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_crbtn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
101	Pembelian	2	100,452,000
000	Saldo Awal	42	1,458,897,322
309	ALAT PERSENUJATAAN	28	249,277,054
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(7)	(38,715,000)
000	Saldo Awal	35	287,992,054
310	KOMPUTER	5,795	189,242,722,728
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	4,000
103	Hibah (Masuk)	8	192,770,250
202	Pengembangan Nilai Aset	0	6,580,200
000	Saldo Awal	4,996	157,497,518,592
101	Pembelian	1,274	70,583,942,745
401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(449)	(4,301,725,601)
107	Reklasifikasi Masuk	1	1,161,020,160
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(1,161,020,160)
302	Transfer Keluar	(33)	(34,736,367,458)
311	ALAT EKSPLORASI	4	713,636,220
000	Saldo Awal	4	713,636,220
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	36	645,085,497
101	Pembelian	2	93,005,000
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_crbtnn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
000	Saldo Awal		34	552,083,497
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi		0	0
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		1	1,924,000
000	Saldo Awal		1	1,924,000
318	RAMBU - RAMBU		0	0
000	Saldo Awal		0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA		11	324,562,200
000	Saldo Awal		9	277,310,600
101	Pembelian		2	47,251,600
133111	Gedung dan Bangunan		41	157,938,995,269
401	BANGUNAN GEDUNG		34	154,016,706,596
101	Pembelian		1	198,392,000
000	Saldo Awal		34	154,254,820,186
202	Pengembangan Nilai Aset		0	2,105,993,023
225	Koreksi Kesalahan input IP		0	(2,171,359,000)
401	Penghentiaan Aset Dan Penggunaan		(1)	(371,139,613)
402	MONUMEN		1	1,854,000
000	Saldo Awal		1	3,800,000
225	Koreksi Kesalahan input IP		0	(1,946,000)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		6	3,920,434,673
000	Saldo Awal		6	2,908,461,673
225	Koreksi Kesalahan input IP		0	1,011,973,000
134111	Jalan dan Jembatan		55	352,692,000
501	JALAN DAN JEMBATAN		55	352,692,000
000	Saldo Awal		55	51,605,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_crbtnn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	301,087,000
134112		Irigasi	2	39,492,000
502		BANGUNAN AIR	2	39,492,000
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,410,831,000)
	000	Saldo Awal	2	2,450,323,000
134113		Jaringan	71	5,627,818,566
503		INSTALASI	65	4,653,711,476
	000	Saldo Awal	65	4,653,711,476
504		JARINGAN	6	974,107,090
	000	Saldo Awal	6	974,107,090
135111		Aset Tetap Renovasi	10	97,304,922,142
607		ASET TETAP DALAM RENOVASI	10	97,304,922,142
	101	Pembelian	2	519,092,000
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	94,600,574,942
	000	Saldo Awal	8	2,185,255,200
135121		Aset Tetap Lainnya	13,490	4,090,945,179
601		BAHAN PERPUSTAKAAN	13,369	3,723,548,283
	401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3,084)	(152,283,515)
	000	Saldo Awal	16,361	3,040,273,530
	101	Pembelian	92	835,558,268
602		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	121	367,396,896
	101	Pembelian	15	213,815,896
	000	Saldo Awal	106	153,581,000
161111		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3,750	490,209,375,000
201		TANAH	3,750	490,209,375,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
000	Saldo Awal		3,750	490,209,375,000
803	ASET KEMITRAAN		0	0
000	Saldo Awal		0	0
162151	Software		725	49,691,725,087
801	ASET TAK BERWUJUD		725	49,691,725,087
100	Koreksi Saldo Awal		1	12,003,613
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		2	1,240,910,000
000	Saldo Awal		664	42,498,350,595
103	Hibah (Masuk)		1	29,000,000
208	Pengembangan Melalui KDP		0	1,100,000,000
101	Pembelian		102	12,587,876,628
202	Pengembangan Nilai Aset		0	572,220,000
302	Transfer Keluar		(45)	(8,348,635,749)
209	Transaksi Normalisasi BMN		0	0
162161	Lisensi		108	6,091,587,352
801	ASET TAK BERWUJUD		108	6,091,587,352
302	Transfer Keluar		(3)	(1,177,439,437)
000	Saldo Awal		100	7,088,597,289
101	Pembelian		11	180,429,500
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		0	0
802	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan		0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP		0	1,009,690,000
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi		0	(2,340,910,000)
503	Pengembangan KDP		0	1,331,220,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		53,076	68,180,544,422

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
201	TANAH		49,927	59,399,397,125
000	Saldo Awal		49,927	59,399,397,125
301	ALAT BESAR		6	2,063,250,536
000	Saldo Awal		6	2,063,250,536
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		3	19,583,300
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(3)	(19,583,300)
302	ALAT ANGKUTAN		4	324,188,750
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)		(1)	(13,343,250)
000	Saldo Awal		5	337,532,000
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		1	825,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(128)	(337,286,544)
000	Saldo Awal		0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		129	338,111,544
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
304	ALAT PERTANIAN		0	0
000	Saldo Awal		0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		23	62,487,335
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		2,247	10,350,613,647
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(2,225)	(10,288,186,041)
000	Saldo Awal		1	59,729
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		8	4,635,520,945
000	Saldo Awal		0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		180	5,365,649,484
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(172)	(730,128,539)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(15)	(48,459,400)
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15	48,459,400
308	ALAT LABORATORIUM	0	0
000	Saldo Awal	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7	38,715,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(7)	(38,715,000)
310	KOMPUTER	12	358,097,004
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	449	4,301,725,601
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(440)	(4,010,212,907)
000	Saldo Awal	3	66,584,310
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0	0
318	RAMBU - RAMBU	4	1,540,000
000	Saldo Awal	4	1,540,000
401	BANGUNAN GEDUNG	6	1,012,928,212
000	Saldo Awal	5	641,788,599
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	371,139,613
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	3,084	152,283,515
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3,084	152,283,515
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0
000	Saldo Awal	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:57 AM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	170,026,000
000	Saldo Awal	1	170,026,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0
801	ASET TAK BERWUJUD	0	0
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0	0
000	Saldo Awal	0	0
TOTAL		182,699	2,797,745,532,652

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_crbmn_ekstra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
132111	Peralatan dan Mesin	2,196	710,996,970
301	ALAT BESAR	2	495,000
	000 Saldo Awal	2	495,000
302	ALAT ANGKUTAN	1	880,000
	000 Saldo Awal	1	218,000
	101 Pembelian	1	880,000
	401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(218,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7	2,053,700
	000 Saldo Awal	12	1,761,100
	101 Pembelian	3	1,546,600
	401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(8)	(1,254,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1,243	435,492,107
	000 Saldo Awal	2,357	425,597,282
	101 Pembelian	321	186,492,855
	401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1,435)	(176,598,030)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	781	151,315,892
	000 Saldo Awal	779	125,906,392
	101 Pembelian	46	29,342,500
	401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(44)	(3,933,000)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5	2,783,000
	000 Saldo Awal	4	1,343,100
	101 Pembelian	2	1,650,000
	401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(210,100)
308	ALAT LABORATORIUM	12	9,099,000
	000 Saldo Awal	12	9,099,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:58 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_crbmn_ekstra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
309		ALAT PERSENJATAAN	7	4,384,650
000		Saldo Awal		10,428,050
101		Pembelian	6	3,834,600
401		Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(82)	(9,878,000)
310		KOMPUTER	124	94,669,650
000		Saldo Awal	48	22,285,739
101		Pembelian	83	73,091,000
401		Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(7)	(707,089)
315		ALAT KESELAMATAN KERJA	14	9,823,971
000		Saldo Awal	11	8,048,971
101		Pembelian	3	1,775,000
133111		Gedung dan Bangunan	0	0
401		BANGUNAN GEDUNG	0	0
000		Saldo Awal	0	0
166112		Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2	313,500
302		ALAT ANGKUTAN	0	0
188		Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	218,000
396		Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(1)	(218,000)
303		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0
000		Saldo Awal	0	0
188		Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	8	1,254,000
396		Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(8)	(1,254,000)
305		ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1	231,000
000		Saldo Awal	0	0
188		Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1,435	176,598,030

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 10:58 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_crbtnm_ekstra_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANITTAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
395	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(1,434)	(176,367,030)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1	82,500
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	44	3,933,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(43)	(3,850,500)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	210,100
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(1)	(210,100)
308	ALAT LABORATORIUM	0	0
000	Saldo Awal	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	82	9,878,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(82)	(9,878,000)
310	KOMPUTER	0	0
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7	707,089
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(7)	(707,089)
TOTAL		2,198	711,310,470

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
131111	Tanah		84,395	1,484,443,750,305
201	TANAH		84,395	1,484,443,750,305
	000 Saldo Awal		84,395	1,358,782,569,305
	225 Koreksi Kesalahan input IP		0	125,661,181,000
	245 Koreksi Nilai barang Berlebih		0	0
132111	Peralatan dan Mesin		29,172	434,484,682,300
301	ALAT BESAR		72	14,990,368,573
	000 Saldo Awal		55	10,965,333,805
	101 Pembelian		20	3,901,303,068
	202 Pengembangan Nilai Aset		0	143,315,000
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan		(3)	(19,583,300)
302	ALAT ANGKUTAN		191	34,740,596,062
	000 Saldo Awal		192	34,756,389,062
	101 Pembelian		2	3,465,000
	202 Pengembangan Nilai Aset		0	85,525,000
	209 Transaksi Normalisasi BMN		0	0
	301 Penghapusan		(2)	(104,565,000)
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan		(1)	(218,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		230	1,573,956,055
	000 Saldo Awal		346	1,464,582,239
	101 Pembelian		21	448,739,360
	209 Transaksi Normalisasi BMN		0	0
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan		(137)	(339,365,544)
304	ALAT PERTANIAN		12	102,350,690
	000 Saldo Awal		10	94,650,690

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
101	Pembelian	2	7,700,000
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	19,877	149,809,991,442
000	Saldo Awal	18,226	90,669,600,068
100	Koreksi Saldo Awal	1	9,200,000
101	Pembelian	5,600	70,404,682,612
103	Hibah (Masuk)	4	18,405,235
202	Pengembangan Nilai Aset	0	43,335,000
209	Transaksi Normalisasi BMN	(85)	(203,620,218)
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
302	Transfer Keluar	(86)	(266,187,500)
303	Hibah (Keluar)	(99)	(336,425,155)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(2)	(1,786,923)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(3,682)	(10,527,211,677)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2,667	38,413,140,158
000	Saldo Awal	2,015	32,431,688,475
101	Pembelian	880	12,778,017,283
202	Pengembangan Nilai Aset	0	22,000,000
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
302	Transfer Keluar	(4)	(1,448,983,116)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(224)	(5,369,582,484)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	47	1,999,742,028
000	Saldo Awal	61	2,046,761,528
101	Pembelian	2	1,650,000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(16)	(48,669,500)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	JENIS TRANSAKSI		KUANITAS	NILAI
	1	2	3	4
308	ALAT LABORATORIUM		56	1,568,448,322
000	Saldo Awal		54	1,467,996,322
101	Pembelian		2	100,452,000
209	Transaksi Normalisasi BMN		0	0
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi		0	0
309	ALAT PERSENUJATAAN		35	253,661,704
000	Saldo Awal		118	298,420,104
101	Pembelian		6	3,834,600
209	Transaksi Normalisasi BMN		0	0
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi		0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		(89)	(48,593,000)
310	KOMPUTER		5,919	189,337,392,378
000	Saldo Awal		5,044	157,519,804,331
101	Pembelian		1,357	70,657,033,745
103	Hibah (Masuk)		8	192,770,250
107	Reklasifikasi Masuk		1	1,161,020,160
202	Pengembangan Nilai Aset		0	6,580,200
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		0	4,000
209	Transaksi Normalisasi BMN		0	0
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi		0	0
302	Transfer Keluar		(33)	(34,736,367,458)
304	Reklasifikasi Keluar		(2)	(1,161,020,160)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		(456)	(4,302,432,690)
311	ALAT EKSPLORASI		4	713,636,220
000	Saldo Awal		4	713,636,220

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
315		ALAT KESELAMATAN KERJA	50	654,912,468
	000	Saldo Awal	45	560,132,468
	101	Pembelian	5	94,780,000
	209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
317		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	1,924,000
	000	Saldo Awal	1	1,924,000
318		RAMBU - RAMBU	0	0
	000	Saldo Awal	0	0
319		PERALATAN OLAH RAGA	11	324,562,200
	000	Saldo Awal	9	277,310,600
	101	Pembelian	2	47,251,600
133111		Gedung dan Bangunan	41	157,938,995,269
401		BANGUNAN GEDUNG	34	154,016,706,596
	000	Saldo Awal	34	154,254,820,186
	101	Pembelian	1	198,392,000
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	2,105,993,023
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,171,359,000)
	401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(1)	(371,139,613)
402		MONUMEN	1	1,854,000
	000	Saldo Awal	1	3,800,000
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(1,946,000)
404		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	3,920,434,673
	000	Saldo Awal	6	2,908,461,673
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	1,011,973,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
134111		Jalan dan Jembatan	55	352,692,000
501		JALAN DAN JEMBATAN	55	352,692,000
	000	Saldo Awal	55	51,605,000
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	301,087,000
134112		Irigasi	2	39,492,000
502		BANGUNAN AIR	2	39,492,000
	000	Saldo Awal	2	2,450,323,000
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,410,831,000)
134113		Jaringan	71	5,627,818,566
503		INSTALASI	65	4,653,711,476
	000	Saldo Awal	65	4,653,711,476
504		JARINGAN	6	974,107,090
	000	Saldo Awal	6	974,107,090
135111		Aset Tetap Renovasi	10	97,304,922,142
607		ASET TETAP DALAM RENOVASI	10	97,304,922,142
	000	Saldo Awal	8	2,185,255,200
	101	Pembelian	2	519,092,000
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	94,600,574,942
135121		Aset Tetap Lainnya	13,490	4,090,945,179
501		BAHAN PERPUSTAKAAN	13,369	3,723,548,283
	000	Saldo Awal	16,361	3,040,273,530
	101	Pembelian	92	835,558,268
	401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(3,084)	(152,283,515)
602		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	121	367,396,896
	000	Saldo Awal	106	153,581,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
101	Pembelian	15	213,815,896
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3,750	490,209,375,000
201	TANAH	3,750	490,209,375,000
000	Saldo Awal		
803	ASET KEMITRAAN	3,750	490,209,375,000
000	Saldo Awal	0	0
162151	Software	725	49,691,725,087
801	ASET TAK BERWUJUD	725	49,691,725,087
000	Saldo Awal	664	42,498,350,595
100	Koreksi Saldo Awal	1	12,003,613
101	Pembelian	102	12,587,876,628
103	Hibah (Masuk)	1	29,000,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2	1,240,910,000
202	Pengembangan Nilai Aset	0	572,220,000
208	Pengembangan Melalui KDP	0	1,100,000,000
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
302	Transfer Keluar	(45)	(8,348,635,749)
162161	Lisensi	108	6,091,587,352
801	ASET TAK BERWUJUD	108	6,091,587,352
000	Saldo Awal	100	7,088,597,289
101	Pembelian	11	180,429,500
302	Transfer Keluar	(3)	(1,177,439,437)
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
802	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	0	1,009,690,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
503	Pengembangan KDP		0	1,331,220,000
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi		0	(2,340,910,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		53,078	68,180,857,922
201	TANAH		49,927	59,399,397,125
000	Saldo Awal		49,927	59,399,397,125
301	ALAT BESAR		6	2,063,250,536
000	Saldo Awal		6	2,063,250,536
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		3	19,583,300
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(3)	(19,583,300)
302	ALAT ANGKUTAN		4	324,188,750
000	Saldo Awal		5	337,532,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		1	218,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)		(1)	(13,343,250)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(1)	(218,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		1	825,000
000	Saldo Awal		0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		137	339,365,544
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(136)	(338,540,544)
304	ALAT PERTANIAN		0	0
000	Saldo Awal		0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		24	62,718,335
000	Saldo Awal		1	59,729
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		3,682	10,527,211,677
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_crbrmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANITTAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(3,659)	(10,464,553,071)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	9	4,635,603,445
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	224	5,369,582,484
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(215)	(733,979,039)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	16	48,669,500
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(16)	(48,669,500)
308	ALAT LABORATORIUM	0	0
000	Saldo Awal	0	0
309	ALAT PERSENJATAAN	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	89	48,593,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(89)	(48,593,000)
310	KOMPUTER	12	358,097,004
000	Saldo Awal	3	66,584,310
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	456	4,302,432,690
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(447)	(4,010,919,996)
318	RAMBU - RAMBU	4	1,540,000
000	Saldo Awal	4	1,540,000
401	BANGUNAN GEDUNG	6	1,012,928,212
000	Saldo Awal	5	641,788,599
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	371,139,613
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 02/05/20 11:06 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_crbtn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
000	Saldo Awal		0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		3,084	152,283,515
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		3,084	152,283,515
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		0	0
000	Saldo Awal		0	0
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI		1	170,026,000
000	Saldo Awal		1	170,026,000
801	ASET TAK BERWUJUD		0	0
000	Saldo Awal		0	0
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
TOTAL			184,897	2,798,456,843,122

Laporan PNB
(yang bersumber dari pengelolaan BMN)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 02/05/20 10:26

Halaman : 1

Prg ID : lap_ira_pen_kapital_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	32,388,888	0	32,388,888	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	991,150,756	0	991,150,756	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	135,922,678	0	135,922,678	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	360,047,373	0	360,047,373	0
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	

RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KAPITALISASI
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 02/05/20 11:18
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_kapitalisasi_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	0	1,120,334,000	1,120,333,300	0	1,120,333,300	100	700
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	0	2,978,885,000	2,978,884,800	0	2,978,884,800	100	200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	0	4,099,219,000	4,099,218,100	0	4,099,218,100	100	900
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	0	1,141,105,000	1,141,104,813	0	1,141,104,813	100	187
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	0	1,141,105,000	1,141,104,813	0	1,141,104,813	100	187
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	5,240,324,000	5,240,322,913	0	5,240,322,913	100	1,087
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	65,000,000	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246,496,043,000	210,621,914,000	174,584,351,569	0	174,584,351,569	82.89	36,037,562,431
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	923,164,000	392,243,000	277,209,000	0	277,209,000	70.67	115,034,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	247,419,207,000	211,014,157,000	174,861,560,569	0	174,861,560,569	82.87	36,152,596,431
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	130,388,204,000	3,868,700,000	2,720,209,000	51,825,000	2,668,384,000	70.31	1,200,316,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	130,388,204,000	3,868,700,000	2,720,209,000	51,825,000	2,668,384,000	70.31	1,200,316,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	4,918,809,000	5,669,043,000	4,345,435,994	0	4,345,435,994	76.65	1,323,607,006
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	133,000,000	104,090,325,000	99,354,185,000	0	99,354,185,000	95.45	4,736,140,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	5,051,809,000	109,759,368,000	103,699,620,994	0	103,699,620,994	94.48	6,059,747,006
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	382,924,220,000	324,707,225,000	281,281,390,563	51,825,000	281,229,565,563	86.63	43,477,659,437
	JUMLAH BELANJA	382,924,220,000	329,947,549,000	286,521,713,476	51,825,000	286,469,888,476	86.84	43,477,660,524

Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat K/L

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 12:01 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	38,136,194	205,713,244	(167,577,050)	(81.46)
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,967,367,257	26,811,835,914	(20,844,468,657)	(77.74)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	43,207,682,176	28,553,827,881	14,653,854,295	51.32
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,287,530	224,200	2,063,330	920.31
Piutang Bukan Pajak	0	3,516,480	(3,516,480)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(17,582)	17,582	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	3,498,898	(3,498,898)	(100.00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	51,805,080	0	51,805,080	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(259,025)	0	(259,025)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	51,546,055	0	51,546,055	0.00
Persediaan	88,524,541,338	1,003,556,532,748	(915,031,991,410)	(91.18)
JUMLAH ASET LANCAR	137,791,560,550	1,059,131,632,885	(921,340,072,335)	(86.99)
ASET TETAP				
Tanah	1,484,443,750,305	180,483,709,805	1,303,960,040,500	722.48
Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	332,663,047,278	101,110,638,052	30.39
Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	144,131,361,953	13,807,633,316	9.58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,020,002,566	6,507,585,170	(487,582,604)	(7.49)
Aset Tetap Lainnya	101,395,867,321	5,379,109,730	96,016,757,591	1,784.99
AKUMULASI PENYUSUTAN	(258,202,199,382)	(257,457,197,160)	(745,002,222)	0.29
JUMLAH ASET TETAP	1,925,370,101,409	411,707,616,776	1,513,662,484,633	367.65
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	83,647,500,000	406,561,875,000	486.04
Aset Tak Berwujud	55,783,312,439	49,586,947,884	6,196,364,555	12.50
Aset Lain-lain	68,180,544,422	62,680,178,299	5,500,366,123	8.78
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(42,802,462,277)	(38,314,958,551)	(4,487,503,726)	11.71
JUMLAH ASET LAINNYA	571,370,769,584	157,599,667,632	413,771,101,952	262.55
JUMLAH ASET	2,634,532,431,543	1,628,438,917,293	1,006,093,514,250	61.78
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,546,685,157	21,715,821,483	(17,169,136,326)	(79.06)
Hibah Yang Belum Disahkan	0	5,824,966	(5,824,966)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	197,392,416	200,409,583	(3,017,167)	(1.51)
Uang Muka dari KPPN	38,136,194	205,713,244	(167,577,050)	(81.46)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,782,213,767	22,127,769,276	(17,345,555,509)	(78.39)
JUMLAH KEWAJIBAN	4,782,213,767	22,127,769,276	(17,345,555,509)	(78.39)
EKUITAS				
EKUITAS				

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 12:01 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Ekuitas	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH EKUITAS	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH EKUITAS	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,634,532,431,543	1,628,438,917,293	1,006,093,514,250	61.78

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 12:02 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	38,136,194	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,736,498,862	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	5,082,697,571	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	851,829,176
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	43,207,682,176	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,287,530	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	51,805,080	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	259,025
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,687,468,842	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	166,435,625	0
0.0	117114	Suku Cadang	33,435,914	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	1,225,000	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	8,597,374,046	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	2,695,169,719	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	46,785,182,527	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	442,853,200	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	713,570	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	235,738,746	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	1,484,443,750,305	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	352,692,000	0
0.0	134112	Irigasi	39,492,000	0
0.0	134113	Jaringan	5,627,818,566	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	97,304,922,142	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,090,945,179	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	236,258,194,736
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	18,822,558,857
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	125,961,430
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,752,535
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,992,731,824
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	0
0.0	162151	Software	49,691,725,087	0
0.0	162161	Lisensi	6,091,587,352	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 12:02 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	68,180,544,422	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	6,977,126,803
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	33,538,223,962
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	2,287,111,512
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	2,271,235,291
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,275,449,866
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	197,392,416
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	38,136,194
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,538,268,769,112
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,895,435,183	0
0.0	313211	Transfer Keluar	26,154,967,366	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,606,311,148,017
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	1,342,010,649,166
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	1,323,834,573
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	406,528,445,266
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,793,472,009	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	902,016,992,846
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	1,977,855,635	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	13,638,230,904	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	32,388,888
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	991,150,756
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	135,423,365
3.0	425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	360,047,373
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	10,802
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	51,805,080
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,414,000
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	30,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	36,389,578
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,270,441,023
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	37,445,535
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	350
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	12,562,834,217
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	43,845,986,960	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	3,862,800
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	644,426	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	55,201

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 12:02 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,441,266,508	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	786,536,047	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,857,650,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	3,240,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,781,965,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	14,100,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	512,164,857	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,921,012,920	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,365,800,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	314,250
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	688,590,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	2,960,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	362,684,050	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	683,050
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	96,492,980,909	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	873,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	30,863,796,477	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	301,054,882	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4,552,471,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	10,309,435,452	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,241,816,131	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	6,901,750
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	30,497,403,500	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	405,438,750
3.0	521218	Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	22,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	150,056,029,810	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1,430,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,240,364,268	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	935,996,992	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	732,070,815	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	944,222,347	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	39,517,120	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,044,764,439,052	0
3.0	522141	Beban Sewa	87,778,098,327	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	37,302,182,110	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	17,825,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	124,908,390,683	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,601,273,800	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,825,645,162	0
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	33,752,771	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451,290,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 12:02 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	145,240,786,382	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,818,986,368
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,143,618,981	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	406,878
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81,186,667,460	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	139,970,371
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105,383,292,221	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	1,821,814,320
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	19,162,386,130	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	572,955,820
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	16,382,982,038	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	302,423,581
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55,234,497,964	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,723,303,038	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	50,384,572	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,101,014	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	129,859,429	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	4,106,343,496	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	657,361,415	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	741,614,013	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,284,021,065	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	569,648,448	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	59,615,546	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1,050,000	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	2,906,836,648	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	4,294,617,114	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	808,053,874,347	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	66,769,607,066	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	21,097,069,302	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	351,245,380	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,639,618,818	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	14,237,560,823	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	259,025	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	298,612,555	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	461,465,409	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	245,070,138	0
JUMLAH			6,125,722,394,713	6,125,722,394,713

Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2019
Tingkat Satuan Kerja

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UAKPB : 017312 KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Tanggal : 02/05/20 11:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satke

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	4,620,277,440
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	165,737,785
117114	Suku Cadang	31,835,914
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	677,922,685
117131	Bahan Baku	713,570
117199	Persediaan Lainnya	92,943,805
131111	Tanah	1,484,443,750,305
132111	Peralatan dan Mesin	393,484,579,994
133111	Gedung dan Bangunan	157,938,995,269
134111	Jalan dan Jembatan	352,692,000
134112	Irigasi	39,492,000
134113	Jaringan	5,627,818,566
135111	Aset Tetap Renovasi	97,074,912,142
135121	Aset Tetap Lainnya	4,086,416,161
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(214,106,053,504)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(18,822,558,857)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(125,961,430)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(2,752,535)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,992,731,824)
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000
162151	Software	44,267,022,027
162161	Lisensi	641,383,301
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	68,180,544,422
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	(6,977,126,803)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(29,852,555,066)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(146,731,678)
J U M L A H		2,478,909,940,689

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UAKPB : 966009 Pengelola Hibah MCC

Tanggal : 20/04/20 5:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	23,898,992
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	41,528,513,151
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	442,853,200
132111	Peralatan dan Mesin	31,815,925,523
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20,108,079,833)
162151	Software	1,459,630,553
162161	Lisensi	5,411,934,051
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(836,937,896)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,136,880,334)
J U M L A H		82,479,801,556

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UAKPB : 966010 Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF

Tanggal : 16/04/20 8:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satke

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117114	Suku Cadang	1,600,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8,597,374,046
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,695,169,719
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4,578,746,691
117199	Persediaan Lainnya	142,794,941
132111	Peralatan dan Mesin	4,040,516,005
135111	Aset Tetap Renovasi	84,160,000
135121	Aset Tetap Lainnya	1,525,350
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,202,856,248)
162151	Software	3,965,072,507
162161	Lisensi	38,270,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,927,750,852)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(3,499,500)
J U M L A H		20,011,122,659

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 UAKPB : 417951 KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

Tanggal : 16/04/20 8:50 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satk

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	42,148,810
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	697,840
132111	Peralatan dan Mesin	4,432,663,808
135111	Aset Tetap Renovasi	145,850,000
135121	Aset Tetap Lainnya	3,003,668
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,329,443,139)
J U M L A H		3,294,920,987

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 UAKPB : 180060 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Tanggal : 20/04/20 5:23 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	400,500
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	1,225,000
J U M L A H		1,625,500

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 UAKPB : 160019 BAPPEDA PROP.KAL-TIM

Tanggal : 20/04/20 5:35 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	570,000
J U M L A H		570,000

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UAKPB : 220060 Bappeda Provinsi Bali

Tanggal : 20/04/20 4:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satke

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	173,100
JUMLAH		173,100

Daftar Barang Milik Negara Yang Rusak Berat

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 2:37 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_dbrb_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KODE	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2019		
		Kuantitas	Nilai	4	Kuantitas	Nilai	6	Kuantitas	Nilai	8	Kuantitas	Nilai	10
1	2	3			5			7			9		
132111	Peralatan dan Mesin	(64)	(8,096,549,947)		4,568	15,666,843,373		4,552	11,822,400,284		(48)	(4,252,106,858)	
30103	ALAT BANTU	(4)	(431,737,454)		3	19,583,300		3	19,583,300		(4)	(431,737,454)	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	(60)	(7,664,812,483)		0	0		10	833,212,500		(70)	(8,498,024,983)	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0		1	218,000		1	218,000		0	0	
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0		115	268,439,744		115	268,439,744		0	0	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0		10	24,915,000		8	23,997,500		2	1,017,500	
30303	ALAT UKUR	0	0		11	45,185,800		7	14,990,800		4	30,195,000	
30501	ALAT KANTOR	0	0		1,450	6,621,147,677		1,437	2,004,175,621		13	4,616,972,056	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0		2,211	3,845,192,317		2,205	3,818,661,384		6	26,510,933	
30601	ALAT STUDIO	0	0		61	412,138,728		61	412,138,728		0	0	
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0		154	321,840,311		153	318,880,211		1	2,960,100	
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0		16	48,669,500		16	48,669,500		0	0	
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0		77	47,449,000		77	47,449,000		0	0	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0		12	1,144,000		12	1,144,000		0	0	
31001	KOMPUTER UNIT	0	0		248	2,999,713,143		248	2,999,713,143		0	0	
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0		199	1,011,206,853		199	1,011,206,853		0	0	
162151	Software	(102)	(1,179,050,705)		0	0		0	0		(102)	(1,179,050,705)	
80101	ASET TAK BERWUJUD	(102)	(1,179,050,705)		0	0		0	0		(102)	(1,179,050,705)	
162161	Lisensi	(118)	(218,830,304)		0	0		0	0		(118)	(218,830,304)	
80101	ASET TAK BERWUJUD	(118)	(218,830,304)		0	0		0	0		(118)	(218,830,304)	
TOTAL			(9,494,430,956)			15,666,843,373			11,822,400,284			(5,649,987,867)	

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 20/04/20 2:36 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

AKUMULASI PENYUSUTAN									
SALDO 31 DESEMBER 2019									
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	NILAI BUKU	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8	
132111	Peralatan dan Mesin	2,196	710,996,970	475,053,449	72,140,898	(192,589,309)	354,605,038	356,391,932	
30103	ALAT BANTU	2	495,000	212,141	70,715	0	282,856	212,144	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	880,000	218,000	0	(218,000)	0	880,000	
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	1,674,200	124,300	131,670	(25,600)	227,370	1,448,530	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	379,500	1,437,700	75,900	(1,210,000)	303,600	75,900	
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	
30501	ALAT KANTOR	503	144,679,023	143,709,825	17,987,737	(74,318,530)	87,379,032	57,299,991	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	740	290,813,084	195,772,378	32,030,872	(102,085,990)	125,717,260	165,095,824	
30601	ALAT STUDIO	19	4,465,000	4,115,000	66,000	(500,000)	3,681,000	784,000	
30602	ALAT KOMUNIKASI	762	145,550,892	106,193,000	6,394,500	(3,433,000)	109,154,500	37,696,392	
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	2,783,000	652,300	525,800	(210,100)	968,000	1,815,000	
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	599,000	299,498	0	0	299,498	299,502	
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10	8,500,000	566,660	0	0	566,660	7,933,340	
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	8,734,000	0	(8,734,000)	0	0	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	4,384,650	1,281,512	958,650	(1,144,000)	1,096,162	3,288,488	
31002	PERALATAN KOMPUTER	124	94,559,550	8,403,553	10,325,709	(707,089)	18,022,173	76,647,477	
31503	ALAT SAR	11	7,146,699	3,160,654	3,573,345	0	6,734,199	412,500	
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	3	2,677,272	172,728	0	0	172,728	2,504,544	
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2	313,500	0	0	313,500	313,500	0	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	231,000	0	0	231,000	231,000	0	
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	82,500	0	0	82,500	82,500	0	
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		2,198	711,310,470	475,053,449	72,140,898	(192,275,809)	354,918,538	356,391,932	

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 055
 UAKPB : 966009

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 Pengelola Hibah MCC

Tanggal : 19/04/20 4:17 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satk

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
		23,898,992
117111	Barang Konsumsi	
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	41,528,513,151
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	442,853,200
132111	Peralatan dan Mesin	31,815,925,523
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20,108,079,833)
162151	Software	1,459,630,553
162161	Lisensi	5,411,934,051
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(836,937,896)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2,136,880,334)
J U M L A H		82,479,801,556

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 20/04/20 2:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_kl_kel

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	4,687,468,842
	Jumlah Barang Konsumsi	4,687,468,842
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	166,435,625
	Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan	166,435,625
117114	Suku Cadang	
10102	SUKU CADANG	33,435,914
	Jumlah Suku Cadang	33,435,914
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	1,225,000
	Jumlah Pita Cukai, Materai dan Leges	1,225,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	8,597,374,046
	Jumlah Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	8,597,374,046
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	2,695,169,719
	Jumlah Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	2,695,169,719
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	46,785,182,527
	Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	46,785,182,527
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	24,878,944,149
	Jumlah Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	442,853,200
	Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	442,853,200
117131	Bahan Baku	
10101	BAHAN	713,570
	Jumlah Bahan Baku	713,570
117199	Persediaan Lainnya	
10104	OBAT-OBATAN	92,943,805
10108	PERSEDIAAN PENELITIAN	128,174,941
10201	KOMPONEN	14,620,000
	Jumlah Persediaan Lainnya	235,738,746
	Jumlah	88,524,541,338

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 20/04/20 2:30 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_ira_pen_kapital_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	32,388,888	0	32,388,888	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	991,150,756	0	991,150,756	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	135,922,678	0	135,922,678	0
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	360,047,373	0	360,047,373	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 2:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kl

UAPB : 055		KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL									
		AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019			MUTASI				
				BERTAMBAH		BERKURANG			SALDO S.D 31 DESEMBER 2019		
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	ASET KEMITRAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162151	Software	664	42,498,350,595	106	15,542,010,241	45	8,348,635,749	725	49,691,725,087		
80101	ASET TAK BERWUJUD	664	42,498,350,595	106	15,542,010,241	45	8,348,635,749	725	49,691,725,087		
162161	Lisensi	100	7,088,597,289	11	180,429,500	3	1,177,439,437	108	6,091,587,352		
80101	ASET TAK BERWUJUD	100	7,088,597,289	11	180,429,500	3	1,177,439,437	108	6,091,587,352		
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			49,586,947,884		9,526,075,186		15,722,439,741		55,783,312,439		

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINGKIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
13111	Tanah	84,395	1,484,443,750,305
201	TANAH	84,395	1,484,443,750,305
	000 Saldo Awal	0	1,358,782,569,305
	225 Koreksi Kesalahan input IP	0	125,661,181,000
	245 Koreksi Nilai barang Berlebih	0	0
13211	Peralatan dan Mesin	29,172	434,484,682,300
301	ALAT BESAR	72	14,990,368,573
	000 Saldo Awal	55	10,965,333,805
	101 Pembelian	20	3,901,303,068
	202 Pengembangan Nilai Aset	0	143,315,000
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(3)	(19,583,300)
302	ALAT ANGKUTAN	191	34,740,596,062
	000 Saldo Awal	192	34,756,389,062
	101 Pembelian	2	3,465,000
	202 Pengembangan Nilai Aset	0	85,525,000
	209 Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	301 Penghapusan	(2)	(104,565,000)
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1)	(218,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	230	1,573,956,055
	000 Saldo Awal	346	1,464,582,239
	101 Pembelian	21	448,739,360
	209 Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(137)	(339,365,544)
304	ALAT PERTANIAN	12	102,350,690
	000 Saldo Awal	10	94,650,690

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
101	Pembelian		2	7,700,000
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA		19,877	149,809,991,442
000	Saldo Awal		18,226	90,669,600,068
100	Koreksi Saldo Awal		1	9,200,000
101	Pembelian		5,600	70,404,682,612
103	Hibah (Masuk)		4	18,405,235
202	Pengembangan Nilai Aset		0	43,335,000
209	Transaksi Normalisasi BMN		(85)	(203,620,218)
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi		0	0
302	Transfer Keluar		(86)	(266,187,500)
303	Hibah (Keluar)		(99)	(336,425,155)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola		(2)	(1,786,923)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan		(3,682)	(10,527,211,677)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		2,667	38,413,140,158
000	Saldo Awal		2,015	32,431,688,475
101	Pembelian		880	12,778,017,283
202	Pengembangan Nilai Aset		0	22,000,000
209	Transaksi Normalisasi BMN		0	0
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi		0	0
302	Transfer Keluar		(4)	(1,448,983,116)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan		(224)	(5,369,582,484)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		47	1,999,742,028
000	Saldo Awal		61	2,046,761,528
101	Pembelian		2	1,650,000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan		(16)	(48,669,500)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_crbtnn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
308		ALAT LABORATORIUM	56	1,568,448,322
	000	Saldo Awal		1,467,996,322
	101	Pembelian	2	100,452,000
	209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
309		ALAT PERSENUJATAAN	35	253,661,704
	000	Saldo Awal	118	298,420,104
	101	Pembelian	6	3,834,600
	209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
	401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(89)	(48,593,000)
310		KOMPUTER	5,919	189,337,392,378
	000	Saldo Awal	5,044	157,519,804,331
	101	Pembelian	1,357	70,657,033,745
	103	Hibah (Masuk)	8	192,770,250
	107	Reklasifikasi Masuk	1	1,161,020,160
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	6,580,200
	204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	4,000
	209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
	302	Transfer Keluar	(33)	(34,736,367,458)
	304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(1,161,020,160)
	401	Penghentiaian Aset Dari Penggunaan	(45E)	(4,302,432,690)
311		ALAT EKSPLORASI	4	713,636,220
	000	Saldo Awal	4	713,636,220

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_crbm_n_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
315		ALAT KESELAMATAN KERJA	50	654,912,468
	000	Saldo Awal		560,132,468
	101	Pembelian	5	94,780,000
	209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0	0
317		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	1,924,000
	000	Saldo Awal	1	1,924,000
318		RAMBU - RAMBU	0	0
	000	Saldo Awal	0	0
319		PERALATAN OLAH RAGA	11	324,562,200
	000	Saldo Awal	9	277,310,600
	101	Pembelian	2	47,251,600
133111		Gedung dan Bangunan	41	157,938,995,269
401		BANGUNAN GEDUNG	34	154,016,706,596
	000	Saldo Awal	34	154,254,820,186
	101	Pembelian	1	198,392,000
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	2,105,993,023
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,171,359,000)
	401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1)	(371,139,613)
402		MONUMEN	1	1,854,000
	000	Saldo Awal	1	3,800,000
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(1,946,000)
404		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	6	3,920,434,673
	000	Saldo Awal	6	2,908,461,673
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	1,011,973,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
134111		Jalan dan Jembatan	55	352,692,000
501		JALAN DAN JEMBATAN	55	352,692,000
	000	Saldo Awal	55	51,605,000
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	301,087,000
134112		Irigasi	2	39,492,000
502		BANGUNAN AIR	2	39,492,000
	000	Saldo Awal	2	2,450,323,000
	190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	1	5,057,000
	209	Transaksi Normalisasi BMN	(1)	(5,057,000)
	225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,410,831,000)
134113		Jaringan	71	5,627,818,566
503		INSTALASI	65	4,653,711,476
	000	Saldo Awal	65	4,653,711,476
504		JARINGAN	6	974,107,090
	000	Saldo Awal	6	974,107,090
135111		Aset Tetap Renovasi	10	97,304,922,142
607		ASET TETAP DALAM RENOVASI	10	97,304,922,142
	000	Saldo Awal	8	2,185,255,200
	101	Pembelian	2	519,092,000
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	94,600,574,942
135121		Aset Tetap Lainnya	13,490	4,090,945,179
601		BAHAN PERPUSTAKAAN	13,369	3,723,548,283
	000	Saldo Awal	16,361	3,040,273,530
	101	Pembelian	92	835,558,268
	401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3,084)	(152,283,515)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
602		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH-RAGA	121	367,396,896
	000	Saldo Awal	106	153,581,000
	101	Pembelian	15	213,815,896
161111		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3,750	490,209,375,000
201		TANAH	3,750	490,209,375,000
	000	Saldo Awal	0	0
803		ASET KEMITRAAN	0	0
	000	Saldo Awal		
162151		Software	725	49,691,725,087
801		ASET TAK BERWUJUD	725	49,691,725,087
	000	Saldo Awal	664	42,498,350,595
	100	Koreksi Saldo Awal	1	12,003,613
	101	Pembelian	102	12,587,876,628
	103	Hibah (Masuk)	1	29,000,000
	105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2	1,240,910,000
	202	Pengembangan Nilai Aset	0	572,220,000
	208	Pengembangan Melalui KDP	0	1,100,000,000
	209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
	302	Transfer Keluar	(45)	(8,348,635,749)
162161		Lisensi	108	6,091,587,352
801		ASET TAK BERWUJUD	108	6,091,587,352
	000	Saldo Awal	100	7,088,597,289
	101	Pembelian	11	180,429,500
	302	Transfer Keluar	(3)	(1,177,439,437)
162311		Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
802	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENERJAAN	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	0	1,009,690,000
503	Pengembangan KDP	0	1,331,220,000
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(2,340,910,000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	53,078	68,180,857,922
201	TANAH	49,927	59,399,397,125
000	Saldo Awal	49,927	59,399,397,125
301	ALAT BESAR	6	2,063,250,536
000	Saldo Awal	6	2,063,250,536
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	19,583,300
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(3)	(19,583,300)
302	ALAT ANGKUTAN	4	324,188,750
000	Saldo Awal	5	337,532,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1	218,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1)	(13,343,250)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(1)	(218,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	825,000
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	137	339,365,544
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(136)	(338,540,544)
304	ALAT PERTANIAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	24	62,718,335
000	Saldo Awal	1	59,729

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		3,682	10,527,211,677
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(3,659)	(10,464,553,071)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		9	4,635,603,445
000	Saldo Awal		0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		224	5,369,582,484
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(215)	(733,979,039)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		0	0
000	Saldo Awal		0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		16	48,669,500
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(16)	(48,669,500)
308	ALAT LABORATORIUM		0	0
000	Saldo Awal		0	0
309	ALAT PERSENJATAAN		0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		89	48,593,000
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(89)	(48,593,000)
310	KOMPUTER		12	358,097,004
000	Saldo Awal		3	66,584,310
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		456	4,302,432,690
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)		(447)	(4,010,919,996)
318	RAMBU - RAMBU		4	1,540,000
000	Saldo Awal		4	1,540,000
401	BANGUNAN GEDUNG		6	1,012,928,212
000	Saldo Awal		5	641,788,599

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 20/04/20 3:28 AM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_crbrmn_kl

UAPB : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JENIS TRANSAKSI		URAIAN	KUANTITAS	NILAI
KODE				
1		2	3	4
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		1	371,139,613
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		0	0
000	Saldo Awal		0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		3,084	152,283,515
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		3,084	152,283,515
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		0	0
000	Saldo Awal		0	0
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI		1	170,026,000
000	Saldo Awal		1	170,026,000
801	ASET TAK BERWUJUD		0	0
000	Saldo Awal		0	0
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)		0	0
TOTAL			184,897	2,798,456,843,122

Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga

DAFTAR UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	4.253.262.367
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	10.593.442
3	MWA ICCTF	-
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	282.829.348
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
24	Bappeda Propinsi Maluku	-
25	Bappeda Propinsi Bali	-
26	Bappeda Propinsi NTB	-
27	Bappeda Propinsi NTT	-
28	Bappeda Propinsi Papua	-
29	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
30	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
31	Bappeda Propinsi Banten	-
32	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
33	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
34	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
35	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
36	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
37	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
	Jumlah	4.546.685.157

RINGKASAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

	Jumlah	
Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas		
- Tunggalan TA 2019	1.026.325.663	
- Tagihan Desember 2019 terbit atau dibayarkan pada bulan Januari 2020	54.688.913	
- SP3 belum terbit di tahun 2019	901.012.500	
- Pembayaran belanja pegawai tahun 2018 dibayarkan tahun 2019	2.271.235.291	
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker Kantor Meneg PPN/Bappenas		4.253.262.367
Satker Komite Nasional Keuangan Syariah		
- Tunggalan TA 2019	260.614.348	
- Tagihan Desember 2019 terbit atau dibayarkan pada bulan Januari 2020	22.215.000	
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker Komite Nasional Keuangan Syariah		282.829.348
Satker Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia		
- Tunggalan TA 2019	-	
- Tagihan Desember 2019 terbit atau dibayarkan pada bulan Januari 2020	10.593.442	
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia		10.593.442
Satker MWA ICCTF		
- Tunggalan TA 2019	-	
- Tagihan Desember 2019 terbit atau dibayarkan pada bulan Januari 2020	-	
	-	
Jumlah kas lainnya dan setara kas satker MWA ICCTF		-
Pembulatan		-
Total Kas Lainnya dan Setara Kas		4.546.685.157

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas

TUNGGAKAN TA 2019

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar:		1.026.325.663	
a. Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111)			
- PPK PPN I	19.566.400		
- PPK PPN II	19.384.400		
- PPN VIII	218.732.530		
- PPK PPN X	1.418.700		
b. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)			
- PPK PPN I	8.250.000		
- PPK PPN X	30.659.500		
c. Beban Jasa Profesi (522151)			
- PPK DM III	12.600.000		
- PPK PPN I	89.100.000		
- PPK PPN II	67.900.000		
- PPK PPN X	104.954.765		
d. Beban Bahan (521211)			
- PPK DM III	34.629.000		
- PPK PPN II	20.189.275		
- PPK PPN VIII	222.109.800		
- PPK PPN X	6.864.500		
e. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)			
- PPK PPN II	9.760.000		
- PPK PPN VIII	20.995.000		
- PPK PPN X	43.238.535		
f. Beban Barang Operasional Lainnya (521119)			
- PPK PPN X	600.000		
g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)			
- PPK PPN II	2.700.000		
- PPK PPN X	600.000		
h. Beban Keperluan Perkantoran (521111)			
- PPK DM III	41.786.500		
- PPK PPN II	1.669.200		
i. Beban Langganan Telepon (522112)			
- PPK DM III	3.220.558		
j. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)			
- PPK DM III	42.097.000		
k. Beban Sewa (522141)			
- PPK DM III	3.300.000		
Jumlah Utang Pihak Ketiga Tunggakan TA 2019			1.026.325.663

SP3 BELUM TERBIT TAHUN 2019

Belanja Barang yang masih harus dibayar (212112)		901.012.500	
- Belanja Jasa Konsultan (522131)	901.012.500		
Jumlah Utang Pihak Ketiga SP3 Belum Terbit TA 2019			901.012.500

PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2019 DIBAYARKAN TAHUN 2020

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (212111)			
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar- Pembayaran Kekurangan Gaji Akrua 2020		1.593.114	
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar- Pembayaran Kekurangan Gaji Jan, Feb, Mar 2019		41.018.106	
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar- Pembayaran Kekurangan Gaji November 2019		15.598.516	
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar- Pembayaran Kekurangan Gaji Akrua Januari 2020		25.020.503	
- Belanja pegawai (menteri) yang masih harus dibayar- Tunjangan kinerja menteri periode 20 Des-31Des 2019		44.580.706	
- Belanja pegawai yang masih harus dibayar- Tunjangan Kinerja Periode 20 Desember - 31 Desember 2019		2.143.424.346	
Jumlah Utang Pihak Ketiga Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2019 Dibayarkan Tahun 2020			2.271.235.291

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas

TAGIHAN DESEMBER 2019 TERBIT ATAU DIBAYARKAN PADA BULAN JANUARI 2020

a. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya (522119)		3.090.600	
- Kekurangan pembayaran daya dan jasa lainnya-internet-PPN X	1.810.800		
- Kekurangan pembayaran daya dan jasa lainnya-FirstMedia-Telkom-PPN XII	1.279.800		
b. Beban langganan telepon (522112)		4.731.273	
- Kekurangan pembayaran telepon PPN VII	2.481.594		
- Kekurangan pembayaran telepon PPN X	1.249.255		
- Kekurangan pembayaran telepon PPN XII	98.688		
- Kekurangan pembayaran telepon ICCTF pada PPK DM III	901.736		
c. Beban langganan listrik (522111)		28.543.020	
- Kekurangan pembayaran listrik PPN VII	3.571.344		
- Kekurangan pembayaran listrik PPN X	2.781.641		
- Kekurangan pembayaran listrik PPN XII	10.270.762		
- Kekurangan pembayaran listrik ICCTF pada PPK DM III	11.919.273		
d. Beban sewa (522141)		18.324.020	
- Kekurangan pembayaran sewa gudang ICCTF pada PPK DM III	18.324.020		
Jumlah Utang Pihak Ketiga Tagihan Desember 2019 Terbit Atau Dibayarkan Pada Bulan Januari 2020			54.688.913
Total Utang Kepada Pihak Ketiga			4.253.262.367

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Satker Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia

TAGIHAN DESEMBER 2019 TERBIT ATAU DIBAYARKAN PADA BULAN JANUARI 2020

Satker Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia			
a. Beban langganan listrik (522111)		4.621.626	
b. Beban langganan telepon (522112)		1.736.712	
c. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya (522119)		4.235.104	
Jumlah Utang Pihak Ketiga Tagihan Desember 2019 Terbit Atau Dibayarkan Pada Bulan Januari 2020			10.593.442
Total Utang Kepada Pihak Ketiga			10.593.442

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Satker MWA ICCTF

TAGIHAN DESEMBER 2018 TERBIT ATAU DIBAYARKAN PADA BULAN JANUARI 2019

a. Beban langganan telepon (522112)		-	
b. beban sewa (522141)		-	
Jumlah Utang Pihak Ketiga Tagihan Desember 2018 Terbit Atau Dibayarkan Pada Bulan Januari 2019			-
Total Utang Kepada Pihak Ketiga			#REF!

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Satker Komite Nasional Keuangan Syariah

TUNGGAKAN TA 2019

a. Beban Jasa Profesi (522151)		38.800.000	
b. Perjalanan Dinas Biasa (524111)		44.954.551	
c. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114)		28.145.000	
d. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)		126.071.800	
e. Beban Langganan Telepon (522112)		19.915.365	
f. Beban Langganan Listrik (522111)		2.727.632	
Jumlah Utang Pihak Ketiga Tunggakan TA 2019			260.614.348

TAGIHAN DESEMBER 2019 TERBIT ATAU DIBAYARKAN PADA BULAN JANUARI 2020

a. Beban langganan listrik (522111)		19.215.000	
b. Beban langganan telepon (522112)		3.000.000	
Jumlah Utang Pihak Ketiga Tagihan Desember 2019 Terbit Atau Dibayarkan Pada Bulan Januari 2020			22.215.000

Total Utang Kepada Pihak Ketiga**282.829.348**

DATA SPDPL/HLL (Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan/Surat Pengesahan Hibah Langsung) yang belum terbit												
No	Jenis	PPK	No. PL	Tgl. Terima	Tgl Kirim BU	Valas	Nilai PL	Tgl. Ke KPPN	No &Tgl. WA	No & Tgl. SP3	Penerima	Keterangan
1	PLN	PPN XI	012.03/PL/PPK.06.11/11/2019	04/12/2019	02/12/2019	IDR	901.012.500	04/12/2019	1905494954/PL.1/1219/04-12-2019		Output 1 (laporan Pendahuluan) Pekerjaan IME pada rentang RIMP Loan IP.573JICA Contract No. 305.00/PPK/PPK.06.11/11/2019 Date 5 Nov 2019 dan SPMK No. 305.01/PPK/PPK.06.11/11/2019 Date 5 Nov 2019	

TOTAL

Daftar Pendapatan Diterima Dimuka

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	197.392.416
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	-
3	MWA ICCTF	-
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	-
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
24	Bappeda Propinsi Maluku	-
25	Bappeda Propinsi Bali	-
26	Bappeda Propinsi NTB	-
27	Bappeda Propinsi NTT	-
28	Bappeda Propinsi Papua	-
29	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
30	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
31	Bappeda Propinsi Banten	-
32	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
33	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
34	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
35	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
36	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
37	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
	Jumlah	197.392.416

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

NO	NAMA	PERUNTUKAN	Nilai Sewa	Periode Sewa			Pendapatan Periode Sebelumnya (sebelum 2019)			Pendapatan Periode Berjalan (2019)			Pendapatan Diterima Dimuka (setelah 2019)		
				JANGKA WAKTU	PERIODE	NILAI PER PERIODE	JANGKA WAKTU	PERIODE	NILAI	JANGKA WAKTU	PERIODE	NILAI	JANGKA WAKTU	PERIODE	NILAI
1	2		3	4	5	6=3/4	7	8	9=6x7	10	11	12=6x10	13	14	15=6x13
1	Bank BNI 46	Sewa ATM pertama (Agustus 2017 s/d Juli 2022)	104.210.000	60	bulan	1.736.833	17	bulan	29.526.167	12	bulan	20.842.000	31	bulan	53.841.833,33
2	Koperasi Pegawai Bappenas	Kegiatan Operasional 1 Tahun (20 Agustus 2018 s/d 19 Agustus 2019)	52.800.000	12	bulan	4.400.000	4,5	bulan	19.800.000	7,5	bulan	33.000.000	-	bulan	-
		Kegiatan Operasional 1 Tahun (16 Desember 2019 s/d 15 Desember 2020)	75.580.000	12	bulan	6.298.333	-	bulan	-	0,5	bulan	3.149.167	11,5	bulan	72.430.833,33
3	Bank BNI 46	Sewa ATM kedua (20 April 2018 s/d 19 April 2023)	108.030.000	60	bulan	1.800.500	8,5	bulan	15.304.250	12	bulan	21.606.000	39,5	bulan	71.119.750,00
	TOTAL		340.620.000			14.235.667			64.630.417			78.597.167			197.392.416

Daftar Pinjaman dan Hibah

DAFTAR KONTRAK KERJASAMA HIBAH LANGSUNG BARANG DAN JASA

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas

No	Nama Program	Lembaga / Donor	No. Register	Periode Proyek			Penasarung Jawab	MPHLEJS Tahun 2019			Jangka Waktu Periode Pelaporan	Pemeriksaan Hibah yang ditunjuk	Pran Bappenas dalam Hibah	Kti. atau Organisasi Lain yang Terlibat	Keterangan Lainnya
				Mulai	Tutup	Perpanjangan		Nomor	Tanggal	Nilai					
1	Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Income through Support to Markets in Agriculture (AP-PRISMA)	DFAT	74900201	28-Oct-13	31 Desember 2018		Dit. Pangan dan Perikanan	2019019017312006	15-Aug-2019	60.542.730.464	1 tahun sekali	DFAT/Independent Auditor	Implementing Agency		
2	Program Knowledge Sector Initiative (KSI) Phase 2	DFAT	20R18DFA	Oktober 2017	Oktober 2020		Dit. Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2019019017312018	20 Desember 2019	89.421.626.572					
3	Innovation and Investment for Inclusive and Sustainable Economic (ISEI)	GIZ	26XPYRCA	28 Mei 2017	30 Juni 2020		Dit. Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2019019017312009	23 Oktober 2019	2.238.775.207					
4	Country Programme Nine 2016-2020 (Programme of Cooperation between The GOI - UNFPA)	UNFPA	21V9UCSA	12 Mei 2016	31 Desember 2020		Dit. Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	2019019017312024	27 Desember 2019	2.816.540.454		BPKP	1. Sebagai Koordinator Koordinasi Agency (KKA) yang beranggotakan berbagai instansi, termasuk PPN/Depdiknas, 2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 3) Badan Kemendes, 4) Badan Kemendiknas, 5) Badan Kemendiknas, 6) Badan Kemendiknas, 7) Badan Kemendiknas, 8) Badan Kemendiknas, 9) Badan Kemendiknas, 10) Badan Kemendiknas, 11) Badan Kemendiknas, 12) Badan Kemendiknas, 13) Badan Kemendiknas, 14) Badan Kemendiknas, 15) Badan Kemendiknas, 16) Badan Kemendiknas, 17) Badan Kemendiknas, 18) Badan Kemendiknas, 19) Badan Kemendiknas, 20) Badan Kemendiknas, 21) Badan Kemendiknas, 22) Badan Kemendiknas, 23) Badan Kemendiknas, 24) Badan Kemendiknas, 25) Badan Kemendiknas, 26) Badan Kemendiknas, 27) Badan Kemendiknas, 28) Badan Kemendiknas, 29) Badan Kemendiknas, 30) Badan Kemendiknas, 31) Badan Kemendiknas, 32) Badan Kemendiknas, 33) Badan Kemendiknas, 34) Badan Kemendiknas, 35) Badan Kemendiknas, 36) Badan Kemendiknas, 37) Badan Kemendiknas, 38) Badan Kemendiknas, 39) Badan Kemendiknas, 40) Badan Kemendiknas, 41) Badan Kemendiknas, 42) Badan Kemendiknas, 43) Badan Kemendiknas, 44) Badan Kemendiknas, 45) Badan Kemendiknas, 46) Badan Kemendiknas, 47) Badan Kemendiknas, 48) Badan Kemendiknas, 49) Badan Kemendiknas, 50) Badan Kemendiknas, 51) Badan Kemendiknas, 52) Badan Kemendiknas, 53) Badan Kemendiknas, 54) Badan Kemendiknas, 55) Badan Kemendiknas, 56) Badan Kemendiknas, 57) Badan Kemendiknas, 58) Badan Kemendiknas, 59) Badan Kemendiknas, 60) Badan Kemendiknas, 61) Badan Kemendiknas, 62) Badan Kemendiknas, 63) Badan Kemendiknas, 64) Badan Kemendiknas, 65) Badan Kemendiknas, 66) Badan Kemendiknas, 67) Badan Kemendiknas, 68) Badan Kemendiknas, 69) Badan Kemendiknas, 70) Badan Kemendiknas, 71) Badan Kemendiknas, 72) Badan Kemendiknas, 73) Badan Kemendiknas, 74) Badan Kemendiknas, 75) Badan Kemendiknas, 76) Badan Kemendiknas, 77) Badan Kemendiknas, 78) Badan Kemendiknas, 79) Badan Kemendiknas, 80) Badan Kemendiknas, 81) Badan Kemendiknas, 82) Badan Kemendiknas, 83) Badan Kemendiknas, 84) Badan Kemendiknas, 85) Badan Kemendiknas, 86) Badan Kemendiknas, 87) Badan Kemendiknas, 88) Badan Kemendiknas, 89) Badan Kemendiknas, 90) Badan Kemendiknas, 91) Badan Kemendiknas, 92) Badan Kemendiknas, 93) Badan Kemendiknas, 94) Badan Kemendiknas, 95) Badan Kemendiknas, 96) Badan Kemendiknas, 97) Badan Kemendiknas, 98) Badan Kemendiknas, 99) Badan Kemendiknas, 100) Badan Kemendiknas, 101) Badan Kemendiknas, 102) Badan Kemendiknas, 103) Badan Kemendiknas, 104) Badan Kemendiknas, 105) Badan Kemendiknas, 106) Badan Kemendiknas, 107) Badan Kemendiknas, 108) Badan Kemendiknas, 109) Badan Kemendiknas, 110) Badan Kemendiknas, 111) Badan Kemendiknas, 112) Badan Kemendiknas, 113) Badan Kemendiknas, 114) Badan Kemendiknas, 115) Badan Kemendiknas, 116) Badan Kemendiknas, 117) Badan Kemendiknas, 118) Badan Kemendiknas, 119) Badan Kemendiknas, 120) Badan Kemendiknas, 121) Badan Kemendiknas, 122) Badan Kemendiknas, 123) Badan Kemendiknas, 124) Badan Kemendiknas, 125) Badan Kemendiknas, 126) Badan Kemendiknas, 127) Badan Kemendiknas, 128) Badan Kemendiknas, 129) Badan Kemendiknas, 130) Badan Kemendiknas, 131) Badan Kemendiknas, 132) Badan Kemendiknas, 133) Badan Kemendiknas, 134) Badan Kemendiknas, 135) Badan Kemendiknas, 136) Badan Kemendiknas, 137) Badan Kemendiknas, 138) Badan Kemendiknas, 139) Badan Kemendiknas, 140) Badan Kemendiknas, 141) Badan Kemendiknas, 142) Badan Kemendiknas, 143) Badan Kemendiknas, 144) Badan Kemendiknas, 145) Badan Kemendiknas, 146) Badan Kemendiknas, 147) Badan Kemendiknas, 148) Badan Kemendiknas, 149) Badan Kemendiknas, 150) Badan Kemendiknas, 151) Badan Kemendiknas, 152) Badan Kemendiknas, 153) Badan Kemendiknas, 154) Badan Kemendiknas, 155) Badan Kemendiknas, 156) Badan Kemendiknas, 157) Badan Kemendiknas, 158) Badan Kemendiknas, 159) Badan Kemendiknas, 160) Badan Kemendiknas, 161) Badan Kemendiknas, 162) Badan Kemendiknas, 163) Badan Kemendiknas, 164) Badan Kemendiknas, 165) Badan Kemendiknas, 166) Badan Kemendiknas, 167) Badan Kemendiknas, 168) Badan Kemendiknas, 169) Badan Kemendiknas, 170) Badan Kemendiknas, 171) Badan Kemendiknas, 172) Badan Kemendiknas, 173) Badan Kemendiknas, 174) Badan Kemendiknas, 175) Badan Kemendiknas, 176) Badan Kemendiknas, 177) Badan Kemendiknas, 178) Badan Kemendiknas, 179) Badan Kemendiknas, 180) Badan Kemendiknas, 181) Badan Kemendiknas, 182) Badan Kemendiknas, 183) Badan Kemendiknas, 184) Badan Kemendiknas, 185) Badan Kemendiknas, 186) Badan Kemendiknas, 187) Badan Kemendiknas, 188) Badan Kemendiknas, 189) Badan Kemendiknas, 190) Badan Kemendiknas, 191) Badan Kemendiknas, 192) Badan Kemendiknas, 193) Badan Kemendiknas, 194) Badan Kemendiknas, 195) Badan Kemendiknas, 196) Badan Kemendiknas, 197) Badan Kemendiknas, 198) Badan Kemendiknas, 199) Badan Kemendiknas, 200) Badan Kemendiknas, 201) Badan Kemendiknas, 202) Badan Kemendiknas, 203) Badan Kemendiknas, 204) Badan Kemendiknas, 205) Badan Kemendiknas, 206) Badan Kemendiknas, 207) Badan Kemendiknas, 208) Badan Kemendiknas, 209) Badan Kemendiknas, 210) Badan Kemendiknas, 211) Badan Kemendiknas, 212) Badan Kemendiknas, 213) Badan Kemendiknas, 214) Badan Kemendiknas, 215) Badan Kemendiknas, 216) Badan Kemendiknas, 217) Badan Kemendiknas, 218) Badan Kemendiknas, 219) Badan Kemendiknas, 220) Badan Kemendiknas, 221) Badan Kemendiknas, 222) Badan Kemendiknas, 223) Badan Kemendiknas, 224) Badan Kemendiknas, 225) Badan Kemendiknas, 226) Badan Kemendiknas, 227) Badan Kemendiknas, 228) Badan Kemendiknas, 229) Badan Kemendiknas, 230) Badan Kemendiknas, 231) Badan Kemendiknas, 232) Badan Kemendiknas, 233) Badan Kemendiknas, 234) Badan Kemendiknas, 235) Badan Kemendiknas, 236) Badan Kemendiknas, 237) Badan Kemendiknas, 238) Badan Kemendiknas, 239) Badan Kemendiknas, 240) Badan Kemendiknas, 241) Badan Kemendiknas, 242) Badan Kemendiknas, 243) Badan Kemendiknas, 244) Badan Kemendiknas, 245) Badan Kemendiknas, 246) Badan Kemendiknas, 247) Badan Kemendiknas, 248) Badan Kemendiknas, 249) Badan Kemendiknas, 250) Badan Kemendiknas, 251) Badan Kemendiknas, 252) Badan Kemendiknas, 253) Badan Kemendiknas, 254) Badan Kemendiknas, 255) Badan Kemendiknas, 256) Badan Kemendiknas, 257) Badan Kemendiknas, 258) Badan Kemendiknas, 259) Badan Kemendiknas, 260) Badan Kemendiknas, 261) Badan Kemendiknas, 262) Badan Kemendiknas, 263) Badan Kemendiknas, 264) Badan Kemendiknas, 265) Badan Kemendiknas, 266) Badan Kemendiknas, 267) Badan Kemendiknas, 268) Badan Kemendiknas, 269) Badan Kemendiknas, 270) Badan Kemendiknas, 271) Badan Kemendiknas, 272) Badan Kemendiknas, 273) Badan Kemendiknas, 274) Badan Kemendiknas, 275) Badan Kemendiknas, 276) Badan Kemendiknas, 277) Badan Kemendiknas, 278) Badan Kemendiknas, 279) Badan Kemendiknas, 280) Badan Kemendiknas, 281) Badan Kemendiknas, 282) Badan Kemendiknas, 283) Badan Kemendiknas, 284) Badan Kemendiknas, 285) Badan Kemendiknas, 286) Badan Kemendiknas, 287) Badan Kemendiknas, 288) Badan Kemendiknas, 289) Badan Kemendiknas, 290) Badan Kemendiknas, 291) Badan Kemendiknas, 292) Badan Kemendiknas, 293) Badan Kemendiknas, 294) Badan Kemendiknas, 295) Badan Kemendiknas, 296) Badan Kemendiknas, 297) Badan Kemendiknas, 298) Badan Kemendiknas, 299) Badan Kemendiknas, 300) Badan Kemendiknas, 301) Badan Kemendiknas, 302) Badan Kemendiknas, 303) Badan Kemendiknas, 304) Badan Kemendiknas, 305) Badan Kemendiknas, 306) Badan Kemendiknas, 307) Badan Kemendiknas, 308) Badan Kemendiknas, 309) Badan Kemendiknas, 310) Badan Kemendiknas, 311) Badan Kemendiknas, 312) Badan Kemendiknas, 313) Badan Kemendiknas, 314) Badan Kemendiknas, 315) Badan Kemendiknas, 316) Badan Kemendiknas, 317) Badan Kemendiknas, 318) Badan Kemendiknas, 319) Badan Kemendiknas, 320) Badan Kemendiknas, 321) Badan Kemendiknas, 322) Badan Kemendiknas, 323) Badan Kemendiknas, 324) Badan Kemendiknas, 325) Badan Kemendiknas, 326) Badan Kemendiknas, 327) Badan Kemendiknas, 328) Badan Kemendiknas, 329) Badan Kemendiknas, 330) Badan Kemendiknas, 331) Badan Kemendiknas, 332) Badan Kemendiknas, 333) Badan Kemendiknas, 334) Badan Kemendiknas, 335) Badan Kemendiknas, 336) Badan Kemendiknas, 337) Badan Kemendiknas, 338) Badan Kemendiknas, 339) Badan Kemendiknas, 340) Badan Kemendiknas, 341) Badan Kemendiknas, 342) Badan Kemendiknas, 343) Badan Kemendiknas, 344) Badan Kemendiknas, 345) Badan Kemendiknas, 346) Badan Kemendiknas, 347) Badan Kemendiknas, 348) Badan Kemendiknas, 349) Badan Kemendiknas, 350) Badan Kemendiknas, 351) Badan Kemendiknas, 352) Badan Kemendiknas, 353) Badan Kemendiknas, 354) Badan Kemendiknas, 355) Badan Kemendiknas, 356) Badan Kemendiknas, 357) Badan Kemendiknas, 358) Badan Kemendiknas, 359) Badan Kemendiknas, 360) Badan Kemendiknas, 361) Badan Kemendiknas, 362) Badan Kemendiknas, 363) Badan Kemendiknas, 364) Badan Kemendiknas, 365) Badan Kemendiknas, 366) Badan Kemendiknas, 367) Badan Kemendiknas, 368) Badan Kemendiknas, 369) Badan Kemendiknas, 370) Badan Kemendiknas, 371) Badan Kemendiknas, 372) Badan Kemendiknas, 373) Badan Kemendiknas, 374) Badan Kemendiknas, 375) Badan Kemendiknas, 376) Badan Kemendiknas, 377) Badan Kemendiknas, 378) Badan Kemendiknas, 379) Badan Kemendiknas, 380) Badan Kemendiknas, 381) Badan Kemendiknas, 382) Badan Kemendiknas, 383) Badan Kemendiknas, 384) Badan Kemendiknas, 385) Badan Kemendiknas, 386) Badan Kemendiknas, 387) Badan Kemendiknas, 388) Badan Kemendiknas, 389) Badan Kemendiknas, 390) Badan Kemendiknas, 391) Badan Kemendiknas, 392) Badan Kemendiknas, 393) Badan Kemendiknas, 394) Badan Kemendiknas, 395) Badan Kemendiknas, 396) Badan Kemendiknas, 397) Badan Kemendiknas, 398) Badan Kemendiknas, 399) Badan Kemendiknas, 400) Badan Kemendiknas, 401) Badan Kemendiknas, 402) Badan Kemendiknas, 403) Badan Kemendiknas, 404) Badan Kemendiknas, 405) Badan Kemendiknas, 406) Badan Kemendiknas, 407) Badan Kemendiknas, 408) Badan Kemendiknas, 409) Badan Kemendiknas, 410) Badan Kemendiknas, 411) Badan Kemendiknas, 412) Badan Kemendiknas, 413) Badan Kemendiknas, 414) Badan Kemendiknas, 415) Badan Kemendiknas, 416) Badan Kemendiknas, 417) Badan Kemendiknas, 418) Badan Kemendiknas, 419) Badan Kemendiknas, 420) Badan Kemendiknas, 421) Badan Kemendiknas, 422) Badan Kemendiknas, 423) Badan Kemendiknas, 424) Badan Kemendiknas, 425) Badan Kemendiknas, 426) Badan Kemendiknas, 427) Badan Kemendiknas, 428) Badan Kemendiknas, 429) Badan Kemendiknas, 430) Badan Kemendiknas, 431) Badan Kemendiknas, 432) Badan Kemendiknas, 433) Badan Kemendiknas, 434) Badan Kemendiknas, 435) Badan Kemendiknas, 436) Badan Kemendiknas, 437) Badan Kemendiknas, 438) Badan Kemendiknas, 439) Badan Kemendiknas, 440) Badan Kemendiknas, 441) Badan Kemendiknas, 442) Badan Kemendiknas, 443) Badan Kemendiknas, 444) Badan Kemendiknas, 445) Badan Kemendiknas, 446) Badan Kemendiknas, 447) Badan Kemendiknas, 448) Badan Kemendiknas, 449) Badan Kemendiknas, 450) Badan Kemendiknas, 451) Badan Kemendiknas, 452) Badan Kemendiknas, 453) Badan Kemendiknas, 454) Badan Kemendiknas, 455) Badan Kemendiknas, 456) Badan Kemendiknas, 457) Badan Kemendiknas, 458) Badan Kemendiknas, 459) Badan Kemendiknas, 460) Badan Kemendiknas, 461) Badan Kemendiknas, 462) Badan Kemendiknas, 463) Badan Kemendiknas, 464) Badan Kemendiknas, 465) Badan Kemendiknas, 466) Badan Kemendiknas, 467) Badan Kemendiknas, 468) Badan Kemendiknas, 469) Badan Kemendiknas, 470) Badan Kemendiknas, 471) Badan Kemendiknas, 472) Badan Kemendiknas, 473) Badan Kemendiknas, 474) Badan Kemendiknas, 475) Badan Kemendiknas, 476) Badan Kemendiknas, 477) Badan Kemendiknas, 478) Badan Kemendiknas, 479) Badan Kemendiknas, 480) Badan Kemendiknas, 481) Badan Kemendiknas, 482) Badan Kemendiknas, 483) Badan Kemendiknas, 484) Badan Kemendiknas, 485) Badan Kemendiknas, 486) Badan Kemendiknas, 487) Badan Kemendiknas, 488) Badan Kemendiknas, 489) Badan Kemendiknas, 490) Badan Kemendiknas, 491) Badan Kemendiknas, 492) Badan Kemendiknas, 493) Badan Kemendiknas, 494) Badan Kemendiknas, 495) Badan Kemendiknas, 496) Badan Kemendiknas, 497) Badan Kemendiknas, 498) Badan Kemendiknas, 499) Badan Kemendiknas, 500) Badan Kemendiknas, 501) Badan Kemendiknas, 502) Badan Kemendiknas, 503) Badan Kemendiknas, 504) Badan Kemendiknas, 505) Badan Kemendiknas, 506) Badan Kemendiknas, 507) Badan Kemendiknas, 508) Badan Kemendiknas, 509) Badan Kemendiknas, 510) Badan Kemendiknas, 511) Badan Kemendiknas, 512) Badan Kemendiknas, 513) Badan Kemendiknas, 514) Badan Kemendiknas, 515) Badan Kemendiknas, 516) Badan Kemendiknas, 517) Badan Kemendiknas, 518) Badan Kemendiknas, 519) Badan Kemendiknas, 520) Badan Kemendiknas, 521) Badan Kemendiknas, 522) Badan Kemendiknas, 523) Badan Kemendiknas, 524) Badan Kemendiknas, 525) Badan Kemendiknas, 526) Badan Kemendiknas, 527) Badan Kemendiknas, 528) Badan Kemendiknas, 529) Badan Kemendiknas, 530) Badan Kemendiknas, 531) Badan Kemendiknas, 532) Badan Kemendiknas, 533) Badan Kemendiknas, 534) Badan Kemendiknas, 535) Badan Kemendiknas, 536) Badan Kemendiknas, 537) Badan Kemendiknas, 538) Badan Kemendiknas, 539) Badan Kemendiknas, 540) Badan Kemendiknas, 541) Badan Kemendiknas, 542) Badan Kemendiknas, 543) Badan Kemendiknas, 544) Badan Kemendiknas, 545) Badan Kemendiknas, 546) Badan Kemendiknas, 547) Badan Kemendiknas, 548) Badan Kemendiknas, 549) Badan Kemendiknas, 550) Badan Kemendiknas, 551) Badan Kemendiknas, 552) Badan Kemendiknas, 553) Badan Kemendiknas, 554) Badan Kemendiknas, 555) Badan Kemendiknas, 556) Badan Kemendiknas, 557) Badan Kemendiknas, 558) Badan Kemendiknas, 559) Badan Kemendiknas, 560) Badan Kemendiknas, 561) Badan Kemendiknas, 562) Badan Kemendiknas, 563) Badan Kemendiknas, 564) Badan Kemendiknas, 565) Badan Kemendiknas, 566) Badan Kemendiknas, 567) Badan Kemendiknas, 568) Badan Kemendiknas, 569) Badan Kemendiknas, 570) Badan Kemendiknas, 571) Badan Kemendiknas, 572) Badan Kemendiknas, 573) Badan Kemendiknas, 574) Badan Kemendiknas, 575) Badan Kemendiknas, 576) Badan Kemendiknas, 577) Badan Kemendiknas, 578) Badan Kemendiknas, 579) Badan Kemendiknas, 580) Badan Kemendiknas, 581) Badan Kemendiknas, 582) Badan Kemendiknas, 583) Badan Kemendiknas, 584) Badan Kemendiknas, 585) Badan Kemendiknas, 586) Badan Kemendiknas, 587) Badan Kemendiknas, 588) Badan Kemendiknas, 589) Badan Kemendiknas, 590) Badan Kemendiknas, 591) Badan Kemendiknas, 592) Badan Kemendiknas, 593) Badan Kemendiknas, 594) Badan Kemendiknas, 595) Badan Kemendiknas, 596) Badan Kemendiknas, 597) Badan Kemendiknas, 598) Badan Kemendiknas, 599) Badan Kemendiknas, 600) Badan Kemendiknas, 601) Badan Kemendiknas, 602) Badan Kemendiknas, 603) Badan Kemendiknas, 604) Badan Kemendiknas, 605) Badan Kemendiknas, 606) Badan Kemendiknas, 607) Badan Kemendiknas, 608) Badan Kemendiknas, 609) Badan Kemendiknas, 610) Badan Kemendiknas, 611) Badan Kemendiknas, 612) Badan Kemendiknas, 613) Badan Kemendiknas, 614) Badan Kemendiknas, 615) Badan Kemendiknas, 616) Badan Kemendiknas, 617) Badan Kemendiknas, 618) Badan Kemendiknas, 619) Badan Kemendiknas, 620) Badan Kemendiknas, 621) Badan Kemendiknas, 622) Badan Kemendiknas, 623) Badan Kemendiknas, 624) Badan Kemendiknas, 625) Badan Kemendiknas, 626) Badan Kemendiknas, 627) Badan Kemendiknas, 628) Badan Kemendiknas, 629) Badan Kemendiknas, 630) Badan Kemendiknas, 631) Badan Kemendiknas, 632) Badan Kemendiknas, 633) Badan Kemendiknas, 634) Badan Kemendiknas, 635) Badan Kemendiknas, 636) Badan Kemendiknas, 637) Badan Kemendiknas, 638) Badan Kemendiknas, 639) Badan Kemendiknas, 640) Badan Kemendiknas, 641) Badan Kemendiknas, 642) Badan Kemendiknas, 643) Badan Kemendiknas, 644) Badan Kemendiknas, 645) Badan Kemendiknas, 646) Badan Kemendiknas, 647) Badan Kemendiknas, 648) Badan Kemendiknas, 649) Badan Kemendiknas, 650) Badan Kemendiknas, 651) Badan Kemendiknas, 652) Badan Kemendiknas, 653) Badan Kemendiknas, 654) Badan Kemendiknas, 655) Badan Kemendiknas, 656) Badan Kemendiknas, 657) Badan Kemendiknas, 658) Badan Kemendiknas, 659) Badan Kemendiknas, 660) Badan Kemendiknas, 661) Badan Kemendiknas, 662) Badan Kemendiknas, 663) Badan Kemendiknas, 664) Badan Kemendiknas, 665) Badan Kemendiknas, 666) Badan Kemendiknas, 667) Badan Kemendiknas, 668) Badan Kemendiknas, 669) Badan Kemendiknas, 670) Badan Kemendiknas, 671) Badan Kemendiknas, 672) Badan Kemendiknas, 673) Badan Kemendiknas, 674) Badan Kemendiknas, 675) Badan Kemendiknas, 676) Badan Kemendiknas, 677) Badan Kemendiknas, 678) Badan Kemendiknas, 679) Badan Kemendiknas, 680) Badan Kemendiknas, 681) Badan Kemendiknas, 682) Badan Kemendiknas, 683) Badan Kemendiknas, 684) Badan Kemendiknas, 685) Badan Kemendiknas, 686) Badan Kemendiknas, 687) Badan Kemendiknas, 688) Badan Kemendiknas, 689) Badan Kemendiknas, 690) Badan Kemendiknas, 691) Badan Kemendiknas, 692) Badan Kemendiknas, 693) Badan Kemendiknas, 694) Badan Kemendiknas, 695) Badan Kemendiknas, 696) Badan Kemendiknas, 697) Badan Kemendiknas, 698) Badan Kemendiknas, 699) Badan Kemendiknas, 700) Badan Kemendiknas, 701) Badan Kemendiknas, 702) Badan Kemendiknas, 703) Badan Kemendiknas, 704) Badan Kemendiknas, 705) Badan Kemendiknas, 706) Badan Kemendiknas, 707) Badan Kemendiknas, 708) Badan Kemendiknas, 709) Badan Kemendiknas, 710) Badan Kemendiknas, 711) Badan Kemendiknas, 712) Badan Kemendiknas, 713) Badan Kemendiknas, 714) Badan Kemendiknas, 715) Badan Kemendiknas, 716) Badan Kemendiknas, 717) Badan Kemendiknas, 718) Badan Kemendiknas, 719) Badan Kemendiknas, 720) Badan Kemendiknas, 721) Badan Kemendiknas, 722) Badan Kemendiknas, 723) Badan Kemendiknas, 724) Badan Kemendiknas, 725) Badan Kemendiknas, 726) Badan Kemendiknas, 727) Badan Kemendiknas, 728) Badan Kemendiknas, 729) Badan Kemendiknas, 730) Badan Kemendiknas, 731) Badan Kemendiknas, 732) Badan Kemendiknas, 733) Badan Kemendiknas, 734) Badan Kemendiknas, 735) Badan Kemendiknas, 736) Badan Kemendiknas, 737) Badan Kemendiknas, 738) Badan Kemendiknas, 739) Badan Kemendiknas, 740) Badan Kemendiknas, 741) Badan Kemendiknas, 742) Badan Kemendiknas, 743) Badan Kemendiknas, 744) Badan Kemendiknas, 745) Badan Kemendiknas, 746) Badan Kemendiknas, 747) Badan Kemendiknas, 748) Badan Kemendiknas, 749) Badan Kemendiknas, 750) Badan Kemendiknas, 751) Badan Kemendiknas, 752) Badan Kemendiknas, 753) Badan Kemendiknas, 754) Badan Kemendiknas, 755) Badan Kemendiknas, 756) Badan Kemendiknas, 757) Badan Kemendiknas, 758) Badan Kemendiknas, 759) Badan Kemendiknas, 760) Badan Kemendiknas, 761) Badan Kemendiknas, 762) Badan Kemendiknas, 763) Badan Kemendiknas, 764) Badan Kemendiknas, 765) Badan Kemendiknas, 766) Badan Kemendiknas, 767) Badan Kemendiknas, 768) Badan Kemendiknas, 769) Badan Kemendiknas, 770) Badan Kemendiknas, 771) Badan Kemendiknas, 772) Badan Kemendiknas, 773) Badan Kemendiknas, 774) Badan Kemendiknas, 775) Badan Kemendiknas, 776) Badan Kemendiknas, 777) Badan Kemendiknas, 778) Badan Kemendiknas, 779) Badan Kemendiknas, 780) Badan Kemendiknas, 781) Badan Kemendiknas, 782) Badan Kemendiknas, 783) Badan Kemendiknas, 784) Badan Kemendiknas, 785) Badan Kemendiknas, 786) Badan Kemendiknas, 787) Badan Kemendiknas, 788) Badan Kemendiknas, 789) Badan Kemendiknas, 790) Badan Kemendiknas, 791) Badan Kemendiknas, 792) Badan Kemendiknas, 793) Badan Kemendiknas, 794) Badan Kemendiknas, 795) Badan Kemendiknas, 796) Badan Kemendiknas, 797) Badan Kemendiknas, 798) Badan Kemendiknas, 799) Badan Kemendiknas, 800) Badan Kemendiknas, 801) Badan Kemendiknas, 802) Badan Kemendiknas, 803) Badan Kemendiknas, 804) Badan Kemendiknas, 805) Badan Kemendiknas, 806) Badan Kemendiknas, 807) Badan Kemendiknas, 808) Badan Kemendiknas, 809) Badan Kemendiknas, 810) Badan Kemendiknas, 811) Badan Kemendiknas, 812) Badan Kemendiknas, 813) Badan Kemendiknas, 814) Badan Kemendiknas, 815) Badan Kemendiknas, 816) Badan Kemendiknas, 817) Badan Kemendiknas, 818) Badan Kemendiknas, 819) Badan Kemendiknas, 820) Badan Kemendiknas, 821) Badan Kemendiknas, 822) Badan Kemendiknas, 823) Badan Kemendiknas, 824) Badan Kemendiknas, 825) Badan Kemendiknas, 826) Badan Kemendiknas, 827) Badan Kemendiknas, 828) Badan Kemendiknas, 829) Badan Kemendiknas, 830) Badan Kemendiknas, 831) Badan Kemendiknas, 832) Badan Kemendiknas, 833) Badan Kemendiknas, 834) Badan Kemendiknas, 835) Badan Kemendiknas, 836) Badan Kemendiknas, 837) Badan Kemendiknas, 838) Badan Kemendiknas, 839) Badan Kemendiknas, 840) Badan Kemendiknas, 841) Badan Kemendiknas, 842) Badan Kemendiknas, 843) Badan Kemendiknas, 844) Badan Kemendiknas, 845) Badan Kemendiknas, 846) Badan Kemendiknas, 847) Badan Kemendiknas, 848) Badan Kemendiknas, 849) Badan Kemendiknas, 850) Badan Kemendiknas, 851) Badan Kemendiknas, 852) Badan Kemendiknas, 853) Badan Kemendiknas, 854) Badan Kemendiknas, 855) Badan Kemendiknas, 856) Badan Kemendiknas, 857) Badan Kemendiknas, 858) Badan Kemendiknas, 859) Badan Kemendiknas, 860) Badan Kemendiknas, 861) Badan Kemendiknas, 862) Badan Kemendiknas, 863) Badan Kemendiknas, 864) Badan Kemendiknas, 865) Badan Kemendiknas, 866) Badan Kemendiknas, 867) Badan Kemendiknas, 868) Badan Kemendiknas, 869) Badan Kemendiknas, 870) Badan Kemendiknas, 871) Badan Kemendiknas, 872) Badan Kemendiknas, 873) Badan Kemendiknas, 874) Badan Kemendiknas, 875) Badan Kemendiknas, 876) Badan Kemendiknas, 877) Badan Kemendiknas, 878) Badan Kemendiknas, 879) Badan Kemendiknas, 880) Badan Kemendiknas, 881) Badan Kemendiknas, 882) Badan Kemendiknas, 883) Badan Kemendiknas, 884) Badan Kemendiknas, 885) Badan Kemendiknas, 886) Badan Kemendiknas, 887) Badan Kemendiknas, 888) Badan Kemendiknas, 889) Badan Kemendiknas, 890) Badan Kemendiknas, 891) Badan Kemendiknas, 892) Badan Kemendiknas, 893) Badan Kemendiknas, 894) Badan Kemendiknas, 895) Badan Kemendiknas, 896) Badan Kemendiknas, 897) Badan Kemendiknas, 898) Badan Kemendiknas, 899) Badan Kemendiknas, 900) Badan Kemendiknas, 901) Badan Kemendiknas, 902) Badan Kemendiknas, 903) Badan Kemendiknas, 904) Badan Kemendiknas, 905) Badan Kemendiknas, 906) Badan Kemendiknas, 907) Badan Kemendiknas, 908) Badan Kemendiknas, 909) Badan Kemendiknas, 910) Badan Kemendiknas, 911) Badan Kemendiknas, 912) Badan Kemendiknas, 913) Badan Kemendiknas, 914) Badan Kemendiknas, 915) Badan Kemendiknas, 916) Badan Kemendiknas, 917) Badan Kemendiknas, 918) Badan Kemendiknas, 919) Badan Kemendiknas, 920) Badan Kemendiknas, 921) Badan Kemendiknas, 922) Badan Kemendiknas, 923) Badan Kemendiknas, 924) Badan Kemendiknas, 925) Badan Kemendiknas, 926) Badan Kemendiknas, 927) Badan Kemendiknas, 928) Badan Kemendiknas, 929) Badan Kemendiknas, 930) Badan Kemendiknas, 931) Badan Kemendiknas, 932) Badan Kemendiknas, 933) Badan Kemendiknas, 934) Badan Kemendiknas, 935) Badan Kemendiknas, 936) Badan Kemendiknas, 937) Badan Kemendiknas, 938) Badan Kemendiknas, 939) Badan Kemendiknas, 940) Badan Kemendiknas, 941) Badan Kemendiknas, 942) Badan Kemendiknas, 943) Badan Kemendiknas, 944) Badan Kemendiknas, 945) Badan Kemendiknas, 946) Badan Kemendiknas, 947) Badan Kemendiknas, 948) Badan Kemendiknas, 949) Badan Kemendiknas, 950) Badan Kemendiknas, 951) Badan Kemendiknas, 952) Badan Kemendiknas, 953) Badan Kemendiknas, 954) Badan Kemendiknas, 955) Badan Kemendiknas, 956) Badan Kemendiknas, 957) Badan Kemendiknas, 958) Badan Kemendiknas, 959) Badan Kemendiknas, 960) Badan Kemendiknas, 961) Badan Kemendiknas, 962) Badan Kemendiknas, 963) Badan Kemendiknas, 964) Badan Kemendiknas, 965) Badan Kemendiknas, 966) Badan Kemendiknas, 967) Badan Kemendiknas, 968) Badan Kemendiknas, 969) Badan Kemendiknas, 970) Badan Kemendiknas, 971) Badan Kemendiknas, 972) Badan Kemendiknas, 973) Badan Kemendiknas, 974) Badan Kemendiknas, 975) Badan Kemendiknas, 976) Badan Kemendiknas, 977) Badan Kemendiknas, 978) Badan Kemendiknas, 979) Badan Kemendiknas, 980) Badan Kemendiknas, 981) Badan Kemendiknas, 982) Badan Kemendiknas, 983) Badan Kemendiknas, 984) Badan Kemendiknas, 985) Badan Kemendiknas, 986) Badan Kemendiknas, 987) Badan Kemendiknas, 988) Badan Kemendiknas, 989) Badan Kemendiknas, 990) Badan Kemendiknas, 991) Badan Kemendiknas, 992) Badan Kemendiknas, 993) Badan Kemendiknas, 994) Badan Kemendiknas, 995) Badan Kemendiknas, 996) Badan Kemendiknas, 997) Badan Kemendiknas, 998) Badan Kemendiknas, 999) Badan Kemendiknas, 1000) Badan Kemendiknas, 1001) Badan Kemendiknas, 1002) Badan Kemendiknas, 1003) Badan Kemendiknas, 1004) Badan Kemendiknas, 1005) Badan Kemendiknas, 1006) Badan Kemendiknas, 1007) Badan Kemendiknas, 1008) Badan Kemendiknas, 1009) Badan Kemendiknas, 1010) Badan Kemendiknas, 1011) Badan Kemendiknas, 1012) Badan Kemendiknas, 1013) Badan Kemendiknas, 1014) Badan Kemendiknas, 1015) Badan Kemendiknas, 1016) Badan Kemendiknas, 1017) Badan Kemendiknas, 1018) Badan Kemendiknas, 1019) Badan Kemendiknas, 1020) Badan Kemendiknas, 1021) Badan Kemendiknas, 1022) Badan Kemendiknas, 1023) Badan Kemendiknas, 1024) Badan Kemendiknas, 1025) Badan Kemendiknas, 1026) Badan Kemendiknas, 1027) Badan Kemendiknas, 1028) Badan Kemendiknas, 1029) Badan Kemendiknas, 1030) Badan Kemendiknas, 1031) Badan Kemendiknas, 1032) Badan Kemendiknas, 1033) Badan Kemendiknas, 1034) Badan Kemendiknas, 1035) Badan Kemendiknas, 1036) Badan Kemendiknas, 1037) Badan Kemendiknas, 1038) Badan Kemendiknas, 1039) Badan Kemendiknas, 1040) Badan Kemendiknas, 1041) Badan Kemendiknas, 1042) Badan Kemendiknas, 1043) Badan Kemendiknas, 1044) Badan Kemendiknas, 1045) Badan Kemendiknas, 1046) Badan Kemendiknas, 1047) Badan Kemendiknas, 1048) Badan Kemendiknas, 1049) Badan Kemendiknas, 1050		

DAFTAR KONTRAK KERJASAMA HIBAH LANGSUNG BARANG DAN JASA
Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas

No	Nama Program	Lembaga / Donor	No. Register	Periode Proyek			Perpanjangan	Penanggung Jawab	MPHLBIS Tahun 2019			Jangka Waktu Periode Pelaporan	Penelitian Hibah yang ditunjuk	Piran Bappenas dalam Hibah	K/L atau Organisasi Lain yang Terlibat	Keterangan Lainnya	
				Mulai	Tutup				Nomor	Tanggal	Nilai						
17	Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance (SCAA)	USAID	71125701					Dit. Jasa Keuangan	201901907312020	16 Desember 2019	22.430.048.560						
									201901907312033	31 Desember 2019	2.363.334.360						
18	Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ) Phase II	DFAT	29JFW1VA	29 Mei 2017	29 Mei 2022			Dit. Hukum Dan Regulasi	201901907312016	26 Nopember 2019	602.347.130						
									201901907312015	26 Nopember 2019	640.938.269						
									201901907312017	26 Nopember 2019	838.601.271						
									201901907312014	26 Nopember 2019	273.986.336						
									201901907312035	31 Desember 2019	896.102.741						
19	Sustainable Infrastructure Assistance Program (C-TA SIAP) - ADB	ADB	74973301	18 March 2014	18 March 2018	2019/2020		Dit. Transportasi						Executing Agency	MPW, MoT		
20	Empowering Indonesia Women for Poverty Reduction (MAMPU) Phase II	DFAT	279QWFLUA	25 Januari 2017	30 Juni 2020			Dit. Keluarga, Perempuan, Anak,	201901907312021	18 Desember 2019	89.074.551.702						
									201901907312028	31 Desember 2019	39.488.275.213						
21	Project for Development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi								201901907312026	31 Desember 2019	61.411.000.000						
TOTAL																	
													945.924.048.872				
													119.534.892.274				

DAFTAR KONTRAK KERJASAMA HIBAH LANGSUNG UANG
Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas

No	Nama Program	Lembaga Donor	No. Regisr.	Penanggung Jawab	SPHL/SPHL-SP4HL Tahun 2019				Jangka Waktu Periode Pelaporan	Femorkas Hibah yang ditunjuk	Peran Bappenas dalam Hibah	K/L atau Organisasi Lain yang Terlibat	Keterangan Lainnya
					Nomor	Tanggal	Nilai						
							Penerimaan	Pengeluaran					
1	Kerjasama RI (Bappenas) - UNICEF	UNICEF	2XFJZUTA	Dit. Kesehatan dan Gizi	1914000000000063	31-Dec-19	6.418.917.745	4.478.749.823		BPKP, Internal UNICEF, Stephen Moore	Executing Agency		
					191400500370002	31-Dec-19	-	-	-1.353.823.080				
					191400500370001	31-Dec-19	-	-	-133.568.686				
2	Program Kerjasama RI - UNFPA siklus 9 (2016-2020)	UNFPA	2LV9UC8A	Dit. Keluarga, Perencanaan, Anak, Pemuda dan Olahraga	191400500320001	04-Sep-19	-	-	-71.679.564	BPKP	1. <u>Selaras</u> <u>Government Coordinating Authority</u> (GCA) yang bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA 2. Sebagai Mitra Pelaksana yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap output yang menjadi tanggung jawab Bappenas (output Right Based Family Planning(RFP, output Youth Policies Development(YPD) dan Population and Data Analysis(PDA) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pencapaian hasilnya	8 Mitra Pelaksana : 1) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN(Bappenas, 2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, 3) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengendalian Penyakit (P2PT), Kementerian BKKBN, 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7) Badan Pusat Statistik dan 8) Komnas Perempuan	
					191400500320003	31-Dec-19	1.196.860.173	2.102.313.669					
3	Rural Empowerment and Agricultural Development Programme Scaling-Up Initiative (READSI)	IFAD	191SRJYA	Dit. Pangan dan Pertanian	191400508670001	31-Dec-19	0	417.566.824					
					1914000000000144	31-Dec-19	8.379.300.000	2.882.306.000					
4	Dukungan Environmental Support Programme Phase III (ESP3) kepada Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)-DANIDA	Danida, Denmark	2JCK36Q	Saker ICCTF	191400607910001	31-Dec-19	5.985.634	2.480.808.886		IBAU/Auditor Independen	Memfasilitasi proses register hibah dan pelaporan pertanggungjawaban hibah kepada Kementerian	KESDM, KLHK, LSM/CSO, dan Perguruan Tinggi	
					191400607900001	31-Dec-19	0	7.529.266.087		IBAU/Auditor Independen	Memfasilitasi proses register hibah dan pelaporan pertanggungjawaban hibah kepada Kementerian	LSM/CSO, dan Perguruan Tinggi	
5	USAID Support for Indonesia's Climate Change Trust Fund (ICCTF)	USAID	2SLYR55M	Saker ICCTF	191400607900002	31-Dec-19	0	5.472.608		IBAU/Auditor Independen	Memfasilitasi proses register hibah dan pelaporan pertanggungjawaban hibah kepada Kementerian	LSM/CSO, dan Perguruan Tinggi	
					191400607920001	31-Dec-19	5.966.398.075	10.918.882.321					
					191400607920003	31-Dec-19	0	981.775.090					
6	Forest and Peatland to Reduce Emission through Local Action - The Government of United Kingdom of the Great Britain and Northern Ireland acting through the Department for International (DFID) - UKOCCU	UKOCCU	2MFFVAHA	Saker ICCTF	191400607920004	31-Dec-19	0	118.532.921		IBAU/Auditor Independen	Memfasilitasi proses register hibah dan pelaporan pertanggungjawaban hibah kepada Kementerian	LSM/CSO, dan Perguruan Tinggi	
JUMLAH							21.987.461.427	31.915.674.149	-1.559.071.330				

Daftar Rekening Pemerintah

DAFTAR REKENING PEMERINTAH

No.	REKENING BENDAHARA	No. Rekening	Saldo Rekening per 31 Desember 2019	Keterangan
A.	SATUAN KERJA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS			
1	BPG 019 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	14490748	0,00	Rekening Aktif
2	BPP 019 PPK DM I	1449090827	0,00	Rekening Aktif
3	BPP 019 PPK DM II	1449090838	0,00	Rekening Aktif
4	BPP 019 PPK DM III	1449090849	0,00	Rekening Aktif
5	BPP 019 Kement PPN/BAPPENAS	1449090894	0,00	Rekening Aktif
6	BPP 019 BAPPENAS BPP DM V	1449090861	0,00	Rekening Aktif
7	BPP 019 BAPPENAS BPP DM VI	1449090656	0,00	Rekening Aktif
8	BPP 019 PPK P2A2 INSPEKTORAT	1449090816	0,00	Rekening Aktif
9	BPP 019 PPK PPN I	1449090747	0,00	Rekening Aktif
10	BPP 019 PPK PPN II	1449090770	0,00	Rekening Aktif
11	BPP 019 PPK PPN III	1449090758	0,00	Rekening Aktif
12	BPP 019 PPK PPN IV	1449090736	0,00	Rekening Aktif
13	BPP 019 PPK PPN V	1449090714	0,00	Rekening Aktif
14	BPP 019 PPK PPN VI	1449090725	0,00	Rekening Aktif
15	BPP 019 PPK PPN VII	1449090781	0,00	Rekening Aktif
16	BPP 019 PPK PPN VIII	1449090792	0,00	Rekening Aktif
17	BPP 019 PPK PPN IX	1449090769	0,00	Rekening Aktif
18	BPP 019 PPK PPN X	1449090850	0,00	Rekening Aktif
19	BPP 019 PPK PPN XI	1449090872	0,00	Rekening Aktif
20	BPP 019 PPK PPN XII	1449090883	0,00	Rekening Aktif
B.	SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MILLENIUM CHALLENGE INDONESIA			
1	BPg 019 Pengelola Hibah MCC	0253352294	0,00	Rekening Aktif
C	SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWAKILAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ICCTF			
1	BPg 019 Mjl WI Amn Dn Pwl Prb IKI Ind	1240007144711	0,00	Rekening Aktif
D	SATUAN KERJA KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH			
1	BPG 019 KNKS	1449090918	0,00	Rekening Aktif
E	SATUAN KERJA DANA DEKONSENTRASI			
1	BPG 022 Bappeda Prov Jabar 020060	040501000467307	Rekening Tidak Aktif	
2	BPg 026 Bappeda Provinsi Jawa Tengah	032501001149308	0,00	Rekening Aktif
3	BPG 030 BAPPEDA DIY	1040069014	0,00	Rekening Aktif
4	BPG 135 BAPPEDA JATIM 050060	0039301300000961	0,00	Rekening Aktif
5	BPG 001 Bappeda Provinsi Aceh	131101000107301	0,00	Rekening Aktif
6	BPg 123 Bappeda Propinsi Sumatera Utara	0269446528	0,00	Rekening Aktif
7	BPg 010 Bappeda Propinsi Sumatera Barat	21000101013984	0,00	Rekening Aktif
8	BPg 008 BAPPEDA PROV RIAU	0275897947	0,00	Rekening Aktif
9	BPg 012 BAPPEDA PROVINSI JAMBI	101046378	0,00	Rekening Aktif
10	BPG 014 Bappeda Prov Sumsel 110060 BA 55	1403011877	0,00	Rekening Aktif
11	BPg 017 Bappeda Provinsi Lampung 055	1140009774350	0,00	Rekening Aktif
12	BPG 042 BAPPEDA PROV KALBAR	1001002615	0,00	Rekening Aktif
13	BPG 043 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	024301002428307	0,00	Rekening Aktif
14	BPG 045 BAPPEDA PROV KALSEL	0310007672192	0,00	Rekening Aktif
15	BPG 046 BAPPEDA PROV. KALTIM	1480011486951	0,00	Rekening Aktif
16	BPG 049 Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1500007972001	0,00	Rekening Aktif
17	BPg 051 Bappeda Provinsi Sulteng	1510006178401	0,00	Rekening Aktif
18	BPG 054 Bappeda Prov Sulsel	0598620818	0,00	Rekening Aktif
19	BPG 060 Bappeda Prov Sulawesi Tenggara	00101055001227	0,00	Rekening Aktif
20	BPG (061) BAPPEDA PROVINSI MALUKU	0289841896	0,00	Rekening Aktif
21	BPg 037 Bappeda Provinsi Bali	275519748	0,00	Rekening Aktif
22	BPg 038 Bappeda Propinsi NTB	1610005344630	0,00	Rekening Aktif
23	BPG 039 BAPPEDA POV. NTT	00101030090100	0,00	Rekening Aktif
24	BPg 063 BAPPEDA Provinsi Papua	1540011188319	0,00	Rekening Aktif
25	BPG 016 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU	0003701300003248	0,00	Rekening Aktif
26	BPg 062 Bappeda Propinsi Maluku Utara 01 DK	1500009711084	0,00	Rekening Aktif
27	BPG 020 BAPPEDA PROVINSI BANTEN	0283351557	0,00	Rekening Aktif
28	BPg 015 BAPPEDA PROV. BABEL-01	006301001733301	0,00	Rekening Aktif
29	BPg 050 BAPPEDA Provinsi Gorontalo	002701001404304	0,00	Rekening Aktif
30	BPg 009 Bappeda Provinsi Kepulauan Riau	1988093018	0,00	Rekening Aktif
31	BPg 065 Bappeda Papua Barat 330096	0332237206	0,00	Rekening Aktif
32	BPG 178 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT	021801000954303	0,00	Rekening Aktif
33	BPG 185 BAPPEDA KALTARA 01 417761	0448815017	0,00	Rekening Aktif
	Jumlah		-	

Daftar Rekening Lainnya

DAFTAR REKENING LAINNYA

No.	SATKER / NAMA REKENING	No. Rekening	Saldo Rekening per 31 Desember 2019	Status Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi dengan DPKN	Status Berdasarkan Surat Pernyataan Penutupan Rekening
A. SATUAN KERJA KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS					
1	RPL 140 BAPPENAS UNFPA-CPAP	0107929088	0.00	Rekening Aktif	-
2	RPL 140 BAPPENAS - UNICEF	1220000050438	3.270.395.74	Rekening Aktif	-
3	RPL 140 PDHL BAPPENAS - 191SRJYA	0758012731	4.229.598.000.00	Rekening Aktif	-
B. SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWAKILAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ICCTF					
1	RPL 140 LWA-ICCTF	1040004523556	0.00	Rekening Aktif	-
2	RPL 140 LWA Bappenas - ICCTF 25L YR55M	1040004602202	0.00	Rekening Aktif	-
3	RPL 140 SEKRETARIAT MWA-ICCTF-2MFFVJHA	1040004776477	0.00	Rekening Aktif	-
4	RPL 019 Set LWAICCTF utk operasional	1240063200639	0.00	Rekening Aktif	-
Jumlah			4.232.868.395,74		

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 8:48 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	38,136,194	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,736,498,862	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	5,082,697,571	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	851,829,176
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	43,207,682,176	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,287,530	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	51,805,080	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	259,025
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,687,468,842	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	166,435,625	0
0.0	117114	Suku Cadang	33,435,914	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	1,225,000	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	8,597,374,046	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	2,695,169,719	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	46,785,182,527	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	24,878,944,149	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	442,853,200	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	713,570	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	235,738,746	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	1,484,443,750,305	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	433,773,685,330	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	157,938,995,269	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	352,692,000	0
0.0	134112	Irigasi	39,492,000	0
0.0	134113	Jaringan	5,627,818,566	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	97,304,922,142	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,090,945,179	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	236,258,194,736
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	18,822,558,857
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	125,961,430
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,752,535
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,992,731,824
0.0	161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	0
0.0	162151	Software	49,691,725,087	0
0.0	162161	Lisensi	6,091,587,352	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 8:48 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	68,180,544,422	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	6,977,126,803
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	33,538,223,962
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	2,287,111,512
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	0
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	2,271,235,291
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,275,449,866
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	197,392,416
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	38,136,194
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,538,268,769.112
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,895,435,183	0
0.0	313211	Transfer Keluar	26,154,967.366	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,606,311,148,017
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	1,342,010,649,166
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	1,323,834,573
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	406,528,445,266
0.0	391119	Koreksi Lainnya	2,793,472,009	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	902,016,992,846
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	1,977,855.635	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	13,638,230,904	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	32,388,888
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	991,150,756
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	135,423,365
3.0	425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	360,047,373
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	10,802
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	51,805,080
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,414,000
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	30,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	36,389,578
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	3,270,441,023
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	37,445,535
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	350
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	12,562,834,217
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	43,845,986,960	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	3,862,800
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	644,426	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	55,201

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 8:48 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,441,266,508	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	786,536,047	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,857,650,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	3,240,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,781,965,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	14,100,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	512,164,857	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,921,012,920	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,365,800,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	314,250
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	688,590,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	2,960,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	362,684,050	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	683,050
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	96,492,980,909	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	873,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	30,863,796,477	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	301,054,882	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4,552,471,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	10,309,435,452	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,241,816,131	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	6,901,750
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	30,497,403,500	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	405,438,750
3.0	521218	Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	22,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	150,056,029,810	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1,430,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	6,240,364,268	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	935,996,992	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	732,070,815	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	944,222,347	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	39,517,120	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultansi	1,044,764,439,052	0
3.0	522141	Beban Sewa	87,778,098,327	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	37,302,182,110	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	17,825,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	124,908,390,683	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,601,273,800	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,825,645,162	0
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	33,752,771	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451,290,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 02/05/2020 8:48 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	145,240,786,382	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	1,818,986,368
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,143,618,981	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	406,878
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81,186,667,460	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	139,970,371
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105,383,292,221	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	1,821,814,320
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	19,162,386,130	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	572,955,820
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	16,382,982,038	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	302,423,581
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55,234,497,964	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,723,303,038	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	50,384,572	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,101,014	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	129,859,429	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	4,106,343,496	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	657,361,415	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	741,614,013	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,284,021,065	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	569,648,448	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	59,615,546	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1,050,000	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	2,906,836,648	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	4,294,617,114	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	808,053,874,347	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	66,769,607,066	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	21,097,069,302	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	351,245,380	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,639,618,818	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	11,237,560,823	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	259,025	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	298,612,555	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	461,465,409	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	245,070,138	0
JUMLAH			6,125,722,394,713	6,125,722,394,713

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 17/04/20 5:08 PM

Halaman : 1

Prig ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0	32,388,888	0	32,388,888	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	991,150,756	0	991,150,756	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	135,922,678	0	135,922,678	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	360,047,373	0	360,047,373	0
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	1,519,509,695	0	1,519,509,695	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan	0	10,802	0	10,802	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	10,802	0	10,802	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257					
4258	Pendapatan Denda	0	1,638,200	0	1,638,200	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	30,000,000	0	30,000,000	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	31,638,200	0	31,638,200	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258					
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	36,389,578	0	36,389,578	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,270,441,023	0	3,270,441,023	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	37,445,535	0	37,445,535	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	350	0	350	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,344,276,486	0	3,344,276,486	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259					
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	4,895,435,183	0	4,895,435,183	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	4,895,435,183	0	4,895,435,183	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3
Tanggal : 18/04/20 4:16 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	32,388,888	0	32,388,888	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	991,150,756	0	991,150,756	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	135,922,678	0	135,922,678	0
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	0	360,047,373	0	360,047,373	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	10,802	0	10,802	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,638,200	0	1,638,200	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	30,000,000	0	30,000,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	36,389,578	0	36,389,578	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,270,441,023	0	3,270,441,023	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	37,445,535	0	37,445,535	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	350	0	350	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN PERENCANAAN	0	4,895,435,183	0	4,895,435,183	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	4,895,435,183	0	4,895,435,183	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 18/04/20 4:16 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl -

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL					
055010100K	BA(055) ES1(01) DKI JAKARTA	0	4,694,714,941	0	4,694,714,941	0
017312	KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS					
	JUMLAH PENDAPATAN 055010100KP BA(055) ES1(01) DKI JAKARTA	0	4,694,714,941	0	4,694,714,941	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
966009	Pengelola Hibah MCC	0	198,025,440	0	198,025,440	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	198,025,440	0	198,025,440	
055010100K	BA(055) ES1(01) DKI JAKARTA					
966010	Majelis Wali Amanat Dana Perwalan Perubahan Iklim Indonesia//ICCTF	0	299,000	0	299,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 055010100KP BA(055) ES1(01) DKI JAKARTA	0	299,000	0	299,000	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
040069	Bappeda Provinsi DIY	0	10,802	0	10,802	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	10,802	0	10,802	
055013400	BA(055) ES1(01) SULAWESI BARAT					
340030	Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	0	2,385,000	0	2,385,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 055013400 BA(055) ES1(01) SULAWESI	0	2,385,000	0	2,385,000	
	BARAT					
	JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN PERENCANAAN	0	4,895,435,183	0	4,895,435,183	
	PEMBANGUNAN NASIONAL					
	JUMLAH PENDAPATAN	0	4,895,435,183	0	4,895,435,183	

Daftar Realisasi Satuan Kerja Pusat

DAFTAR REALISASI SATKER PUSAT KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No	Satker	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi	Realisasi Belanja	
				per 31 Desember 2019	%
Kantor Pusat					
1	Kantor Menteri Negara PPN/ Bappenas	1.647.240.376.000	1.671.655.064.000	1.432.240.529.261	85,68
2	Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Indonesia	7.500.000.000	15.290.000.000	14.911.015.936	97,52
3	Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim	19.000.000.000	47.549.758.000	47.371.120.745	99,62
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	75.000.000.000	69.750.000.000	56.206.461.993	80,58
Jumlah Realisasi Kantor Pusat		1.748.740.376.000	1.804.244.822.000	1.550.729.127.935	86

Daftar Realisasi Dana Dekonsentrasi

DAFTAR REALISASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No	Satker	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi	Realisasi Belanja	
				per 31 Desember 2019	%
Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi					
1	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	1.144.613.000	1.144.613.000	1.128.034.316	98,55
2	Bappeda Propinsi DIY	920.491.000	920.491.000	768.091.550	83,44
3	Bappeda Propinsi Jawa Timur	471.645.000	471.645.000	369.394.549	78,32
4	Bappeda Propinsi Aceh	522.645.000	522.645.000	232.470.217	44,48
5	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	1.006.891.000	1.006.891.000	879.060.200	87,30
6	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	958.891.000	958.891.000	937.596.887	97,78
7	Bappeda Propinsi Riau	962.491.000	962.491.000	962.347.965	99,99
8	Bappeda Propinsi Jambi	931.291.000	931.291.000	910.957.122	97,82
9	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	1.100.613.000	1.100.613.000	1.096.247.632	99,60
10	Bappeda Propinsi Lampung	1.111.434.000	1.411.434.000	1.411.433.795	100,00
11	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	949.291.000	949.291.000	893.712.632	94,15
12	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	672.483.000	672.483.000	499.612.373	74,29
13	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	961.291.000	961.291.000	715.166.400	74,40
14	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	1.006.291.000	1.006.291.000	979.564.700	97,34
15	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	1.006.291.000	1.352.264.000	1.209.430.362	89,44
16	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	1.354.491.000	1.354.491.000	1.350.857.142	99,73
17	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	1.355.091.000	1.355.091.000	1.202.685.300	88,75
18	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	504.045.000	504.045.000	492.906.193	97,79
19	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	1.027.891.000	1.027.891.000	954.198.312	92,83
20	Bappeda Propinsi Maluku	1.427.101.000	1.427.101.000	1.358.694.281	95,21
21	Bappeda Propinsi Bali	976.291.000	976.291.000	505.629.588	51,79
22	Bappeda Propinsi NTB	974.491.000	974.491.000	869.826.033	89,26
23	Bappeda Propinsi NTT	1.303.291.000	1.303.291.000	1.294.846.190	99,35
24	Bappeda Propinsi Papua	1.252.891.000	1.252.891.000	1.252.891.000	100,00
25	Bappeda Propinsi Bengkulu	940.291.000	940.291.000	884.205.017	94,04
26	Bappeda Propinsi Maluku Utara	1.167.091.000	1.167.091.000	1.063.585.594	91,13
27	Bappeda Propinsi Banten	823.291.000	823.291.000	656.422.100	79,73
28	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	913.291.000	913.291.000	843.039.790	92,31
29	Bappeda Propinsi Gorontalo	1.340.483.000	1.340.483.000	1.265.641.774	94,42
30	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-	955.291.000	911.613.856	95,43
31	Bappeda Propinsi Papua Barat	1.260.448.000	1.260.448.000	526.672.717	41,78
32	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	1.066.291.000	1.066.291.000	1.042.731.643	97,79
Jumlah Realisasi Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi		31.413.421.000	33.014.685.000	29.469.567.230	89,26

Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran

DAFTAR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

No	SATUAN KERJA	Jumlah
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	38.136.194
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia	-
3	MWA ICCTF	-
4	Komite Nasional Keuangan Syariah	-
5	Bappeda Propinsi Jawa Barat	-
6	Bappeda Propinsi Jawa Tengah	-
7	Bappeda Propinsi DIY	-
8	Bappeda Propinsi Jawa Timur	-
9	Bappeda Propinsi Aceh	-
10	Bappeda Propinsi Sumatera Utara	-
11	Bappeda Propinsi Sumatera Barat	-
12	Bappeda Propinsi Riau	-
13	Bappeda Propinsi Jambi	-
14	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan	-
15	Bappeda Propinsi Lampung	-
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat	-
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah	-
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan	-
19	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	-
20	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara	-
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara	-
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah	-
23	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan	-
24	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara	-
25	Bappeda Propinsi Maluku	-
26	Bappeda Propinsi Bali	-
27	Bappeda Propinsi NTB	-
28	Bappeda Propinsi NTT	-
29	Bappeda Propinsi Papua	-
30	Bappeda Propinsi Bengkulu	-
31	Bappeda Propinsi Maluku Utara	-
32	Bappeda Propinsi Banten	-
33	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	-
34	Bappeda Propinsi Gorontalo	-
35	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau	-
36	Bappeda Propinsi Papua Barat	-
37	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat	-
Jumlah		38.136.194

Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap
Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2018

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas											
NO	NAMA WAJIB BAYAR / SETOR	TANGGAL BAYAR	KODE KL/UNIT/SATKER	KODE BILLING	KODE BANK/POS	NTFN	NTR/NTF	MATA UANG	KODE AKUN	KETERANGAN	SETORAN PER AKUN (Rp)
1	BPPDM6	07/01/2020	055/01/017312	820200107234775	520009000990	8F57555DE3NUJEN	45573	IDR	815511	Pengembalian TUP Nihil TA. 2019	2.500
2	Tejaningsih	07/01/2020	055/01/017312	820200107249412	520009000990	504722G4UK0PD304	612742	IDR	815514	Pengembalian Sisa TUP 4 TA 2019 Direktorat SDEMP	37.596.689
3	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPN I	07/01/2020	055/01/017312	820200107341689	520009000990	0C0C98N3DE1GATRP	285941	IDR	815514	Pengembalian sisa tambahan uang persediaan th anggaran yang lalu kegiatan sekretariat PPK PPN I	486.999
4	BPPDM6	08/01/2020	055/01/017312	820200108497259	520009000990	FE6298N3DE1HE688	112291	IDR	815114	Pengembalian Uang RDK s.n. Raden A. Yusuf; 22 November 2019	50.000
Total (Rp)								Total (Rp)		38.136.194	

Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas
LKKL Tahun 2018

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
SPI 2018				
1	Pengendalian Belanja Perjalanannya Dalam Negeri Belum Memadai	BPK Merekomendasikan Menteri agar PPN/Kepala Bappenas Memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas melalui Kepala Biro Umum untuk: a. Melakukan penyempurnaan Data Base Aplikasi SIMBAR dengan menambahkan informasi nomor dan tanggal Surat Tugas serta Informasi Realisasi Pelaksanaan Perjalanannya Dinas. b. Menyusun SOP Perjalanannya Dinas yang Pencairan Dananya melalui LS Bendahara terkait dengan Pemberian Uang Perjalanannya Dinas serta Pendokumentasian dan Verifikasi atas Bukti	1. Nota Dinas Inspektur Bidang Administrasi Umum kepada Kepala Bagian Verifikasi Anggaran No. 178/I.01.ND/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Undangan Narasumber. 2. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Aplikasi New SIMBAR tanggal 29 Mei 2019. 3. Materi penyempurnaan Aplikasi SIMBAR Tahun 2019 (power poin) yang disampaikan dalam acara “Pemaparan Pengembangan Aplikasi SIMBAR Khususnya Perbaikan Modul dan Penyempurnaan Database, The Grove Suites, 29 Mei 2019. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Kepala Biro Umum No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 5. Daftar Hadir Rapat Penyusunan SOP tanggal 3 Desember	1.a. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi. 1.b. Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		Pertanggungjawabannya. c. Memerintahkan PPK dan BPP membuat Monitoring atas Penyerahan Pertanggungjawaban Uang LS Bendahara Berdasarkan Unit Kerja yang Dikelolanya.	2019. 6. Catatan Hasil Rapat Penyusunan SOP tanggal 3 Desember (Draf SOP Perjalanan Dinas)	1.c. Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi.
KEPATUHAN 2018				
1	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar Menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan: a. Para PPK untuk: 1) Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran terkait Informasi Lintas Keanggotaan Tim Pelaksana	1. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada PPK DM I, DM II, DM IV, PPN III, PPN V, PPN VI, PPN X No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. Plt. Sesmen PPN/Sestama Bappenas menginstruksikan kepada PPK DM I, DM II, DM IV, PPN III, PPN V, PPN VI, PPN X untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran terkait informasi lintas keanggotaan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK yang	1.a.1) Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		Kegiatan yang ditetapkan dalam SK yang dibayarkan Honorariumnya. 2) Mempertanggungjawabkan Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp333.030.000,00. b. Kepala Biro Umum untuk menginstruksikan kepada Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk memperbaiki modul Honorarium Kegiatan pada aplikasi SIMBAR sesuai ketentuan yang berlaku.	dibayarkan honorariumnya dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dengan menyetorkan ke Kas Negara. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sesmen, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Inspektur Utama, Deputi Bidang Ekonomi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Direktur Otonomi Daerah, Direktur Pengairan dan Irigasi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan	1.a.2) Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi. 1.b. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
			Sosial dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BPN No. 1088/Ses.ND/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kementerian PPN/Bappenas TA 2018. 3. Nota Dinas Inspektur Bidang Administrasi Umum kepada Kepala Bagian Verifikasi Anggaran No. 178/I.01.ND/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Undangan Narasumber dengan agenda pemaparan pengembangan Aplikasi SIMBAR khususnya perbaikan modul dan penyempurnaan databas. 4. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Aplikasi New SIMBAR tanggal 29 Mei 2019. 5. Materi penyempurnaan Aplikasi SIMBAR Tahun 2019 (power poin) yang disampaikan dalam acara "Pemaparan Pengembangan Aplikasi SIMBAR Khususnya Perbaikan Modul dan Penyempurnaan Database, The Grove Suites, 29 Mei 2019.	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKGL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
2	Kelebihan Perhitungan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar Menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan PPK DM III untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Uang Harian sebesar Rp195.821.402,40 (Rp221.453.111,40 – Rp25.631.709,00). b. Memberikan Pembinaan kepada PPK DM III dan BPP DM III yang tidak cermat dalam menguji dan melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.	1. Nota Dinas Sesmen No. 695/Ses.M/04/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2018. 2. Bukti setor terkait pengembalian uang harian perjalanan dinas luar negeri Tahun 2018 sebesar Rp124.343.235,20. Sehingga, uang harian perjalanan dinas luar negeri Tahun 2018 yang belum dikembalikan ialah sebesar Rp30.013.456,00 (Rp221.453.111,40 – Rp124.343.235,20 = Rp30.013.456,00) 3. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada PPK DM III dan BPP PPK DM III No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	2.a. Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi. 2.b. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
3	Pengelolaan Belanja Pemeliharaan pada Satker MCC Belum Memadai	BPK Merekomendasikan PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Satker MCC atas persetujuan pengeluaran biaya pemeliharaan yang bukan untuk mendukung kegiatan operasional satker.	Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada PPK Satker Pengelola Hibah MCC No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	3. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi.
4	Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan PPK DM IV untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran hotel	1. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada PPK DM IV No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada PPK DM III, DM IV dan BPP PPK DM I, DM III, DM IV, DM V, PPN I, PPN III, P2A2 No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18	4.a. Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKGL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		sebesar Rp8.141.250,00. b. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK DM III dan DM IV serta Bendahara Pengeluaran Pembantu DM I, DM III, DM IV, PPN I, PPN III, P2A2 dan P2SPAB yang tidak mematuhi peraturan pengelolaan kas yang berlaku. c. Meningkatkan pengawasan Pengelolaan Kas di Kementerian PPN/Bappenas.	Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. PPK DM IV telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran hotel sebesar Rp8.141.250 ke kas negara pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan bukti pembayaran kode billing 820190627196466 dan nomor NTPN 9184A14UD2A2G0I8.	4.b. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi.
5	Pengelolaan yang Persediaan kepada Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda / Swasta Belum Sepenuhnya Memadai	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk:	Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada KPA Satker Pengelola Hibah MCC dan PPK Satker Pengelola Hibah MCC No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	4.c. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKGL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		a. Menyusun jadwal terkait target penyelesaian penyerahan persediaan dari Hibah MCC kepada masyarakat/pemda/swasta. b. Melakukan serah terima atas seluruh persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta.		5.a. Tindak Lanjut Telah Sesuai Rekomendasi. 5.b. Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
Management Letter 2018				
1	Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Berlisensi Software Belum Dikenakan Denda	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: a. PPK P2SPAB yang kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan. b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Tahun 2018. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada PPK DM V dan PPHP Pengadaan Software Berlisensi No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan	*) BPK belum mengirimkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas <i>Management Letter</i> Tahun 2018 s.d. Semester II 2019

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
			Kuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	
2	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tidak Berpedoman pada Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan pihak-pihak terkait untuk pengaturan terkait uang representasi delegasi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri sehingga dapat diterapkan di seluruh Kementerian/Lembaga.	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan dan Kepala Biro Umum No.	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKGL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
			1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	
3	Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 Belum Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk meningkatkan pengawasan perencanaan penggunaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
			Kepala Biro Umum, PPK DM III dan BPP PPK DM III No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	
4	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dan Uang Makan Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia agar: 1) Segera menyusun draft peraturan terkait Tunjangan Prestasi untuk disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. 2) Menyempurnakan Sistem Presensi yang mengakomodir	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		peng-input-an bukti dokumen pada Tahun 2018 dan Sistem Presensi yang terintegrasi dengan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. 3) Melakukan pembinaan terhadap PIC kehadiran/presensi. 4) Meningkatkan pengawasan terkait presensi dan ketidakhadiran pegawai. b. Memerintahkan PIC kehadiran pegawai untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp24.095.857,60. c. Memerintahkan para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan	Kepala Biro Sumber Daya Manusia No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 5. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Para PIC Kehadiran/Absensi Pegawai No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 6. Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia No. 928/B.02.ND/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pengembalian Uang Makan. 7. Bukti Setor terkait pengembalian tunjangan kinerja sebesar Rp24.095.857,60. Sehingga, pembayaran tunjangan kinerja telah selesai dilaksanakan. 8. Bukti Setor terkait pengembalian uang makan sebesar Rp10.745.750. Sehingga, pembayaran uang makan telah selesai dilaksanakan.	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		kelebihan pembayaran Uang Makan sebesar Rp9.906.650,00 (Rp10.745.750,00 – Rp839.100,00).		
5	Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Gedung TS2 Lantai 3 dan Lantai 4 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada: a. Pokja V ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi harga penawaran. b. PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan. c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Pokja V Unit Layanan Pengadaan, PPK DM V, PPHP	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.	Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Gedung TS2 Lantai 3 dan Lantai 4 No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	
6	Proses Penetapan Pelelangan dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Pusat data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan PPK P2SPAB mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp85.355.937,27. b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.991.918 (sudah disetorkan ke	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	4.

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		Kas Negara). c. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada: 1. Pokja II ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi harga. 2. Kasubbag Perencanaan Pengadaan yang tidak cermat. 3. PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam: (a) Menyusun HPS sehingga membayar pekerjaan dengan harga lebih tinggi dari HPS dan merugikan keuangan negara. (b) Pengendalian dan pengawasan serta pembayaran pelaksanaan		

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		pekerjaan dengan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku khususnya dalam proses pelelangan. 4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.		
7	Proses Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Gedung Saleh Afif Lantai 4 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK Merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Pokja IV ULP untuk mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar	1. Nota Dinas Inspektur Utama kepada Sesmen No. 058/IU.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 2. Nota Dinas Sesmen kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1074/SES.ND/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.	

**LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKGL TAHUN 2018
KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**

NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT ENTITAS & DOKUMEN PENDUKUNG	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT SEMESTER II 2019
		Rp6.732.000,00. b. Memberikan pembinaan kepada Pokja IV ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi penawaran harga dengan melanggar ketentuan yang berlaku.	3. Memorandum Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sesmen No. 002/M.PPN/IU/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 4. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas kepada Pokja IV Unit Layanan Pengadaan No. 1087/Ses.M/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 5. Nota Dinas Inspektur Bidang Administrasi Umum kepada: (1) Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal, (2) Pokja IV Unit Layanan Pengadaan TA 2018 Nomor 288/I.01.ND/09/2019 tanggal 5 September 2019 Hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018. 6. Bukti Pengembalian dari Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK P2SPAB Bappenas sebesar Rp6.732.000.	

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Management Letter					
1.	Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan <i>Software</i> Berlisensi Belum Dikenakan Denda	BPK merekomendasikan PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: a. PPK P2SPAB kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan memberikan sanksi kepada: a. PPK P2SPAB karena kurang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan karena tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak	Mei – Desember 2019	
2.	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Berpedoman Ketentuan Berlaku	BPK merekomendasikan PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, dan pihak-pihak terkait untuk mengatur lebih lanjut peraturan terkait uang	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan pihak-pihak terkait perihal pengaturan uang representasi	Mei – Desember 2019	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		representasi delegasi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri sehingga dapat diterapkan di seluruh kementerian/lembaga.	delegasi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri.		
3.	Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk meningkatkan pengawasan perencanaan penggunaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk meningkatkan pengawasan perencanaan penggunaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.	Mei – Desember 2019	
4.	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dan Uang Makan Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia agar: 1) Segera menyusun <i>draft</i> peraturan terkait Tunjangan Prestasi untuk disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2) Menyempurnakan Sistem Presensi yang mengakomodir peng-input-an bukti dokumen pada Tahun 2018 dan Sistem Presensi yang terintegrasi dengan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas;	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Surat Sesmen PPN/Sestama Bappenas memerintahkan Kepala Biro SDM untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 3. Kepala Biro SDM akan: a. Menyusun <i>draft</i> peraturan terkait Tunjangan Prestasi untuk disahkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas; b. Menyempurnakan Sistem Presensi yang mengakomodir peng-input-an bukti dokumen pada Tahun 2018 dan Sistem Presensi yang	Mei – Desember 2019	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		3) Melakukan pembinaan terhadap PIC kehadiran/presensi pegawai; 4) Meningkatkan presensi dan kehadiran pegawai; b. Memerintahkan PIC kehadiran pegawai untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp24.095.857,60 dengan menyetorkan ke Kas Negara; c. Memerintahkan para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Uang Makan sebesar Rp9.906.650,00 (Rp10.745.750,00 - Rp839.100,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara.	terintegrasi dengan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas; c. Melakukan pembinaan terhadap PIC kehadiran/presensi pegawai; d. Meningkatkan pengawasan terkait presensi dan ketidakhadiran pegawai; 4. Surat Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan memerintahkan: a. PIC kehadiran pegawai untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp24.095.857,60 dengan menyetorkan ke Kas Negara; dan b. Memerintahkan para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Uang Makan sebesar Rp9.906.650,00 (Rp10.745.750,00 - Rp839.100,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara.		
5.	Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Gedung TS2 Lantai 3 dan Lantai 4 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada: a. Pokja V ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi harga penawaran;	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas memberikan sanksi kepada: a. Pokja V ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi harga penawaran;	Mei – Desember 2019	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan; dan c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.	b. PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan; dan c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.		
6.	Proses Penetapan dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar Sesmen menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan PPK P2SPAB mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp85.355.937,27 dengan menyetorkan ke Kas Negara; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada: 1) Pokja II ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi harga penawaran; 2) Kasubag Perencanaan Pengadaan yang tidak cermat dalam menyusun OE; 3) PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam: a) menyusun HPS sehingga membayar pekerjaan dengan harga lebih tinggi dari HPS dan merugikan Keuangan Negara; b) pengendalian dan pengawasan serta pembayaran pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mematuhi ketentuan yang	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan memberikan sanksi kepada: 1) Pokja II ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi harga penawaran; 2) Kasubag Perencanaan Pengadaan yang tidak cermat dalam menyusun OE; 3) PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam: a) menyusun HPS sehingga membayar pekerjaan dengan harga lebih tinggi dari HPS dan merugikan Keuangan Negara; b) pengendalian dan pengawasan serta pembayaran pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mematuhi ketentuan yang	Mei – Desember 2019	Kami tidak sepakat dengan rekomendasi BPK bahwa Kasubag Perencanaan dan PPK P2SPAB harus mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp85.355.937,27 dengan menyetorkan ke Kas Negara. Kami mengusulkan agar rekomendasi tidak mengembalikan ke kas negara dengan pertimbangan bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, proses evaluasi pengadaan barang/jasa dilakukan terhadap total harga penawaran dan tidak berdasarkan harga per unit pekerjaan. Selain itu, proses pengadaan juga sudah menghasilkan penyedia jasa dengan penawaran terendah.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		3) PPK P2SPAB yang tidak cermat dalam: a) menyusun HPS sehingga membayar pekerjaan dengan harga lebih tinggi dari HPS dan merugikan Keuangan Negara; b) pengendalian dan pengawasan pembayaran pelaksanaan pekerjaan dengan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku khususnya dalam proses pelelangan; dan 4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.	berlaku khususnya dalam proses pelelangan; 4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.		
7.	Proses Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Ruang Kerja Gedung Saleh Afif Lantai 4 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Pokja IV ULP untuk mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp6.732.000,00 dengan menyertakan ke Kas Negara; dan	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan memberikan sanksi kepada Pokja IV ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi penawaran harga;	Mei – Desember 2019	Kami tidak sepakat dengan rekomendasi mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp6.732.000,00 dengan menyertakan ke Kas Negara.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memberikan sanksi kepada Pokja IV ULP yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi penawaran harga dengan melanggar ketentuan yang berlaku.			Kami mengusulkan agar rekomendasi tidak mengembalikan ke Kas Negara dikarenakan: 1) PT TKS sebagai calon penyedia dengan penawaran terendah sebesar Rp739.840.000 tidak terpilih dalam proses evaluasi dan klarifikasi dengan alasan sebagai berikut: • Jadwal pekerjaan tidak menggambarkan pelaksanaan pekerjaan • Harga Satuan yang ditawarkan tidak mencerminkan pekerjaan yang dilaksanakan • Tidak melampirkan analisis <i>built in</i> dimana hal tersebut sangat diperlukan untuk menentukan spesifikasi bahan yang diperlukan 2) Dengan kondisi tersebut, ULP memilih calon penyedia dengan harga terendah kedua (PT. HCG)

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					dan tidak terdapat kerugian negara atas proses tersebut. 3) Oleh karena itu, penilaian kerugian negara sebesar Rp6.732.000 dengan cara mengurangkan nilai penawaran kedua terendah (PT HCG sebesar Rp746.572.000) dengan nilai penawaran terendah (PT TKS sebesar Rp739.840.000) adalah tidak relevan.

Jakarta, Mei 2019

Plt. Sekretaris Kementerian PPN/

& Sekretaris Utama Bappenas,



RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern					
1.	Pengendalian Belanja Perjalan Dinas Dalam Negeri Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Bappenas agar memerintahkan Sekretaris PPN/Sestama Bappenas melalui Kepala Biro Umum untuk : - Melakukan penyempurnaan database Simbar dengan menambahkan informasi nomor dan tanggal surat tugas, serta informasi realisasi pelaksanaan perjalanan dinas; - Menyusun SOP perjalanan dinas yang pencairan dananya melalui LS Bendahara terkait dengan pemberian uang perjalanan dinas serta pendokumentasian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawabannya; - Memerintahkan PPK dan BPP membuat <i>monitoring</i> atas penyerahan dan pertanggungjawaban uang LS Bendahara berdasarkan unit kerja yang dikelolanya.	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sestama Bappenas untuk PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sekretaris PPN/Sestama Bappenas melalui Kepala Biro Umum akan: - Melakukan penyempurnaan <i>database</i> Simbar dengan menambahkan informasi nomor dan tanggal surat tugas, serta informasi realisasi pelaksanaan perjalanan dinas; - Menyusun SOP perjalanan dinas yang pencairan dananya melalui LS Bendahara terkait dengan pemberian uang perjalanan dinas serta pendokumentasian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawabannya; - Memerintahkan PPK dan BPP membuat <i>monitoring</i> atas penyerahan dan pertanggungjawaban uang LS Bendahara berdasarkan unit kerja yang dikelolanya.	Mei - Desember 2019	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2.	Pengelolaan Belanja Pemeliharaan Tahun 2018 pada Sarker MCC Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Sarker MCC atas persetujuan pengeluaran biaya pemeliharaan yang bukan untuk mendukung kegiatan operasional sarker.	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Sarker MCC atas persetujuan pengeluaran biaya pemeliharaan yang bukan untuk mendukung kegiatan operasional sarker	Mei - Desember 2019	
3.	Pengelolaan Persediaan yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda/Swasta Belum Sepenuhnya Memadai	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Menyusun jadwal terkait target penyelesaian penyerahan Persediaan dari Hibah MCC kepada masyarakat/pemda/swasta; b. Melakukan serah terima atas seluruh Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta.	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan: a. menyusun jadwal terkait target penyelesaian penyerahan Persediaan dari Hibah MCC kepada masyarakat/pemda/swasta; b. melakukan serah terima atas seluruh Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta.	Mei - Desember 2019	

Jakarta, Mei 2019

Plt. Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas,



Dr. Ir. Gellwiyun Jusuf, M.Sc.
NIP. 19590427-198511 1 001

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2018

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
1.	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk: a. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menginstruksikan kepada: 1) Para PPK untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran terkait informasi lintas keanggotaan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK yang dibayarkan honorariumnya; 2) Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk memperbaiki modul Honorarium Kegiatan pada aplikasi Simbar sesuai ketentuan yang berlaku; dan	1. Surat Menteri Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Surat Sesmen PPN/Sestama Bappenas memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menginstruksikan PPK, Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran agar menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 3. PPK akan berkoordinasi dengan Bagian Verifikasi Anggaran terkait informasi SK Honorarium Tim; 4. Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran akan	Mei Desember 2019	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memerintahkan para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp333.030.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.	memperbaiki modul Honorarium Kegiatan pada aplikasi SIMBAR; 5. Para pihak terkait (penerima honorarium) akan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp333.030.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara.		
2.	Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar: a. Memerintahkan para pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Uang Harian sebesar Rp195.821.402,40 (Rp221.453.111,40 - Rp25.631.709,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara; b. Memberikan sanksi kepada PPK DM III dan BPP DM III yang tidak cermat dalam menguji dan melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.	1. Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; 2. Para pihak terkait akan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Uang Harian sebesar Rp195.821.402,40 dengan menyetorkan ke Kas Negara; 3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan memberikan sanksi kepada PPK DM III dan BPP DM III yang tidak cermat dalam menguji dan melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.	Mei Desember 2019	

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3.	Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk: - Memerintahkan PPK DM IV untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Hotel sebesar Rp125.027.250,00 (Rp116.886.000,00 + Rp8.141.250,00) dengan menyertakan ke Kas Negara; - Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK DM III dan PPK DM IV serta Bendahara Pengeluaran Pembantu DM I, DM III, DM IV, PPN I, PPN III, P2A2, dan P2SPAB yang tidak mematuhi peraturan pengelolaan Kas yang berlaku; dan - Meningkatkan pengawasan Pengelolaan Kas di Kementerian PPN/Bappenas.	- Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI; - Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan memberikan teguran tertulis kepada memerintahkan PPK DM IV agar lebih cermat dalam pertanggungjawaban pembayaran Hotel. - Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK DM III dan PPK DM IV serta Bendahara Pengeluaran Pembantu DM I, DM III, DM IV, PPN I, PPN III, P2A2, dan P2SPAB; - Sesmen PPN/Sestama Bappenas akan meningkatkan pengawasan pengelolaan kas di Kementerian PPN/Bappenas	Mei Desember 2019	Kementerian PPN/Bappenas tidak sepatutnya dengan rekomendasi penyeteroran ke kas negara sebesar Rp125.027.250. Kami mengusulkan agar tidak rekomendasi mengembalikan ke kas negara dengan pertimbangan bahwa pemindahan hotel dari Hotel Con ke Hotel SR yang lebih dekat dengan sekretariat (<i>base camp</i>) Kementerian PPN/Bappenas di Hotel Novotel Nusa Dua Bali dan lebih dekat dengan lokasi <i>side event</i> yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Hotel Inaya Putri Nusa Dua. Di sisi lain pembayaran yang sudah dilakukan ke Hotel Con tidak dapat dibatalkan/<i>non-refundable</i> mengingat pada saat itu sedang ada kegiatan tahunan IMF-WB (pemyataan hotel terlampir). Dengan demikian pembayaran tersebut lebih bersifat inefisiensi yang tidak seharusnya berakibat

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					penyetoran ke kas negara. Kelebihan pembayaran hotel lainnya (Rp8.141.250) disebabkan pejabat yang bersangkutan harus kembali ke Jakarta lebih cepat untuk menjadi mentor Diklat PIM I Pejabat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian hal tersebut lebih bersifat inefisiensi yang tidak seharusnya berakibat penyetoran ke kas negara.

Jakarta, Mei 2019
 Plt. Sekretaris Kementerian PPN/
 Sekretaris Utama Bappenas,



Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bagian Satker



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Jakarta, 20 Januari 2020

Nomor : 00811 /Dt.6.3/01/2020
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
(WANTKNAS)

Kepada Yth.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Di Tempat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bersama ini kami sampaikan ikhtisar laporan keuangan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) untuk kurun waktu Per 2019 *Unaudited*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika


Rachmat Mardiana
NIP. 19661111 199403 1 005

Tembusan :

1. Bapak Deputi Bidang Sarana dan Prasarana (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Bappenas

Pernyataan Tanggung Jawab Unit Badan Lainnya Bagian Satker



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT BADAN LAINNYA SATKER/ BAGIAN SATKER**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa unit badan lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari keuangan negara, baik yang mendapat dana APBN maupun non APBN, sehingga wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) adalah lembaga *multistakeholders* di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. WANTIKNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Kegiatan WANTIKNAS difasilitasi dari anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika.

Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di Dewan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) untuk kurun waktu per 2019 *Unaudited*.

Jakarta, 20 Januari 2020

Direktur Energi, Telekomunikasi
dan Informatika



NIP. 19661111 199403 1 005

Kepada YTH.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Cedung Priyadi Prapitosuharjo III Lt.2
Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat

Dari
Sekretariat Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
Gedung Graha MR 21 Jasingo Lantai 6, Jalan Menteng Raya No.21
Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 39831977

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN/NON APBN DAN ASET BERSIH
PER 2019 *Unaudited*
(dalam jutaan rupiah)

No	Nama UBL	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	BA
			BELANJA PEGAJAWI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN- LAIN						
1	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	Rp 7.367.800.000	*	Rp 7.195.430.706	*	*	Rp 7.195.430.706	Rp 172.369.294	*	9		055

Daftar Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah

DATA TUNTUTAN HUKUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Per 31 Desember 2019

No	Nomor Perkara Deskripsi Perkara	Penggugat Tergugat	Status Perkara		Gugatan/Petitum		Potensi Pengeluaran Negara				Amar Putusan
			Status	Keterangan	Materiil	Immateriil	Rupiah	Valas	Tanah	Immateriil	Keterangan
1.	No.Perkara: 318.PDT.G/2011/ PN. JKT.PST Pokok Gugatan: Perbuatan Melawan hukum (PMH) oleh penyelenggaraan negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999	Penggugat: Masyarakat Maluku- Maluku Utara yang diwakili oleh Syamsuri Launa Tergugat: 1. Presiden RI(Tergugat 1/T1); 2.Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Tergugat 2/T2); 3.Menteri Sosial (Tergugat 3/T3); 4.Gubernur Maluku (Tergugat 4/T4);	<i>Inkracht</i>		Rp 110.744. 438.640. 000		Rp 3.944.514. 500.000 + Rp 6.116.000 + Rp 500.000 + Rp 2.500.000 = Rp 3.994.523. 616.000				Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X: 1. Menteri Sosial Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Republik Indonesia, 2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Dahulu Menteri Percepatan

DATA TUNTUTAN HUKUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

[illegible]

DATA TUNTUTAN HUKUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

	(Tergugat 10/T10); 11.Menteri Koordinator Perekonomian (Tergugat 11/T11)	Gubernur Sulawesi Tenggara, 10. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan (Menko Polhukam), tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
--	--	---

DATA TUNTUTAN HUKUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Per 31 Desember 2019

2.	No.Perkara: 529/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST Register Perkara Kasasi 1852K/Pdt/2015	Penggugat: Masyarakat Maluku- Maluku Utara yang diwakili oleh Scharrom Law Office	Permohonan Kasasi Agustina Tuasun diwakili oleh Scharrom Law Office ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Rp 1.446.73 0.000.00 0,-	0	0	“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 1.Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima 2.Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.716.000 3.Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding dengan nomor register akta permohonan banding yaitu nomor: 160/Srt.Bdg/201 5/PN.JKT.PST jo Nomor 529/PDT.G/201 3/PN.JKT.PST.”
----	--	---	--	-----------------------------------	---	---	---

Per 31 Desember 2019

3.	No.Perkara: 19/PDT.G/2005/P N.BKN Pokok Gugatan:
----	---

Per 31 Desember 2019

**DATA TUNTUTAN HUKUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Per 31 Desember 2019

4.	No. Perkara: 1066 B/Pdt.Sus-Arbt/2019	4. Pemimpin (PIKITRING) Proyek Induk Pembangunan dan Jaringan Sumatera Barat Riau, sebagai Tergugat IV; 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Tergugat V; 6. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VI; 7. Direktur Utama PT. PLN (Persero), sebagai Turut Tergugat.	<i>inkracht</i>	Banding atas Putusan PN Jakarta Pusat								Putusan Mahkamah Agung Nomor 1066 B/Pdt.Sus-
----	---------------------------------------	---	-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA TUNTUTAN HUKUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Per 31 Desember 2019

	2. PT. Carbon Tropic Group (CTG) Termohon: Kementerian PPN/Bappenas		Nomor: 45/Pdt. G/2 019/PNJkt. Pst							Arbt/2019, sebagai berikut 1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding I: Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional dengan Anggota Sebagai Berikut: A. H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBARb., B. Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., FCBARb., C. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., dan Pemohon Banding II: 1. PT Carbontropic,
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Per 31 Desember 2019

[illegible]

Status	Jumlah Perkara	Potensi Material			Immaterial
		Rupiah	Valas	Tanah	
Belum Inkracht	2	Rp 1.509.262.058.700,-	-	-	-
Inkracht	2	Rp 3.994.523.616.000	-	-	-
Total	4	Rp 5.503.785.674.700	-	-	-

Nota Kesepakatan Angka Asersi Final

**NOTA KESEPAKATAN FINAL REVALUASI BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS (BA 055) TAHUN 2019
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 (AUDITED)**

Nomor : NKF Revaluasi-055/64/KN.2/2020

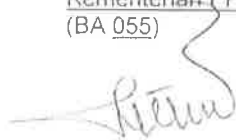
Pada hari ini, Rabu tanggal 29 April 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** terkait Revaluasi BMN secara **Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka terkait Revaluasi BMN yang disajikan dalam **Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas (BA 055) Tahun 2019** untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2019 (Audited)**.

Berdasarkan pembahasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan maka disepakati bahwa terkait revaluasi Barang Milik Negara pada BA 055.

1. Terdapat beberapa temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil revaluasi tersebut telah ditindaklanjuti pada aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA yang diupload ke Erekon-LK sebagaimana tercantum dalam LKKL Audited Tahun 2019 yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 21 April 2020 (Temuan pemeriksaan yang telah dilakukan koreksi tersebut sebagaimana terlampir pada Lampiran I).
2. Terdapat beberapa temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disepakati tidak dilakukan koreksi pada LKKL Audited Tahun 2019 karena alasan sebagai berikut: (a) luas taman tidak dihitung sebagai bagian dalam perhitungan bangunan karena taman termasuk ke dalam fasilitas pendukung dan tidak berbentuk bangunan, (b) data keluasan final masih menunggu konfirmasi dari BPN setempat, (c) hasil penilaian terbit di Januari 2020, dan (d) tim penilai telah melakukan penilaian ulang dan atas obyek dimaksud diperlakukan sebagai penilaian baru. (Temuan pemeriksaan yang tidak dilakukan koreksi sebagaimana terlampir pada Lampiran II).
3. Terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil revaluasi yang akan ditindaklanjuti pada perbaikan atas LKKL Audited 2019 yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, **sehingga Lampiran NKF dan LKKL Audited yang telah disampaikan tersebut perlu diperbaiki**. Perbaikan Lampiran NKF dan LKKL Audited Tahun 2019 (*softcopy dan hardcopy*) akan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan **paling lambat tanggal 7 Mei 2020**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian PPN/Bappenas
(BA 055)



Titin Gantini

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Tunggul Yunianto

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Widhi Anggraeni

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran 055
Urutan Bagian Anggaran KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2 + 6	10 = 3 + 8	11 = 9 - 10
41. Pendapatan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	4.895.435.183	-	4.895.435.183	-	-	-	-	4.895.435.183	-	4.895.435.183
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423. Pendapatan PHBP Lainnya	4.895.435.183	-	4.895.435.183	-	-	-	-	4.895.435.183	-	4.895.435.183
424. Pendapatan BUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	4.895.435.183	-	4.895.435.183	-	-	-	-	4.895.435.183	-	4.895.435.183

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 2 + 7	11 = 4 + 9	12 = 10 - 11
51. Belanja Pegawai		199.281.882.924	26.098.201	199.255.784.723	1.362.396.000	-	-	-	199.255.784.723	26.098.201	199.255.784.723
52. Belanja Barang dan Jasa		1.131.629.181.217	4.088.142.838	1.128.841.038.379	-	-	-	-	1.131.629.181.217	4.088.142.838	1.129.713.334.519
53. Belanja Modal		280.862.673.739	31.825.000	280.830.848.739	117.596.824	-	-	-	280.830.848.739	31.825.000	280.229.565.563
54. Belanja Pembangunan Fisik dan Dik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Belanja Pemeliharaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Belanja Hibah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Belanja Bantuan Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA		1.585.764.755.354	5.156.066.139	1.580.608.689.215	3.299.872.824	-	-	-	1.585.764.755.354	5.156.066.139	1.580.608.689.215

KEMENTERIAN KEUANGAN

Titin Gantini

KEMENTERIAN KEUANGAN

Denny Febriano Singawirja

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Widhi Anggrastini

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2019
PER 31 DESEMBER 2019

KUL : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BA : 055

LAMPIRAN NOT A KESEPAKATAN

Nomor : 078-63310
Tanggal : Mei 2020

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI	UNAUDITED KORREKTAL	KOREKSI		AUDITED	Koreksi terkait Keabsahan untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Tim BPK LNPP		AUDITED PERBAIKAN
				DEBIT	KREDIT		DEBIT	KREDIT	
0-0-1									
ASET LANCAR									
Kas di Bendahara Pengeluaran	38.136.194		38.136.194			38.136.194			38.136.194
Kas di Bendahara Penerimaan									
Kas Lainnya dan Setara Kas	7.156.266.418		7.156.266.418	11.321.277.579	12.562.307.040	5.967.367.257			5.967.367.257
Kas pada BLU									
Investasi Jangka Pendek BLU									
Referensi Dibayar Dimuka (prepaid)	43.482.474.844		43.482.474.844	13.002.000	284.762.666	43.207.682.179			43.207.682.179
Uang Muka Belanja (prepayment)									
Penerimaan yang Masih Harus Diterima	2.297.530		2.297.530			2.297.530			2.297.530
Piutang Pajak									
Penyisihan PTH-Piutang Pajak									
Piutang Pajak (Neto)									
Piutang Bukan Pajak									
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak									
Piutang Bukan Pajak (Neto)									
Bagian Lancar TPA									
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA									
Bagian Lancar TPA (Mod)									
Bagian Lancar PTHGR				51.805.080		51.805.080			51.805.080
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PTHGR					259.025	(259.025)			(259.025)
Bagian Lancar PTHGR (Neto)				51.805.080	259.025	51.546.055			51.546.055
Piutang dari Kegiat BLU									
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiat BLU									
Piutang dari Kegiat BLU (Neto)									
Persewaan	89.524.541.338		89.524.541.338	3.042.836	2.590.000	89.524.541.338			89.524.541.338
Jumlah Aset Lancar	138.804.888.434		138.804.888.434	11.456.725.887	12.871.758.773	137.791.560.550			137.791.560.550
INVESTASI JANGKA PANJANG									
Investasi Permanen BLU									
Jumlah Investasi Jangka Panjang									
ASET TETAP									
Tanah	1.484.967.285.305		1.484.967.285.305	26.971.000	363.506.040	1.488.443.750.305			1.484.443.750.305
Peralatan dan Mesin	433.819.378.238		433.819.378.238	155.307.007		433.773.685.339			433.773.685.339
Gedung dan Bangunan	158.340.365.882		158.340.365.882		401.305.613	157.938.960.269			157.938.960.269
Jalan, Jembatan, dan Jaringan	6.020.092.566		6.020.092.566			6.020.092.566			6.020.092.566
Aset Tetap Lainnya	101.305.867.321		101.305.867.321			101.305.867.321			101.305.867.321
Kumulatif Garam Pengersaan									
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(234.304.512.136)		(234.304.512.136)	663.110.587	24.741.562	(236.258.194.736)			(236.258.194.736)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(22.529.474.651)		(22.529.474.651)	72.511.527		(21.807.963.124)			(21.807.963.124)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Jaringan	(3.159.932.731)		(3.159.932.731)	24.873.340		(3.135.059.391)			(3.135.059.391)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya									
Jumlah Aset Tetap	1.922.225.817.192		1.922.225.817.192	385.613.514	389.613.165	1.922.222.242.141	3.147.618.268		1.925.370.121.409

PIUTANG JANGKA PANJANG									
Tagihan Penyertaan Anggaran									
Penyertaan Piutang Tak Tersebut - TPA									
Tagihan Penyertaan Anggaran (Neto)									
Tagihan BUKU KANTOR (Gard Rug)									
Pembayaran Piutang Tak Tersebut - TPA									
Tagihan BUKU KANTOR (Gard Rug) (Neto)									
Piutang Jangka Panjang Lainnya									
Pembayaran Piutang Tak Tersebut - Piutang Jangka Panjang									
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Neto)									
Jumlah Piutang Jangka Panjang									
ASET LAINNYA									
Kas dan Setorannya	490.209.375.000		490.209.375.000				490.209.375.000		
Aset Konsolidasi									
Aset Tak Berwujud	55.541.922.815		55.541.922.815	241.329.624			55.783.252.439		
Dana yg Dibatas Penggunaannya									
Dana Penjaminan									
Dana Kelolaan BLU									
Aset Lain-lain	67.805.464.809		67.805.464.809	114.138.815			68.180.544.822		
Akumulasi Penyusutan Keras dan Tak Berwujud									
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	16.841.580.215		16.841.580.215	12.582.910			16.977.126.803		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	139.812.300.363		139.812.300.363	84.316.250			139.825.335.474		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud									
Jumlah Aset Lainnya	570.768.341.847		570.768.341.847	106.355.181			571.370.769.584		
JUMLAH ASET	2.632.198.892.875		2.632.198.892.875	13.263.235.068			2.634.532.431.543		
KEWAJIBAN									
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK									
Utang kepada Pihak Ketiga	4.545.085.157		4.545.085.157				4.545.085.157		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang									
Utang Kewajiban Pembiayaan Pembiayaan									
Utang Jangka Pendek Lainnya									
Hibah Yang Belum Diakarkan	6.375.000.000		6.375.000.000	6.375.000.000			6.375.000.000		
Utang Muka dan KPPN	28.136.194		28.136.194				28.136.194		
Pembayaran Utang Jangka Pendek	197.362.416		197.362.416				197.362.416		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	13.118.513.767		13.118.513.767	12.750.996.950			13.118.513.767		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG									
Utang Jangka Panjang Eksternal									
Kewajiban Konsolidasi									
Utang Jangka Panjang BUKU KANTOR (Gard Rug)									
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang									
SUMBAH KEWAJIBAN	13.118.513.767		13.118.513.767	12.750.996.950			13.118.513.767		
EKUITAS	2.619.037.378.998		2.619.037.378.998	13.668.155.638			2.629.750.212.775		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.632.198.892.875		2.632.198.892.875	14.483.506.038			2.634.532.431.543		

Jakarta, Mei 2020

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TIM AUDITOR BPK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DJPB SELAKU PENYUSUN LKPP

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DJKN SELAKU PENYUSUN LBMN

Toni Gantini

Widi Anggrawan

Denny Febrina Singamita

Tasya Yulianto

LAPORAN OPERASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2019
 (dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	Koreksi Revaluasi Setelah Penyampaian Laporan Unaudited		Koreksi Audited		Audited	Koreksi terkait Revaluasi untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan Tim BPK/LKPP		Audited Perbaikan
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		Debet	Kredit	
KEGIATAN OPERASIONAL									
PENDAPATAN OPERASIONAL									
PENDAPATAN PERPAJAHAN									
Pendapatan Pajak Penghasilan									
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Lain-lain									
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan									
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan									
Pendapatan Cukai									
Pendapatan Pajak Lainnya									
Pendapatan Bea Masuk									
Pendapatan Retribusi									
Pendapatan Pajak Lain-lain									
Jumlah Pendapatan Perpajakan									
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK									
Pendapatan Sumber Daya Alam									
Pendapatan Bagian Pemeliharaan, Jasa, dan									
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya									
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	526.895.890					526.895.890			526.895.890
PENDAPATAN HIBAH									
Pendapatan Hibah									
Jumlah Pendapatan Hibah									
PENDAPATAN PENYESUAIAN									
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	526.895.890					526.895.890			526.895.890
BEBAN OPERASIONAL									
Beban Pegawai	185.872.080.290			90.265.786	44.580.706	161.031.193.376			161.031.193.376
Beban Persediaan	18.275.931.263					18.275.931.263			18.275.931.263
Beban Barang dan Jasa	1.585.356.445.552			5.704.650.647	1.706.799.175	1.585.356.445.552			1.585.356.445.552
Beban Pemeliharaan	17.541.575.727					17.541.575.727			17.541.575.727
Beban Perbaikan Denda	355.843.248.578			832.143.000	2.621.585.744	355.843.248.578			355.843.248.578
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	553.121.187.383			3.900.000	3.042.586	553.121.187.383			553.121.187.383
Beban Bunga									
Beban Subsidi									
Beban Hibah									
Beban Bantuan Sosial									
Beban Penyusutan dan Amortisasi	72.592.735.245			64.219.475	875.650.045	71.729.145.675	1.572.500	3.147.253.234	65.944.454.341
Beban Penyusutan Rutang Tak Tertagih				259.025		259.025			259.025
Beban Transfer									
Beban Lain-lain									
Beban Penyesuaian									
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	3.122.632.974.855			5.490.478.130	5.182.857.558	3.122.950.595.438	1.572.500	3.147.253.234	3.119.814.914.704
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.122.106.078.965)			(5.490.478.130)	(5.182.857.558)	(3.122.433.699.548)	(1.572.500)	(3.147.253.234)	(3.119.268.918.818)

LAPORAN OPERASIONAL
TAMUN ANDISARAN 2019
(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	Koreksi Revisi/Revisi Perbaikan Laporan Unaudited		Koreksi Audited		Audited	Koreksi Revisi/Revisi untuk mendukung/ri Temuan Pemeriksaan Tim BPK LKPP		Audited Perbaikan
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		Debet	Kredit	
KEGIATAN NON OPERASIONAL									
SURPLUS(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR									
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.023.539.644					1.023.539.644			1.023.539.644
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(461.465.400)					(461.465.400)			(461.465.400)
Jumlah Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	562.074.235					562.074.235			562.074.235
SURPLUS(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG									
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang									
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang									
Jumlah Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang									
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA									
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.807.915.503				51.805.080	15.807.915.503			15.807.915.503
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(14.482.284.472)					(14.482.284.472)			(14.482.284.472)
Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.325.631.031				51.805.080	1.325.631.031			1.325.631.031
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	1.325.631.031				51.805.080	2.038.758.707			2.038.758.707
POS LUAR BIASA									
Beban Luar Biasa									
SURPLUS(DEFISIT) DAR POS LUAR BIASA									
SURPLUS(DEFISIT) LG	(3.120.129.348)			(5.490.478.120)	(5.131.652.478)	(3.120.395.348.841)	(1.572.505)	(3.147.251.234)	(3.117.245.663.767)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tan Lamon

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Denny Fathra Singsing

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Widhi Anggoro

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2019
PER 31 DESEMBER 2019

K/L : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BA : 055

[illegible][illegible]

RECEIVED: 2011-09-20
REVISED: 2012-01-10
ACCEPTED: 2012-02-01

^aMALDI-TOF MS.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIPON SELAKU PEMUSUNGAN

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Yoon Gyeong

Geny Fernando Singarier

ប្រែសម្រួល ៖ ហេង ហុង